



Katalog BPS: 3102009

PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN

INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL



<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

**PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN
INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL**

<https://www.bps.go.id>

**Sub Direktorat Indikator Statistik
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik**

PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL

ISBN: 978-979-064-251-5

No. Publikasi: 07330.1022

Katalog BPS: 3102009

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: 146 halaman

Naskah:

Sub Direktorat Indikator Statistik

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Indikator Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta – Indonesia

Dicetak Oleh:

CV Nario Sari

KATA PENGANTAR

Pengukuran kinerja pembangunan wilayah selama ini didominasi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memfokuskan pada dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak. Sebagai sebuah ukuran kinerja, pada dasarnya IPM yang dibentuk dari beberapa indikator belum mencakup seluruh dimensi pembangunan manusia seperti yang dirumuskan oleh UNDP. Selain itu perubahan dalam jangka pendek dalam bidang pembangunan tertentu tidak secara langsung diakomodir oleh IPM. Untuk melengkapi ukuran kinerja pembangunan yang ada, Indeks Pembangunan Regional (IPR) disusun untuk mengukur kinerja pembangunan daerah di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan IPR pertama kali dilakukan pada kajian awal. Agar menghasilkan IPR yang memenuhi kriteria ideal dalam arti mampu mengukur perubahan antar waktu dan perbandingan antar wilayah, penyempurnaan metodologi penyusunan IPR dilakukan pada kajian lanjutan ini.

IPR dibentuk berdasarkan lima dimensi pembangunan yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur dan pelayanan publik, dimensi kualitas lingkungan hidup dan dimensi teknologi, informasi dan komunikasi. IPR yang dihasilkan hanya disajikan pada tingkat provinsi. Karena disusun menurut dimensi pembangunan, IPR yang dikembangkan pada kajian lanjutan ini juga mampu mengukur perubahan kinerja pembangunan di berbagai dimensi pembangunan. Kegunaan lain dari IPR adalah untuk memetakan kemajuan pembangunan pada setiap dimensi dan mengevaluasi dimensi mana yang memerlukan prioritas.

Semoga publikasi berjudul **Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional** ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2010
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional	4
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	4
1.4. Metodologi Penyempurnaan IPR	5
2. TINJAUAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN REGIONAL	7
2.1. Pembangunan dan Pembangunan Regional: Pengertian dan Konsep	7
2.2. Indikator dan Indeks Pembangunan: Tinjauan Singkat	10
2.3. Pengukuran Pembangunan Regional: Kajian Literatur	14
3. KERANGKA PENYUSUNAN IPR	19
3.1. Ukuran Kinerja Pembangunan yang Ideal	19
3.2. Evaluasi Kajian Awal: Aspek Metodologi Penyusunan IPR	20
3.3. Aspek Penilaian Pembangunan Regional	27
3.4. Pemilihan Indikator	28
3.5. Kerangka Pembentukan IPR	30
3.6. Penentuan Target Capaian Setiap Indikator	47
4. METODOLOGI PENYUSUNAN IPR	49
4.1. Sumber Data	49
4.2. Transformasi Indikator	49
4.3. Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Indikator	51

4.4. Pembobotan Indikator	55
4.4.1 Metode Penentuan Bobot	55
4.4.2 Penentuan Bobot Indikator	57
4.5. Pembobotan Dimensi dengan Metode <i>Equal Weighting</i>	61
4.6. Pembentukan IPR dan Dimensi IPR dengan Agregasi Linier	62
4.7. Langkah Penghitungan IPR	64
5. KINERJA PEMBANGUNAN REGIONAL	65
5.1. Kinerja Pembangunan Dimensi Ekonomi	66
5.2. Kinerja Pembangunan Dimensi Sosial	68
5.3. Kinerja Pembangunan Dimensi Infrastruktur & Pelayanan Publik ..	71
5.4. Kinerja Pembangunan Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup	74
5.5. Kinerja Pembangunan Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	76
5.6. Kinerja Pembangunan Pembangunan Regional Secara Umum	78
5.7. Keterkaitan Antar Dimensi IPR.....	84
5.8. Keterkaitan IPR dengan Indikator Pembangunan Lain	85
6. PENUTUP	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Kegunaan IPR dalam Perumusan Kebijakan	93
LAMPIRAN	95
Daftar Pustaka	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Pohon IPR	31
Gambar 3.2.	Pohon Dimensi Ekonomi	31
Gambar 3.3.	Pohon Dimensi Sosial	34
Gambar 3.4.	Pohon Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik	38
Gambar 3.5.	Pohon Dimensi Lingkungan Hidup	41
Gambar 3.6.	Pohon Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi	43
Gambar 3.7.	Pengelompokkan Indikator Penyusun IPR.....	46
Gambar 5.1.	Indeks Dimensi Ekonomi, 2008-2009	66
Gambar 5.2.	Indeks Dimensi Sosial, 2008-2009	69
Gambar 5.3.	Indeks Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik, 2008-2009	73
Gambar 5.4.	Indeks Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, 2008-2009.....	74
Gambar 5.5.	Indeks Dimensi TIK, 2008-2009	77
Gambar 5.6.	IPR Gabungan Semua Dimensi , 2008-2009	81
Gambar 5.7.	IPR Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, 2008-2009...	81
Gambar 5.8.	Hubungan antara IPR dan IPM, 2009	86
Gambar 5.9.	Plot antara IPR dan Pertumbuhan Ekonomi, 2009	88
Gambar 5.10.	Hubungan Antara Reduksi <i>Shortfall</i> IPR Dimensi Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi, 2008-2009	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rincian Indikator Kelompok Dimensi Ekonomi dan Signifikansi Penggunaanya	32
Tabel 3.2.	Rincian Indikator Kelompok Dimensi Sosial dan Signifikansi Penggunaanya	34
Tabel 3.3.	Rincian Indikator Kelompok Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik dan Signifikansi Penggunaanya	38
Tabel 3.4.	Rincian Indikator Kelompok Dimensi Lingkungan Hidup dan Signifikansi Penggunaanya	41
Tabel 3.5.	Rincian Indikator Kelompok Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dan Signifikansi Penggunaanya	44
Tabel 4.1.	Nilai Maksimum-Minimum/Capaian Indikator	52
Tabel 4.2.	Bobot Setiap Indikator Penyusun IPR	58
Tabel 5.1.	Peringkat IPR Dimensi Ekonomi	67
Tabel 5.2.	Peringkat IPR Dimensi Sosial	70
Tabel 5.3.	Peringkat IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik.	72
Tabel 5.4.	Peringkat IPR Dimensi Lingkungan Hidup	75
Tabel 5.5.	Peringkat IPR Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	78
Tabel 5.6.	Peringkat IPR menurut Provinsi	80
Tabel 5.7.	Nilai Koefisien Korelasi antar Dimensi IPR, 2009	85
Tabel 5.8.	Koefisien Korelasi antara IPM dan Dimensi IPR, 2009	87
Tabel 5.9.	Pengelompokkan Provinsi menurut IPR dan Pertumbuhan Ekonomi.....	89

<https://www.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada berbagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah di Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhannya yang diukur berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan regional di bidang ekonomi yang umum digunakan. Namun, sebagai ukuran keberhasilan pembangunan wilayah, PDRB mempunyai kelemahan utama, yaitu tingginya nilai PDRB tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan konsep, nilai PDRB yang tinggi di suatu wilayah tidak selalu dinikmati oleh yang bersangkutan meskipun dihasilkan oleh wilayah tersebut. Misalnya, meskipun Provinsi Papua dengan nilai PDRB dan PDRB per kapita yang tinggi, namun secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih berada jauh di bawah provinsi lain yang nilai PDRB dan PDRB per kapitanya jauh lebih rendah dari PDRB Provinsi Papua.

Dengan adanya kelemahan ini, UNDP mencoba mengajukan ukuran lain yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kinerja pembangunan wilayah dengan melihat tiga aspek utama yang diharapkan mampu memotret outcome dari kegiatan pembangunan di berbagai aspek baik

secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga aspek yang dicakup dalam IPM adalah pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain IPM, UNDP juga mengajukan berbagai indeks komposit lain seperti Indeks Kemiskinan Manusia dan indeks-indeks lain yang didasarkan pada perbedaan gender sebagai pelengkap dalam mengukur kinerja pembangunan manusia yang belum bisa diukur oleh IPM secara umum. Selain itu, IPM juga diajukan untuk melihat sejauh mana kemajuan pembangunan ekonomi selaras dengan kemajuan pembangunan manusia.

Berdasarkan publikasi *Human Development Report* 1996, UNDP memperluas dan memperdalam konsep pembangunan manusia yang mencakup lima dimensi: pemberdayaan, kerjasama, kesamaan, keberlanjutan, dan keamanan. UNDP dalam laporan tersebut juga mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang mendorong pembangunan manusia dalam segala dimensinya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi seharusnya: (i) menghasilkan kesempatan kerja penuh dan jaminan hidup, (ii) mendorong kebebasan dan pemberdayaan masyarakat, (iii) mendistribusikan hasil pembangunan secara merata, (iv) mempromosikan kerjasama dan kerekatan sosial, dan (v) mempertahankan pembangunan manusia di masa mendatang.

Sebagai alat ukur kinerja pembangunan, IPM secara praktis telah dikembangkan dan digunakan sejak tahun 1990-an. Penggunaan IPM sebagai alat ukur kinerja pembangunan wilayah di Indonesia telah cukup diakui dalam kurun waktu satu dekade ini, bahkan IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran bagi penentuan perimbangan keuangan daerah (DAU). Dengan melihat kenyataan bahwa dimensi pembangunan manusia lebih luas dari ketiga aspek yang diukur IPM, maka jelas bahwa IPM masih mempunyai keterbatasan yaitu belum mampu mengukur secara utuh kinerja pembangunan wilayah. Sehingga dalam perjalanannya, keterbatasan IPM sebagai alat ukur utama kinerja pembangunan banyak mendapat sorotan dan kritik.

Salah satu kritik ditujukan pada perkembangan nilai IPM yang dinilai sangat lambat oleh sejumlah pemerintah daerah, padahal usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia telah dilakukan secara maksimal. Salah satu upayanya adalah melalui alokasi sumber daya dan sumber dana yang cukup besar bagi peningkatan sejumlah indikator yang terkait dengan IPM. Munculnya kritik ini mungkin disebabkan adanya hal yang kurang disadari oleh pemerintah daerah bahwa nilai IPM tidak dapat meningkat secara drastis dalam jangka pendek atau dalam jangka waktu satu atau dua tahun. Perubahan nilai IPM akan dapat terlihat secara jelas dalam jangka waktu lima tahun atau lebih. Semua investasi yang telah ditanamkan pemerintah daerah di berbagai sektor yang terkait dengan IPM tidak secara langsung (instan) akan dapat dilihat hasilnya pada tahun berikutnya. Hal ini merupakan kelemahan lain dari IPM yang tidak mampu melihat perubahan secara nyata dalam jangka pendek satu atau dua tahun mengenai investasi yang telah ditanamkan pemerintah daerah di berbagai sektor yang terkait dengan IPM seperti pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Adanya keterbatasan yang ditemui dalam penggunaan IPM sebagai alat ukur kinerja pembangunan wilayah di atas, telah memunculkan ide mengenai pengukuran pembangunan regional yang lebih luas. BPS (2009) dalam kajian awalnya mengajukan ukuran yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Regional (IPR) yang mencoba mengukur kinerja pembangunan wilayah dari berbagai dimensi. Berkaitan dengan diterbitkannya hasil kajian awal IPR tersebut, ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, IPR yang dihasilkan pada kajian awal tampaknya belum mampu mengukur hasil pembangunan secara riil karena sejumlah indikator yang dicakup masih berupa gabungan dari berbagai jenis kelompok indikator baik input, output dan outcome. Dengan demikian hasil yang diperoleh sulit diinterpretasikan. Kedua, IPR yang dihasilkan hanya mengukur tingkat pembangunan suatu wilayah yang secara relatif dibandingkan dengan wilayah lain, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengukur

perkembangan atau perubahan kinerja pembangunan wilayah antar waktu. Berangkat dari dua hal tersebut, kajian lanjutan bagi penyempurnaan penyusunan IPR perlu dilakukan guna memperoleh sebuah ukuran kinerja pembangunan yang lebih baik dan mampu memotret perbedaan tingkat pembangunan baik antar wilayah maupun antar waktu.

1.2. Tujuan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional

Secara umum, kajian lanjutan penyusunan Indeks Pembangunan Regional adalah untuk menyempurnakan IPR hasil kajian awal guna memperoleh ukuran kinerja pembangunan yang lebih valid. Secara umum kajian lanjutan penyusunan IPR adalah untuk menyusun IPR yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan antar wilayah dan antar waktu.

Secara khusus tujuan penyusunan Indeks Pembangunan Regional mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Mengetahui tingkat pembangunan regional secara umum
- Membandingkan kinerja pembangunan regional antar provinsi
- Melihat perkembangan kinerja pembangunan regional antar waktu
- Mengidentifikasi provinsi-provinsi dengan kinerja pembangunan regional terbaik dan terburuk pada setiap dimensi pembangunan
- Menawarkan ukuran alternatif untuk evaluasi kinerja pembangunan bagi perumus kebijakan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Kajian lanjutan penyusunan IPR hanya mencakup tingkat provinsi. Sumber data untuk penyusunan IPR utamanya adalah hasil survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS, dan publikasi-publikasi BPS yang datanya bersumber dari instansi lain. Jenis indikator yang dicakup dalam penyusunan

IPR ini hanyalah indikator yang bisa mengukur kinerja (*performance oriented*). Termasuk di dalamnya adalah indikator yang bersifat output dan outcome.

1.4. Metodologi Penyempurnaan IPR

Penyempurnaan penyusunan IPR mengacu pada hasil kajian awal. Penyempurnaan IPR dilakukan dengan mengkaji dan mengevaluasi penyusunan IPR pada kajian awal untuk mengetahui berbagai kekurangan yang ada. Fokus penyempurnaan ditekankan pada aspek metodologi dan pemilihan indikator yang dicakup dalam penyempurnaan di publikasi ini. Penyempurnaan metodologi juga ditekankan pada perbaikan penyusunan IPR yang dapat mengukur perubahan antar waktu dengan menentukan nilai minimum dan maksimum yang tetap (*fixed values*) untuk setiap indikator.

2

TINJAUAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN REGIONAL

2.1. Pembangunan dan Pembangunan Regional: Pengertian dan Konsep

Sebelum membahas pengukuran pembangunan regional, kiranya penting untuk membahas konsep pembangunan karena dari konsep-konsep pembangunan tersebut selanjutnya dapat ditentukan aspek-aspek apa saja yang penting untuk diukur. Ada beberapa makna dari kata pembangunan. Secara harfiah arti dari pembangunan menurut Kamus Webster adalah "*gradual advancement or growth through a series of progressive changes* (kemajuan atau pertumbuhan secara gradual melalui serangkaian perubahan)". Jelas bahwa pembangunan mengandung makna adanya perubahan. Anonim (2007) juga menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan konsep tersebut, pembangunan dapat bermakna ganda yaitu: pertumbuhan yang terukur secara kuantitatif (pendapatan per kapita, konsumsi, jumlah rumah sakit, panjang jalan, dsb.) dan perubahan yang terukur secara kualitatif (sikap, kelembagaan, partisipasi, tata nilai, dsb.) (Anonim 2007).

Dalam perjalanannya, konsep pembangunan berkembang menjadi beberapa kajian dengan tema-tema tertentu seperti pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian, pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Beberapa kajian tersebut mencoba untuk menggali dan mengukur lebih dalam tentang pembangunan baik yang bersifat parsial (menekankan pada bidang pembangunan tertentu) maupun yang bersifat komprehensif (mencakup semua dimensi pembangunan). Terkait dengan konteks pembangunan regional, Ghalib (2005) mendefinisikan regionalisasi pembangunan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan sebagai usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional (sub wilayah nasional), atau wilayah regional menjadi subregional.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan regional lebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah, seperti yang tertera dalam tujuan pembangunan yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu untuk:

1. Memelihara keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah,
2. Memelihara keseimbangan ekonomi antar wilayah dan mencegah kesenjangan antar daerah,
3. Meningkatkan prakarsa daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan,
4. Memelihara keserasian pembangunan antara pusat-pusat kegiatan pembangunan di wilayah-wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah pedesaan sekitarnya.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dalam kajian awal penyusunan Indeks Pembangunan Regional, BPS (2009a) menyebutkan tiga aspek utama dari pembangunan yang mencakup aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Ketiga aspek pembangunan tersebut sejalan dengan bidang-bidang pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen kebijakan

pengarusutamaan pembangunan yang disusun oleh Bappenas. Dokumen Bappenas menyebutkan bahwa pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam 3 pilar pembangunan tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yaitu: (1) ekonomi: indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) sosial: tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/miskin, dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup: dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem.

Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan Bappenas tampaknya juga sejalan dengan beberapa tema pembangunan seperti yang dirumuskan oleh URS Australia (2002) dalam menyiapkan indikator pembangunan Regional bagi wilayah Australia Barat. Beberapa poin yang dirangkum dalam laporan tersebut mencakup tema utama sebagai berikut:

- Diversifikasi ekonomi yang semakin berkembang
 - Masyarakat yang memiliki keahlian (skills)
 - Infrastruktur wilayah yang membaik
 - Ekonomi wilayah yang semakin maju dan berkembang
 - Investasi wilayah yang semakin tumbuh
- Masyarakat yang berpendidikan, sehat, dan aman
 - Meningkatnya lama masa pendidikan
 - Pelayanan kesehatan yang efektif dan memadai
 - Kualitas hidup yang semakin meningkat
 - Terciptanya masyarakat yang aman
- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Membaiknya kualitas lingkungan hidup
 - Proteksi terhadap konservasi keanekaragaman hayati

2.2. Indikator dan Indeks Pembangunan: Tinjauan Singkat

Berbagai studi terkait dengan pengukuran kinerja pembangunan wilayah menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Beberapa istilah yang muncul antara lain adalah (i) perbandingan pembangunan regional (ii) disparitas pembangunan, dan (iii) ketimpangan pembangunan. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, pada dasarnya berbagai studi tersebut tujuannya sama yaitu melihat perbedaan antar wilayah serta melakukan pemeringkatan antar wilayah untuk melihat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lainnya.

Usaha-usaha untuk mengukur kemajuan pembangunan telah dilakukan dalam beberapa dekade. Usaha-usaha tersebut khususnya ditekankan pada bagaimana mengukur kemajuan pembangunan di bidang sosial dengan fokus perhatian pada pemilihan sejumlah indikator yang dinilai representatif untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial. Usaha tersebut diawali oleh badan dunia melalui publikasi yang berjudul "*United Nations' Report on International Definition of Standard and Levels of Living*" yang dipublikasikan pada tahun 1954 yang kemudian direvisi pada tahun 1961 melalui publikasi berjudul "*United Nations' International Socio-economic Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide*" (lihat Ray 2008). Usaha-usaha untuk mengukur pembangunan di bidang sosial terus dikembangkan. Chakravarty (1976) mencoba membuat sebuah kerangka fikir (*framework*) yang mengintegrasikan sejumlah indikator sosial dan demografi dengan memasukkan sejumlah indikator statistik termasuk pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, perumahan, distribusi pendapatan, konsumsi dan indikator lain yang relevan untuk mengukur tingkat pembangunan di negara-negara berkembang.

Selanjutnya Ganguli dan Gupta (1976) mencoba mengukur standar hidup dengan mengajukan Indeks Tingkat Standar Hidup berupa indeks komposit yang disusun berdasarkan tiga indikator: (1) kalori per kapita, (2) konsumsi protein, dan (3) persentase pengeluaran makanan non-sereal

terhadap total pengeluaran makanan. Usaha pengukuran kualitas hidup dikembangkan lebih lanjut oleh Morris (1979) yang mencoba membangun Indeks Kualitas Hidup secara Fisik (*Physical Quality Live Index/PQLI*) yang didasarkan pada tiga indikator utama yaitu (1) angka melek huruf, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka harapan hidup saat lahir. Indeks tersebut merupakan indeks komposit sederhana yang digunakan untuk meneliti dampak dari bantuan Amerika Serikat terhadap kemajuan negara-negara berkembang. Dalam menggabungkan ketiga variabel, Morris menggunakan prosedur penskalaan dengan mentransformasi variabel kedalam nilai antara 0 dan 100 dan kemudian mencari nilai rata-rata sederhana dari ketiga variabel tersebut untuk mendapatkan nilai PQLI. Ukuran PQLI tersebut selanjutnya menjadi ukuran yang sangat populer dalam pengukuran pembangunan karena keserhanaan dalam prosedur penghitungan.

Sementara usaha-usaha di atas dapat dikatakan sebagai fondasi dalam menganalisis pembangunan antar negara, Bank Dunia dan badan dunia lain lebih lanjut memperkuat penyediaan informasi tentang indikator sosial dalam sebuah sistem yang di-update secara rutin. Bank Dunia melalui publikasi tahunan *World Development Report (WDR)* secara rutin menyajikan berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan global. Dalam publikasi WDR tersebut indeks komposit pembangunan tidak disajikan.

Selanjutnya, pada tahun 1990, United Nations Development Program (UNDP) mempublikasikan *Human Development Report (HDR)* menyajikan sejumlah indikator pembangunan manusia yang sangat populer yang selanjutnya dipublikasikan secara rutin setiap tahun. Publikasi tersebut menyajikan informasi tentang aspek pembangunan manusia dari hampir seluruh negara. Dalam publikasi HDR tersebut dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan tetapi hanyalah sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan akhir dari pembangunan yaitu pembangunan manusia

yang dilihat dari beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan dan tingkat hidup standar di samping ukuran-ukuran lain seperti kebebasan berpolitik dan hak-hak asasi manusia lain. Publikasi HDR secara rutin menyajikan beberapa indeks komposit pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemiskinan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Berkaitan dengan penggunaan indikator untuk mengukur pembangunan, dalam perkembangannya *International Institute for Sustainable Development* (IISD) mencatat beberapa hal. Pertama, kebutuhan akan agregat indeks untuk mengukur kinerja pembangunan antara lain dengan munculnya sejumlah indeks seperti Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index* (HDI), *Environmental Sustainability Index (ESI)*, *Environmental Performance Index (EPI)*, *Genuine Progress Indicators (GPI)* dan lain sebagainya. Kedua, dalam rangka mengikuti perkembangan kinerja pembangunan dan menghubungkannya dengan prioritas kebijakan, penggunaan indikator yang berorientasi pada tujuan dan target semakin diperlukan. *Millenium Development Goal Indicators (MDGIs)* merupakan indikator terkini yang disusun untuk menghubungkan dengan target spesifik pada tingkat global. Target yang ditetapkan pada MDG akan dicapai melalui kebijakan pembangunan yang terukur dan dapat dievaluasi dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada MDGIs. Jelasnya, penggunaan indikator yang lebih baik dalam mengukur kinerja memperlihatkan tren yang semakin menaik. Ketiga, meningkatnya tren tentang ketertarikan terhadap indikator-indikator yang erat kaitannya dengan prioritas kebijakan atau dikenal dengan *headline indicators*.

Selain MDGs, di level nasional dikenal indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2008 yang memuat lebih dari 80 indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian

pembangunan dan tergolong dalam beberapa aspek maupun fokus kinerja, diantaranya:

1. Aspek kesejahteraan masyarakat

- Bidang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, mencakup pertumbuhan PDB, inflasi, indeks gini, indeks williamson, dll.
- Bidang kesejahteraan sosial, mencakup angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, rasio penduduk yang bekerja, angka kriminalitas yang tertangani, dll.
- Bidang seni budaya dan olah raga, mencakup jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, sarana olah raga, dll.

2. Aspek pelayanan umum

- Bidang pelayanan dasar seperti angka putus sekolah, rasio guru murid, rasio puskesmas per penduduk, persentase penduduk berakses air minum, rasio panjang jalan dengan kondisi baik, rasio irigasi, dll.
- Bidang pelayanan penunjang, meliputi PMDN, PMA, partisipasi angkatan kerja, rasio KDRT, rasio polisi per penduduk, dll.

3. Aspek daya saing daerah

- Bidang kemampuan ekonomi daerah, meliputi konsumsi per kapita, rasio faktor produksi dengan produk, produktivitas daerah per sektor ekonomi, dll.
- Bidang fasilitas wilayah/infrastruktur, meliputi rasio panjang jalan per kendaraan, luas wilayah perkotaan, jumlah bank, persentase rumahtangga menggunakan air bersih, rasio ketersediaan listrik, persentase restoran menurut jenis, dll.
- Bidang iklim investasi, meliputi angka kriminalitas, jumlah demo, jumlah perda yang mendukung investasi, dll.
- Bidang sumber daya manusia, meliputi rasio lulusan S1/S2/S3 per penduduk dan rasio ketergantungan.

2.3. Pengukuran Pembangunan Regional: Kajian Literatur

Pembangunan regional mencakup beberapa aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lainnya. Untuk menilai kinerja hasil pembangunan regional tentunya diperlukan suatu ukuran kualitatif maupun kuantitatif. Usaha mengukur pembangunan regional dalam berbagai dimensi pembangunan telah dilakukan di beberapa Negara. Sebuah studi di Cina oleh Wang (2007) yang dimuat dalam publikasi ADB *Institute Discussion Paper No. 66* berjudul "*Who's in First? A Regional Development Index for the People's Republic of China's Provinces*" mencoba mengukur pembangunan regional dengan memasukkan sekitar 70 indikator dasar, yang dikelompokkan ke dalam 11 aspek, diantaranya:

- Tingkat pertumbuhan ekonomi
- Produktivitas
- Pertumbuhan Manusia
- Pendidikan
- Persamaan Sosial
- Pelayanan umum
- Keamanan masyarakat
- Infrastruktur
- Perlindungan alam sekitar/lingkungan
- Perkembangan kelembagaan
- Sumber daya alam dan lokasi geografis

Meskipun studi yang dilakukan Wang tersebut mencakup indikator yang sangat banyak dan mencakup dimensi pembangunan yang komprehensif, ada kelemahan utama dari studi tersebut yaitu ukuran yang dihasilkan hanya mampu membandingkan secara relatif tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lain tetapi tidak mampu mengukur kemajuan suatu wilayah antar waktu. Australia juga telah menyusun sejumlah indikator pembangunan regional yang mencakup berbagai bidang untuk memonitor perkembangan antar waktu.

Tetapi publikasi yang dihasilkan hanya sebatas penyajian indikator pembangunan regional menurut wilayah.

Selanjutnya pengukuran kinerja pembangunan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada pengukuran yang sedang dikembangkan oleh badan-badan dunia dalam mengukur kinerja pembangunan antar negara. Badan Pusat Statistik sebagai instansi penyedia data juga selalu mengikuti perkembangan yang ada. Ketika Indeks Kualitas Hidup Fisik (*Phisycal Quality Life Index*) dikembangkan, BPS juga mencoba membuat indeks tersebut berdasarkan data yang ada. Selanjutnya ketika pertama kali Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, BPS juga merespon dengan melakukan studi penyusunan IPM yang disesuaikan dengan ketersediaan data dan kondisi yang sesuai dengan Indonesia. Studi penyusunan IPM pertama kali dilakukan BPS pada tahun 1993 untuk level provinsi. IPM yang dihasilkan kemudian disempurnakan pada 1996 dan selanjutnya digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Dalam perjalanannya penggunaan IPM sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan pembangunan semakin populer dan dikenal oleh sebagian besar kalangan, dan penggunaan IPM sebagai alat ukur kinerja pembangunan sangat dominan. Bahkan IPM tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tetapi juga dimantapkan penggunaannya dengan dimasukkannya IPM sebagai salah satu penentu dalam pengalokasian anggaran perimbangan pusat dan daerah (Dana Alokasi Umum/DAU) sejak tahun 2004. Meskipun IPM telah diakui sebagai alat ukur kinerja yang cukup valid, tetapi bukannya tidak ada kelemahan pada ukuran tersebut. Perubahan yang terjadi pada jangka pendek pada berbagai aspek pembangunan tidak dapat diukur secara sensitif oleh IPM karena aspek pembangunan tersebut tidak terkait secara langsung dengan indikator penyusun IPM. Perbedaan yang sangat kecil dalam salah satu komponen (indikator) pembentuk IPM dampaknya sangat

besar terhadap nilai IPM yang dihasilkan. Untuk komponen tertentu, misalnya angka harapan hidup, tampaknya akan sulit bagi sebuah provinsi mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain dalam jangka waktu yang pendek meskipun perbedaannya hanya 1 tahun, yang menyebabkan provinsi ini akan selalu tertinggal meskipun indikator lain mengalami kemajuan yang pesat, karena perbedaan satu poin (1 tahun) dalam angka harapan hidup akan menghasilkan perbedaan angka IPM yang cukup besar.

Selanjutnya BPS (2009b) juga melakukan kajian untuk menganalisis disparitas tingkat hidup antar provinsi. Kajian tersebut mencoba melihat disparitas tingkat hidup antar provinsi pada tujuh dimensi. Ketujuh dimensi tersebut adalah dimensi kesehatan dan gizi, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, dimensi perumahan dan lingkungan, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan dan dimensi teknologi dan informasi. Meskipun kajian tersebut mampu memotret perbandingan tingkat kesejahteraan antar wilayah, tetapi ketika dihadapkan pada tuntutan akan sebuah ukuran yang mampu mengukur perubahan dan perkembangan antar waktu untuk suatu wilayah tertentu, hasil kajian tersebut secara metodologi tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan.

Dalam usahanya mengembangkan ukuran kinerja pembangunan yang mampu dan sensitif mengukur perubahan dalam berbagai aspek pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, BPS (2009a) dalam kajian awalnya mencoba menyusun Indeks Pembangunan Regional yang didasarkan pada sejumlah besar indikator yang dikelompokkan kedalam 6 modal pembangunan. Penyusunan IPR ini dimaksudkan untuk melengkapi ukuran IPM yang ada. Kelebihan IPR yang sedang dikembangkan tersebut adalah kemampuan mengukur kinerja pembangunan berdasarkan berbagai dimensi. Dengan kata lain, IPR mampu melihat wilayah-wilayah mana yang mengalami kemajuan dalam dimensi tertentu dari pembangunan. Mengacu pada pengertian pembangunan yang merujuk pada suatu proses perubahan seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka metode pengukuran kinerja pembangunan harus mampu mengukur perubahan antar waktu. Seperti halnya kajian Disparitas Tingkat Hidup yang dikembangkan BPS (2009b), IPR kajian awal yang dikembangkan BPS (2009a) juga belum menghasilkan sebuah ukuran pembangunan yang mampu mengukur perubahan antar waktu. Pentingnya menghasilkan sebuah ukuran yang dapat mengukur perubahan antar waktu adalah bahwa kemajuan absolut suatu wilayah dalam bidang pembangunan tertentu dapat dideteksi secara riil.

<https://www.bps.go.id>

3

KERANGKA PENYUSUNAN IPR

3.1. Ukuran Kinerja Pembangunan yang Ideal

Paling tidak ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah ukuran pembangunan memenuhi ukuran yang ideal. Pertama, ukuran tersebut sensitif dalam mengukur perbedaan antar wilayah (*regional variation*). Dari sejumlah indeks komposit yang dibangun secara parsial untuk mengukur pembangunan dari berbagai aspek dalam sejumlah literatur yang ada telah mampu dan sensitif mengukur perbandingan antar wilayah. *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) yang dibangun UNDP, *Social Protection Index* (Indeks Proteksi Sosial) yang dibangun oleh ADB, *Environmental Performance Index* (Indeks Kinerja Lingkungan) yang dibuat oleh Yale University dan Columbia University, *Social Development Index* (Indeks Pembangunan Sosial) yang usulkan oleh Ray (2008) dan *Social Policy Index* (Indeks Kebijakan Sosial) yang diajukan oleh UNRISD adalah hanya beberapa contoh indeks komposit yang mampu mengukur secara sensitif perbandingan kinerja pembangunan

antar wilayah. Sensitivitas indeks komposit di atas dilihat dari kemampuan indeks-indeks komposit tersebut dalam membedakan antara negara maju dan negara berkembang/terbelakang atau antara wilayah yang maju dan wilayah tertinggal.

Kriteria kedua yang juga sangat penting dalam mengukur kinerja pembangunan adalah kemampuan sebuah ukuran dalam mengukur perubahan suatu wilayah antar waktu yang disebabkan bukan oleh perubahan posisi suatu wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya. Dengan kata lain, ukuran tersebut mampu mengukur sejauh mana perkembangan kinerja pembangunan sebuah wilayah antar waktu di wilayah itu sendiri tanpa memerhatikan apa yang terjadi di wilayah lain. Berdasarkan kriteria kedua ini, dari sejumlah indeks yang disebutkan di atas, hanya ada dua indeks yang memenuhi yaitu *Human Development Index*/HDI (Indeks Pembangunan Manusia) dan *Environmental Performance Index*/EPI (Indeks Kinerja Lingkungan). Agar sebuah ukuran (indeks komposit) memenuhi kriteria kedua ini, nilai minimum dan maksimum yang tetap (konstan) harus ditentukan, seperti yang telah dilakukan dalam pembentukan HDI dan EPI. Kriteria kedua ini mensyaratkan adanya indikator yang tersedia secara berkelanjutan agar perubahan antar waktu bisa selalu diukur.

3.2. Evaluasi Kajian Awal: Aspek Metodologi Penyusunan IPR

Evaluasi terhadap kajian awal penyusunan IPR ditekankan pada tiga hal yaitu penggunaan istilah 'modal', identifikasi variabel/indikator, dan metode penyusunan indeks komposit IPR. Ketiga hal tersebut dibahas secara terpisah di bawah ini.

Evaluasi Metode Penghitungan Indeks Komposit IPR Kajian Awal 2009

Seperti telah dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa salah satu kelemahan IPR hasil kajian awal adalah ketidakmampuan mengukur perubahan pembangunan antar waktu di suatu wilayah. Hal ini terkait dengan pemilihan

metodologi dan beberapa aspek terkait lainnya. Meskipun dalam kajian awal penyusunan IPR menghasilkan 6 skenario (alternatif) hasil perhitungan yang didasarkan pada metode yang berbeda, alternatif VI (normalisasi data dengan Z-score, penentuan penimbang dengan PCA, dan *Linear Aggregation* digunakan untuk membentuk indeks komposit IPR) diputuskan sebagai penghitungan IPR terpilih. Pemilihan skenario VI tersebut didasarkan pada kesamaan urutan ranking yang dihasilkan dibandingkan dengan beberapa metode lain.

Salah satu kritik terhadap penggunaan z-score untuk normalisasi data adalah z-scores sangat tergantung pada data statistik amatan, meskipun normalisasi variabel kedalam bentuk z-scores menjadikan data yang bebas satuan. Z-scores pada dasarnya merupakan transformasi relatif dan nilainya berubah setiap saat ketika indeks dihitung kembali dengan data yang diperbaharui karena kemungkinan besar terjadi pergeseran sebaran data dari variabel-variabel tersebut. Jika semua wilayah mengalami kemajuan pada variabel tertentu dengan level yang sama antar dua periode, z-score akan tetap sama meskipun kinerjanya membaik untuk variabel tersebut. Dengan demikian peningkatan kinerja wilayah dalam hal ini tidak akan terdeteksi.

Kritik lain terhadap metode penyusunan IPR pada kajian awal, selain ketidakmampuan dalam mengukur perubahan antar waktu, adalah bahwa metode yang digunakan pada kajian awal tidak menghasilkan IPR yang sensitif dalam mengukur perubahan kesenjangan antar wilayah. Hal ini disebabkan karena nilainya akan selalu bergeser dari waktu ke waktu. Ketiadaan target capaian dalam metode penyusunan IPR menjadikan ukuran yang dihasilkan tidak mampu mendeteksi wilayah-wilayah mana yang sudah mendekati target capaian yang telah ditetapkan. Kelemahan-kelemahan yang ada pada IPR kajian awal tersebut akan diminimalisir dalam publikasi ini.

Evaluasi Indikator-Indikator Pembentuk IPR Kajian Awal

Kajian awal penyusunan IPR pada dasarnya adalah kajian yang cukup komprehensif karena telah mencoba mengukur pembangunan regional berdasarkan sejumlah besar indikator. Akan tetapi, kelemahan mendasar pada kajian awal tersebut adalah tidak memisahkan antara indikator input dan output/outcome, sehingga hasil pengukurannya menjadi kurang valid. Beberapa indikator di beberapa modal (aspek) masih merupakan gabungan antara indikator input dan indikator output/outcome. Misalnya, indikator pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan merupakan indikator input bagi kemajuan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Jumlah fasilitas sekolah dan fasilitas pendidikan yang meningkat jelas dapat mengindikasikan kemajuan pembangunan, tetapi besarnya pengeluaran di sektor tersebut merupakan kebijakan yang diambil pemerintah yang hasilnya belum bisa diketahui kalau tidak ada wujud nyata (baik fisik maupun non fisik) dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya dalam kelompok modal manusia, pemasukan indikator luas wilayah sebagai salah satu variabel untuk mengukur pembangunan jelas kurang tepat. Dalam konteks modal pembangunan, luas wilayah memang merupakan modal penting untuk membangun wilayah. Akan tetapi, ketika bicara konteks pembangunan yang sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik (Anonim 2007), luas wilayah merupakan suatu yang sudah tetap (*given*) dan tidak akan bertambah kecuali terjadi pemekaran atau pemecahan wilayah. Contoh lain adalah indikator kepadatan penduduk. Di satu sisi indikator ini memang dapat digunakan untuk melihat penduduk sebagai modal dalam kaitannya dengan pasar kerja. Jika indikator ini dikaitkan dengan pasar kerja, maka semakin tinggi angka kepadatan penduduk suatu wilayah, semakin baik wilayah tersebut. Di sisi lain, kepadatan penduduk juga dapat menjadi masalah jika angkanya terlalu tinggi. Selain itu, meningkatnya angka kepadatan penduduk juga sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang

tentunya diharapkan angka pertumbuhannya terkendali. Ketika kinerja pembangunan salah satunya diukur dengan angka kepadatan penduduk, maka kemajuan pembangunan menjadi sulit diukur karena tergantung dari sisi mana kita memandang.

Oleh karena itu, ketika kemajuan pembangunan diukur maka beberapa indikator yang ada dalam setiap aspek dalam kajian awal perlu ditinjau kembali relevansinya. Dalam kajian lanjutan ini sejumlah indikator pada kajian awal yang dinilai berdasarkan "*professional judgment*" kurang valid dalam mengukur kemajuan pembangunan akan dikeluarkan dalam kajian lanjutan dan kemungkinan memasukkan indikator baru yang tersedia serta relevan dan mampu mengukur sebuah capaian pembangunan. Satu hal yang perlu dicatat adalah ketika sebuah indikator dapat dinyatakan sebagai output dari sebuah kegiatan pembangunan, maka indikator tersebut layak untuk dimasukkan dalam penyusunan IPR, meskipun indikator tersebut mungkin menjadi indikator input bagi indikator lainnya. Misalnya, meningkatnya jumlah sekolah jelas merupakan dampak dari variabel lain yang terkait. Dengan demikian jumlah sekolah dapat dikatakan sebagai indikator output. Akan tetapi, indikator ini juga dapat menjadi indikator input bagi kemajuan tingkat pendidikan masyarakat.

Pemisahan antara indikator input dan output penting dilakukan untuk menghasilkan sebuah ukuran yang valid dan mudah dipahami ketika capaian kemajuan pembangunan diukur dari waktu ke waktu. Jika kita teliti literatur yang ada tentang indeks komposit, sebagian besar indeks yang dihasilkan menekankan pada aspek kinerja (*performance*). Pemisahan antara indikator input dan output/outcome misalnya dapat dilihat pada proposal yang diajukan oleh UNRISD yang mencoba membentuk indeks komposit yang dikenal dengan *Social Policy Index* (SPI) untuk mengukur kebijakan pembangunan di bidang sosial berdasarkan indikator-indikator kebijakan (*policy indicators*) yang bukan merupakan indikator output atau outcome. Menurut UNRISD, hal ini dilakukan mengingat sebagian besar indeks komposit yang dibentuk untuk mengukur

pembangunan selama ini hanya melihat aspek outcome-nya saja, sementara perhatian terhadap indikator kebijakan masih sangat sedikit. Poin utama yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah bahwa metode pengukuran pembangunan melalui penyusunan indeks komposit dilakukan terpisah antara indikator kinerja (*performance indicators*) dan indikator kebijakan (*policy indicators*) yang juga bisa berupa indikator input.

Aspek Pembangunan Regional: Dari 'Modal' ke 'Dimensi'

BPS (2009) dalam kajian awalnya mencoba mengukur pembangunan regional yang didasarkan pada 6 kelompok modal yaitu modal alami, modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal sosial, dan modal teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya pengukuran pembangunan regional yang dilakukan pada kajian awal tersebut telah mencoba mengukur pembangunan regional dengan melihat berbagai aspek secara komprehensif. Salah satu kritik yang diarahkan pada kajian awal adalah penggunaan istilah modal yang cenderung mengandung makna "apa yang dimiliki" untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna modal yang sering dikaitkan hanya dengan indikator input – meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar – penggunaan istilah modal mungkin sebaiknya diubah dengan istilah lain yaitu 'dimensi' atau 'bidang'. Beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas dan aspek-aspek yang ada dalam kajian awal perlu dipertimbangkan dalam menentukan bidang-bidang pembangunan. Jumlah bidang ini tentunya akan mempengaruhi nilai IPR secara keseluruhan karena terkait dengan agregasi dari sub-indeks untuk setiap bidang. Agregasi berdasarkan 5 aspek akan berbeda hasilnya dengan agregasi berdasarkan 4 aspek pembangunan.

Untuk menentukan nama-nama aspek pembangunan yang dicakup dalam penyusunan IPR dalam kajian lanjutan, beberapa literatur yang terkait dengan pembangunan nasional dapat digunakan sebagai acuan. Berdasarkan

dokumen yang dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disebutkan bahwa pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan mempunyai indikator kinerja yang mencerminkan tiga pilar pembangunan yaitu: (1) ekonomi yang diukur berdasarkan indikator ekonomi makro, (2) sosial yang diukur berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan termasuk masyarakat marginal, dampak terhadap struktur sosial masyarakat dan tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat, dan (3) lingkungan hidup, yang diukur dengan melihat dampak pembangunan terhadap kualitas udara, air dan lahan. Pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah memberikan prioritas di berbagai bidang antara lain: peningkatan investasi, peningkatan ekspor, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pertanian, pengembangan sektor tersier, stabilitas sektor keuangan dan moneter, daya saing ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Prioritas tersebut ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi yang kokoh dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Bambang Widianto, Deputy Menteri urusan Evaluasi Kinerja Pembangunan - Bappenas, dalam sebuah seminar kebijakan bertajuk "*Strengthening Development Planning and Performance Evaluation*/Memperkuat Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja" di Jakarta pada 13 Oktober 2009 menyebutkan aspek-aspek pembangunan yang lebih detil. Menurut Bambang Widianto indikator outcome untuk mengukur pembangunan regional mencakup 5 aspek yaitu (i) pelayanan publik, (ii) kualitas sumber daya, (iii) pembangunan ekonomi, (iv) kualitas lingkungan dan sumber daya alam, dan (v) kesejahteraan sosial. Berdasarkan kelima aspek tersebut, kinerja pembangunan regional dapat diukur dan diamati kemajuannya dari waktu ke waktu jika sejumlah indikator untuk setiap aspek pembangunan tersedia.

Sebagai bagian dari penyempurnaan penyusunan IPR yang lebih menekankan pada indikator output/outcome, istilah “modal” yang digunakan pada IPR Kajian Awal diganti menjadi “dimensi” untuk menghindari adanya salah tafsir. Menurut Prof. Mudradjat Kuncoro penggantian istilah “modal” menjadi “dimensi” lebih tepat. Mengacu pada penyusunan IPR pada kajian awal dan beberapa aspek pembangunan yang telah disebutkan di atas (mengacu pada dokumen Bappenas), ada beberapa dimensi yang akan diukur dalam penyempurnaan penyusunan IPR dalam publikasi ini sesuai dengan ketersediaan data yang ada. Berdasarkan hasil konsultasi dengan beberapa ahli pembangunan, ada beberapa saran dan masukan bagi penyempurnaan penyusunan IPR. Misalnya, Prof. Mudradjat Kuncoro dari Universitas Gadjah Mada memberi masukan agar IPR ini mampu mengukur tingkat stabilitas politik wilayah (dimensi politik), karena informasi tentang stabilitas politik wilayah dapat membantu para pebisnis dan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayahnya. Kondisi wilayah yang aman akan dapat mendukung jalannya roda pemerintahan yang baik dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut akan dapat berkembang dengan baik pula. Prof. Mudradjat juga menyarankan perlunya dimasukkan dimensi infrastruktur dalam penyusunan IPR yang didalamnya mencakup indikator tentang infrastruktur fisik, ekonomi, sosial dan keuangan. Selanjutnya Prof. Elfindri dari Universitas Andalas menyarankan untuk memasukkan dimensi agama dalam penyusunan IPR karena capaian dalam dimensi ini tentu akan terkait dengan capaian pada dimensi lain khususnya ekonomi.

Berdasarkan masukan dari para ahli dan literatur yang ada serta ketersediaan data, diputuskan sebanyak lima dimensi pembangunan yang akan diukur dalam penyusunan IPR ini, sesuai dengan ketersediaan data yang ada. Kelima dimensi pembangunan yang akan diukur tersebut mencakup: Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik, Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Beberapa masukan tentang jenis indikator yang disarankan dari hasil konsultasi dengan para ahli telah dimasukkan pada dimensi pembangunan yang sesuai.

3.3. Aspek Penilaian Pembangunan Regional

Dalam menyusun indeks pembangunan, pemilihan indikator yang representatif dan metodologi penyusunan indeks komposit pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Banyak studi telah dilakukan berkaitan dengan hal tersebut. Dalam kajian ini, penentuan indikator penyusun IPR memfokuskan pada indikator output/outcome yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Setiap indikator terpilih diharapkan dapat dikaitkan dengan target pembangunan yang telah disusun pada tahap perencanaan.

IPR mengukur lima bidang/dimensi pembangunan:

1. Dimensi ekonomi yang mengukur kinerja pada tiga aspek yaitu aspek pendapatan dan urbanisasi, aspek ketenagakerjaan serta aspek kemampuan keuangan daerah, investasi dan struktur ekonomi.
2. Dimensi sosial yang mengukur kinerja pembangunan pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek kependudukan, dan aspek sosial lainnya.
3. Dimensi infrastruktur dan pelayanan publik yang mengukur kinerja pembangunan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik pada tiga aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan dan aspek infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.
4. Dimensi lingkungan yang mengukur kinerja pembangunan dalam bidang kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan dua aspek utama yaitu pencemaran air dan tanah serta pencemaran udara.
5. Dimensi teknologi, informasi dan komunikasi yang mengukur kinerja pembangunan pada aspek teknologi, aspek informasi dan aspek

komunikasi. Dimensi ini secara langsung juga mengukur penguasaan teknologi informasi khususnya internet.

Untuk mengukur kinerja pembangunan pada lima dimensi pembangunan tersebut, selanjutnya dipilih sejumlah indikator yang diyakini mewakili masing-masing aspek pembangunan dalam setiap dimensi pembangunan. Dari sejumlah indikator terpilih tersebut dibentuk indeks pembangunan pada setiap dimensi dan selanjutnya diagregasikan menjadi Indeks Pembangunan Regional (IPR). Secara detil berbagai aspek terkait metodologi penyusunan IPR dijelaskan pada sub bahasan terpisah.

3.4. Pemilihan Indikator

Berkaitan dengan pemilihan indikator, fokus perhatian pertama adalah mengevaluasi kualitas dari setiap indikator tentang kontribusinya terhadap seluruh gambaran tentang pembangunan regional. Sebuah indikator akan bernilai manakala indikator tersebut memenuhi beberapa kriteria tertentu. Mengevaluasi sejumlah indikator yang ada yang jumlahnya tentu bisa sangat banyak berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan merupakan proses penyaringan (*filtering process*) yang penting dalam menentukan jumlah indikator yang benar-benar berkualitas yang dapat memenuhi persyaratan bagi pengukuran pembangunan regional. Mengevaluasi sebuah indikator berdasarkan beberapa kriteria yang ada dapat dilakukan dengan dasar "Ya/Tidak" atau dengan penskalaan tingkat kriteria pemenuhan.

Daftar di bawah ini merupakan sejumlah kriteria yang mungkin dapat digunakan dalam memilih sebuah indikator:

- *Validity*: Apakah sebuah indikator secara logika mampu mengukur yang "diinginkan"?
- *Relevance*: Apakah sebuah indikator relevan dan bernilai bagi pengukuran pembangunan?

- *Predictive*: Apakah sebuah indikator mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) tentang masalah yang berbahaya?
- *Goal driven*: Apakah sebuah indikator benar-benar mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan?
- *Coverage*: Apakah sebuah indikator berkaitan dengan isu secara luas atau hanya sebagian kecil wilayah?
- *Understandable*: Apakah arti dan makna dari sebuah indikator dapat dipahami oleh masyarakat di seluruh wilayah?
- *Measurable*: Apakah sebuah indikator dapat diukur dan diperoleh secara mudah?
- *Reliability*: Apakah sebuah indikator reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur pembangunan?
- *Accessibility/Availability*: Apakah informasi tentang indikator yang diperlukan tersedia?
- *Timely*: Apakah sebuah indikator dapat memberikan umpan balik secara tepat waktu bagi pengambil keputusan?
- *Responsive*: Apakah perubahan tentang apa yang diteliti dapat didekteksi dalam pengukuran?

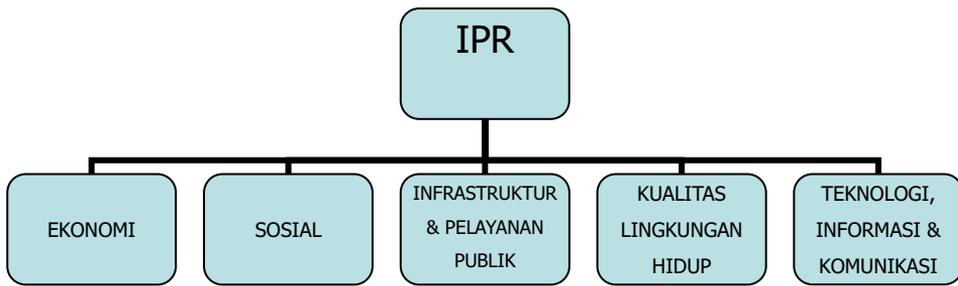
Dari sejumlah kriteria tersebut, kiranya ada beberapa kriteria yang dapat dipilih terkait dengan evaluasi dan penilaian pencapaian pembangunan. Beberapa kriteria yang penting dari sebuah indikator untuk terpilih dalam rangka evaluasi dan penilaian pembangunan yang perlu dipertimbangkan adalah (i) *validity*, (ii) *relevance*, (iii) *coverage*, (iv) *goal driven*, (v) *measurable*, (vi) *reliability/accuracy*, dan (vii) *accessibility*. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah indikator yang telah digunakan dalam kajian awal penyusunan Indeks Pembangunan Regional 2009 diteliti kembali apakah beberapa kriteria tersebut terpenuhi. Selain itu, indikator baru yang memenuhi sejumlah kriteria tersebut juga akan dimasukkan dalam penyusunan IPR. Pada kajian lanjutan ini kriteria *goal driven* menjadi sangat penting mengingat sejumlah indikator pada kajian

awal tidak memenuhi kriteria ini. Kriteria *goal driven* penting untuk menjadi pertimbangan karena indikator terpilih berdasarkan kriteria ini berorientasi pada kinerja (*performance oriented*). Dengan memasukkan kriteria tersebut, kajian lanjutan ini diharapkan mampu menghasilkan ukuran pembangunan yang lebih valid dalam memonitor perkembangan hasil pembangunan.

Terkait dengan pemilihan indikator untuk setiap dimensi, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, perlunya mengurangi terjadinya *overlapping* antara indikator yang satu dengan yang lainnya dalam setiap dimensi yang diukur, sesuai masukan dari para ahli berdasarkan hasil konsultasi. Kedua, sejumlah indikator dalam setiap dimensi yang tidak mungkin dimasukkan dalam penyusunan IPR karena masalah ketersediaan data dalam publikasi ini akan didekati dengan indikator yang bisa mengukur hal yang sama atau proxy indikator. Ketiga, sejumlah indikator yang disarankan oleh para ahli karena masalah ketersediaan data pada level provinsi (tidak tersedia di semua provinsi) dan tidak dapat didekati dengan indikator lain, meskipun indikator tersebut sangat penting, tidak akan dimasukkan dalam penyempurnaan penyusunan IPR. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, dipilih sebanyak 52 indikator yang dapat digunakan dalam penyusunan IPR. Sejumlah indikator terpilih tersebut mewakili aspek-aspek pembangunan dalam setiap dimensi pembangunan.

3.5. Kerangka Pembentukan IPR

Berdasarkan aspek penilaian pembangunan regional yang dikelompokkan berdasarkan dimensi, maka kiranya perlu membuat struktur masing-masing dimensi dan subdimensi beserta indikator yang dipilih pada masing-masing kelompok dimensi dan subdimensi tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa IPR mengelompokkan indikator ke dalam 5 kelompok dimensi, yaitu: [1] Ekonomi; [2] Sosial; [3] Infrastruktur dan Pelayanan Publik; [4] Lingkungan Hidup; dan [5] Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Masing-masing kelompok dimensi kemudian di bagi kedalam beberapa subkelompok dimensi.

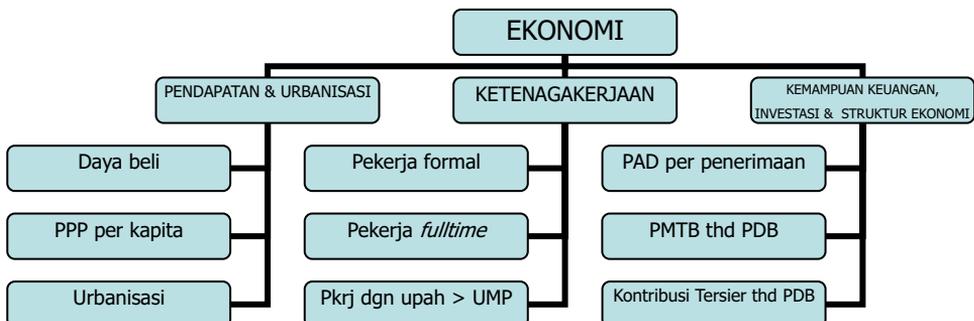


Gambar 3.1. Pohon IPR

Berikut ini coba dijelaskan definisi dari kelompok dimensi, penjabarannya menjadi sub kelompok dimensi, sumber data dan satuan serta signifikansinya sebagai indikator pengukur.

Dimensi Ekonomi

Kinerja pembangunan harus mampu memacu perekonomian suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pembangunan mampu meningkatkan pendapatan wilayahnya maupun pendapatan rata-rata penduduknya, bagaimana pembangunan mampu merubah gaya hidup penduduk ke arah modernisasi dan menciptakan industrialisasi, dan bagaimana pembangunan mampu menekan pengangguran. Dalam penyusunan IPR, dimensi ekonomi dibagi menjadi 3 sub dimensi, yaitu: pendapatan dan urbanisasi, ketenagakerjaan, serta kemampuan keuangan daerah, investasi dan struktur ekonomi.



Gambar 3.2. Pohon Dimensi Ekonomi

Tabel 3.1. Rincian Indikator Kelompok Dimensi Ekonomi dan Signifikansi Penggunaannya

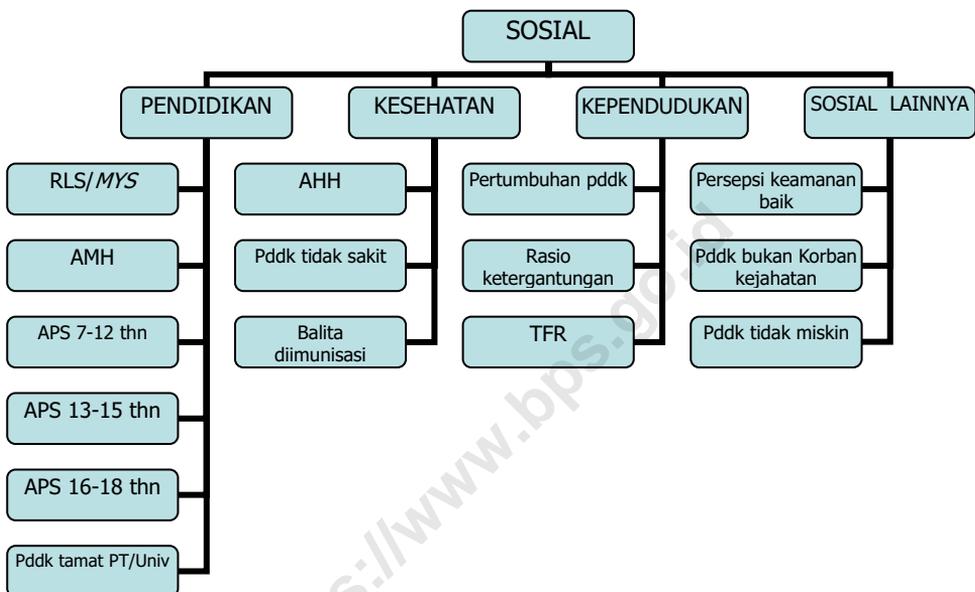
Pendapatan dan Urbanisasi	<p>Daya beli (PPP) Satuan: Ribu rupiah Sumber: Publikasi IPM-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana program pemerintah mampu menstimulasi perekonomian sehingga mampu mendorong daya beli masyarakat yang menunjukkan kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa</p>
	<p>PDRB per kapita (PPP) Satuan: Ribu rupiah Sumber: Publikasi Pendapatan Nasional, Statistik Indonesia-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah mampu mendorong output (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh penduduk domestiknya</p>
	<p>Tingkat urbanisasi (penduduk perkotaan) Satuan: % Sumber: Hasil olah data Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi dan infrastruktur mampu mendorong terciptanya penduduk yang lebih maju/modern</p>
Ketenagakerjaan	<p>Pekerja di sektor formal Satuan: % Sumber: Diolah dari Sakernas-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja terutama pada sektor formal</p>
	<p>Penduduk yang bekerja <i>fulltime</i>/purna waktu (> 35 jam per minggu) Satuan: % Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan tenaga kerja yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara <i>fulltime</i></p>

	Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi Satuan: % Sumber: Diolah dari Sakernas-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan kesejahteraan bagi para buruh/karyawan melalui peningkatan pendapatannya
Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah terhadap Total penerimaan Daerah Satuan: persen Sumber: DJPK	Indikator ini untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran pembangunan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat
	Kontribusi PMTB terhadap PDRB Satuan: persen Sumber: Pendapatan Nasional Per Provinsi-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi mampu merangsang para investor untuk berinvestasi dan membangun perekonomian global
	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB Satuan: persen Sumber: Pendapatan Nasional Per Provinsi-BPS	Indikator ini untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah dimana semakin maju suatu wilayah secara teori akan semakin besar kontribusi sektor tersiernya terhadap perekonomian

Dimensi Sosial

Hal yang utama berkaitan dengan hakikat pembangunan adalah mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya, melalui peningkatan partisipasi dalam bidang pendidikan dan kemampuan membaca sebagai dasar dari pengetahuan. Selain itu pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya, dan mampu menekan pertumbuhan penduduk agar strukturnya menjadi stabil, dan pada akhirnya pembangunan

harus mampu menekan kemiskinan. Oleh sebab itu, dimensi sosial menjadi aspek tersendiri dalam mengukur kinerja pembangunan. Dalam penyusunan IPR ini, dimensi sosial diwujudkan dalam 4 kelompok sub dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sosial lainnya.



Gambar 3.3. Pohon Dimensi Sosial

Tabel 3.2. Rincian Indikator Kelompok Dimensi Sosial dan Signifikansi Penggunaannya

Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah (<i>MYS</i>) Satuan : tahun Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk melihat bagaimana tingkat pendidikan penduduk sebagai output dari pembangunan di bidang pendidikan
	Angka Melek Huruf (AMH 15+) Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk melihat bagaimana penduduk usia 15 keatas mampu mengakses berbagai macam pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya

	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS 7-12) Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana partisipasi penduduk usia SD dalam pendidikan sebagai dampak dari berbagai kebijakan di bidang pendidikan, termasuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan distribusi sumber daya pengajar yang merata</p>
	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS 13-15) Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana partisipasi penduduk usia SMP dalam pendidikan sebagai dampak dari berbagai kebijakan di bidang pendidikan, termasuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan distribusi sumber daya pengajar yang merata</p>
	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS 16-18) Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana partisipasi penduduk usia SMA dalam pendidikan sebagai dampak dari berbagai kebijakan di bidang pendidikan, termasuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan distribusi sumber daya pengajar yang merata</p>
	<p>Penduduk usia 24+ th yang menamatkan perguruan tinggi Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat tingkat pendidikan penduduk dalam tingkatan lebih tinggi (universitas) sebagai dampak dari perkembangan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan</p>
Kesehatan	<p>Angka Harapan Hidup Satuan : persen Sumber: Proyeksi hasil SUPAS-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana taraf kesehatan masyarakat secara makro dilihat dari faktor internal (masyarakat) maupun eksternal (sarana kesehatan)</p>

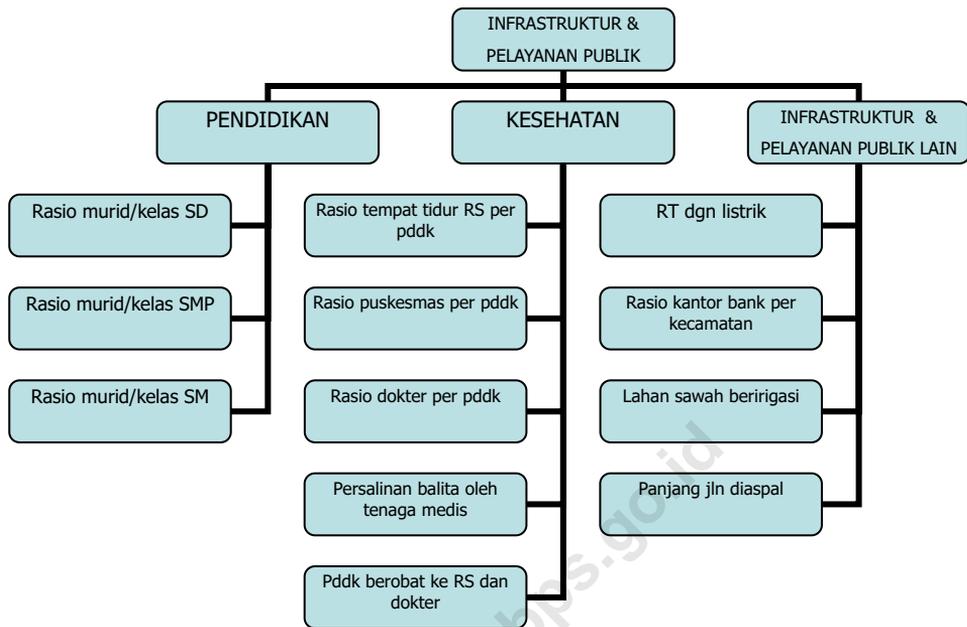
	<p>100-Angka Kesakitan (Morbiditas) Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana kualitas kesehatan penduduk, ditunjukkan dari besarnya penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatannya. Hal ini sebagai dampak dari program peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat</p>
	<p>Balita yang di imunisasi Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana pemerintah peduli pada pelayanan kesehatan terutama bagi balita untuk menjaga kekebalan tubuhnya, mengingat sasaran utama program kesehatan adalah balita (untuk mengendalikan angka kematian bayi dan balita)</p>
Kependudukan	<p>Pertumbuhan penduduk Satuan : persen Sumber: Proyeksi hasil SUPAS-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana kepedulian pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk</p>
	<p>Rasio ketergantungan satuan : persen sumber: BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana tingkat atau beban ketergantungan dari penduduk usia tidak produktif mempengaruhi pembangunan</p>
	<p>TFR Satuan : - Sumber: Proyeksi hasil SUPAS-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk melihat bagaimana upaya pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk</p>
Sosial Lainnya	<p>Persentase rumah tangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik Satuan: persen Sumber: Diolah dari Susenas MSBP-BPS</p>	<p>Indikator ini untuk menunjukkan kepercayaan pada pengelolaan tingkat keamanan dan ketertiban lingkungan yang diupayakan oleh pemerintah</p>

	Penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan ketertiban dan keamanan
	Penduduk tidak miskin Satuan : persen Sumber: Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan-BPS	Indikator ini untuk melihat bagaimana pembangunan mampu menekan jumlah penduduk miskin, yang merupakan cermin utama kesejahteraan penduduk

Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Berbicara wujud pembangunan, hal yang paling dapat dilihat langsung adalah perkembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Sarana pendidikan dan kesehatan tentunya merupakan hal yang utama, mengingat hal tersebut berkaitan dengan pembangunan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Sarana lain yang vital bagi penduduk juga merupakan hal yang penting guna mendukung aktivitas penduduk.

Infrastruktur yang mendukung mobilitas penduduk adalah transportasi, dimana jalan menjadi sesuatu yang utama sebagai infrastruktur lalu lintas, demikian pula sarana lalu lintas keuangan yang mampu mengakomodir kebutuhan transaksi masyarakat. Listrik juga merupakan hal yang utama, tidak hanya berguna untuk penerangan saja, namun berguna untuk segala aktivitas penduduk. Selain itu, sarana pertanian yang mendukung proses produksi tanaman pangan juga sangat diperlukan. Oleh sebab itu, dimensi infrastruktur dan pelayanan publik menjadi aspek tersendiri dalam penghitungan IPR. Dimensi infrastruktur dan pelayanan publik diwujudkan dalam 3 kelompok sub dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Berikut rincian indikator yang terdapat dalam setiap sub dimensi.



Gambar 3.4. Pohon Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Tabel 3.3. Rincian Indikator Kelompok Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik dan Signifikansi Penggunaannya

Pendidikan	Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD Satuan : murid/kelas Sumber: Data SD dari Kemendiknas dan data MI dari Kemenag	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pendidikan yang memadai dalam proses belajar-mengajar di tingkat SD/MI sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan penyerapan materi pembelajaran secara optimal
	Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP Satuan : murid/kelas Sumber: Data SMP dari Kemendiknas dan data MTs dari Kemenag	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pendidikan yang memadai dalam proses belajar-mengajar di tingkat SMP/MTs sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan penyerapan materi pembelajaran secara optimal

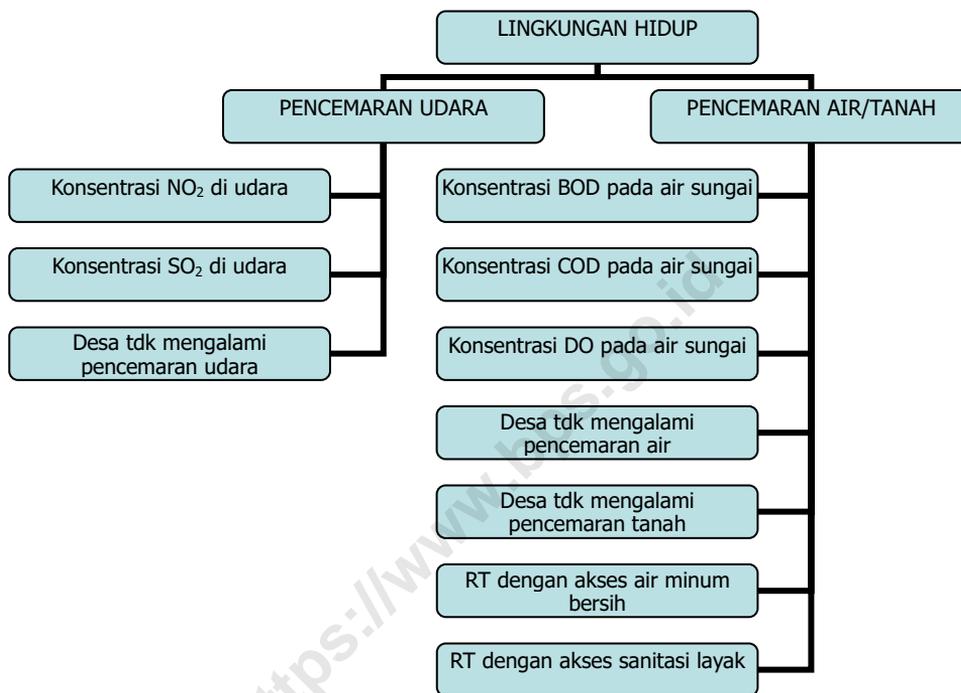
	Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA Satuan : murid/kelas Sumber: Data SMA dan SMK dari Kemendiknas dan data MA dari Kemenag	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pendidikan yang memadai dalam proses belajar-mengajar di tingkat SMA/SMK/MA sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan penyerapan materi pembelajaran secara optimal
Kesehatan	Rasio tempat tidur Rumahsakit terhadap penduduk Satuan :Unit/100.000 pddk Sumber: Diolah dari data jumlah tempat tidur RS-Kemenkes dan jumlah penduduk-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana kesehatan untuk rawat jalan yang memadai sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan penduduk
	Rasio puskesmas terhadap penduduk Satuan : Unit/100.000 Sumber: Diolah dari data jumlah puskesmas -Kemenkes dan jumlah penduduk-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan yang memadai sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan penduduk
	Rasio dokter terhadap penduduk Satuan :Orang /100.000 pddk Sumber: Diolah dari hasil PODES-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya
	Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan tenaga medis yang mampu diakses oleh masyarakat luas sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi
	Penduduk yg berobat ke RS dan Dokter Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk

Infrastruktur/ Pelayanan Publik Lainnya	Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana penerangan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penduduk terhadap media dan membantu penduduk melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah
	Rasio kantor bank per kecamatan Satuan : unit/kecamatan Sumber: Diolah dari data jumlah Bank-BI dan jumlah kecamatan-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana lalu lintas keuangan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi penduduk
	Luas lahan sawah beririgasi Satuan : persen Sumber: Statistik Tanaman Pangan-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pertanian guna membantu proses produksi pertanian tanaman pangan sebagai komoditas konsumsi utama penduduk
	Panjang jalan diaspal Satuan : persen Sumber: Statistik Perhubungan-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana lalu lintas penduduk sebagai upaya untuk meningkatkan mobilitas

Dimensi Lingkungan Hidup

Suatu pembangunan, agar dapat berkelanjutan, memiliki suatu persyaratan minimum yaitu bahwa sediaan kapital alami (*natural capital stock*) harus dipertahankan sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak menurun dalam suatu rentang waktu. Dengan kata lain, bahwa pembangunan yang terus menerus dilakukan tidak boleh menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam karena semuanya akan diwariskan pada generasi selanjutnya. Penurunan kualitas sumber daya alam bisa disebabkan oleh adanya pencemaran. Tidak hanya dapat merusak lingkungan, dampak akhirnya adalah mengakibatkan kerugian besar bagi umat manusia itu sendiri sebagai penikmat pembangunan.

Oleh sebab itu, dimensi lingkungan dijadikan sebagai aspek tersendiri dalam penghitungan IPR, dimana dimensi ini mencakup 2 subdimensi, yaitu pencemaran air dan tanah serta pencemaran udara.



Gambar 3.5. Pohon Dimensi Lingkungan Hidup

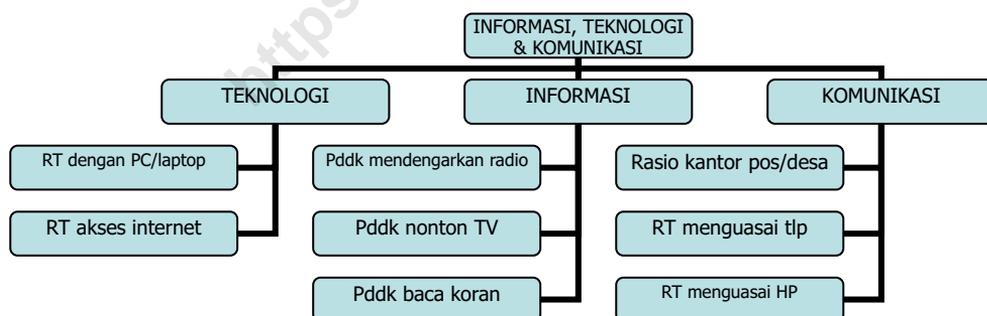
Tabel 3.4. Rincian Indikator Kelompok Dimensi Lingkungan Hidup dan Signifikansi Penggunaannya

Pencemaran Udara	Konsentrasi NO ₂ di udara Satuan : ug/m ³ Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator ini untuk melihat besarnya gangguan pencemaran akibat emisi NO ₂ di udara
	Konsentrasi SO ₂ di udara Satuan : ug/m ³ Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator ini untuk melihat besarnya gangguan pencemaran akibat emisi SO ₂ di udara

	Desa tidak mengalami pencemaran udara Satuan : persen Sumber: PODES-BPS	Indikator ini untuk melihat bagaimana usaha pengelolaan lingkungan dalam hal terjadinya pencemaran udara
Pencemaran Air/Tanah	Konsentrasi BOD pada air sungai Satuan : mg/L Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator ini untuk melihat besarnya gangguan pencemaran akibat terlarutnya BOD di air sungai yang tidak hanya membahayakan biota di dalamnya tetapi juga berbahaya bagi manusia
	Konsentrasi COD pada air sungai Satuan : mg/L Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator ini untuk melihat besarnya gangguan pencemaran akibat terlarutnya COD di air sungai yang tidak hanya membahayakan biota di dalamnya tetapi juga berbahaya bagi manusia
	Konsentrasi DO pada air sungai Satuan : mg/L Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator ini menunjukkan kandungan DO di air sungai yang menunjukkan semakin tinggi semakin baik kualitas air sungai tersebut
	Desa tidak mengalami pencemaran air Satuan : persen Sumber: PODES-BPS	Indikator ini untuk melihat bagaimana usaha pengelolaan lingkungan dalam hal terjadinya pencemaran air
	Desa tidak mengalami pencemaran tanah Satuan : persen Sumber: PODES-BPS	Indikator ini untuk melihat bagaimana usaha pengelolaan lingkungan dalam hal terjadinya pencemaran tanah
	Rumahtangga yang mengakses sumber minum air bersih Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk melihat akses masyarakat terhadap air minum kemasan, ledeng, dan sumur/mata air terlindung dengan jarak terhadap pembuangan > 10 m
	Rumahtangga dengan sanitasi layak Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk melihat akses rumahtangga dalam menggunakan jamban pribadi yang dilengkapi dengan tangki septik

Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari betapa pentingnya komunikasi, karena dengan komunikasi setiap manusia dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, komunikasi tidaklah hanya sebatas antar individu yang berkomunikasi secara langsung tetapi harus ada perkembangan teknologi untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Untuk itulah dibutuhkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menunjang segala aspek dalam komunikasi tersebut. Beberapa unsur TIK yang dapat memfasilitasi antara lain adalah suatu perangkat keras atau biasa juga disebut dengan *hardware*, perangkat lunak atau *software*, sampai kepada komunitas yang menjalankan perangkat TIK tersebut atau *brainware*. TIK sangat penting di era ini, mengingat hal tersebut menjadi hal yang dominan terkait dengan intelektualitas dan ketersediaan SDM yang berkualitas. TIK memberikan banyak kesempatan bagi wilayah untuk dapat menarik manfaat secara maksimal karena TIK merupakan pintu gerbang untuk mengakses berbagai pengetahuan dan informasi.



Gambar 3.6. Pohon Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Tabel 3.5. Rincian Indikator Kelompok Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Signifikansi Penggunaannya

Teknologi	Rumah tangga menguasai PC/laptop/notebook Satuan: persen Sumber: Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan ruta dengan penguasaan teknologi dasar
	Rumah tangga dengan minimal 1 art mengakses internet Satuan: persen Sumber: Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan ruta dengan penguasaan teknologi tak terbatas
Informasi	Penduduk 10+ tahun yang mendengarkan siaran radio Satuan: persen Sumber: Susenas MSBP-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan akses informasi penduduk dari radio
	Penduduk 10+ tahun yang menonton siaran televisi Satuan: persen Sumber: Susenas MSBP-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan akses informasi penduduk dari televisi
	Penduduk 10+ tahun yang membaca surat kabar Satuan: persen Sumber: Susenas MSBP-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan akses informasi penduduk dari surat kabar
Komunikasi	Rasio kantor pos/desa Satuan: unit/10 desa Sumber: Data kantor Pos diolah dari daftar kantor pos per wilayah diperoleh dari PT.POS, sedangkan data jumlah desa diperoleh dari BPS	Indikator ini untuk menunjukkan pelayanan sarana komunikasi yang tersedia bagi masyarakat

	Rumah tangga menguasai telepon rumah Satuan: persen Sumber: Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penguasaan sarana komunikasi tetap
	Rumah tangga menguasai HP Satuan: persen Sumber: Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penguasaan sarana komunikasi <i>mobile</i>

Secara lengkap pengelompokan indikator dalam subdimensi maupun dimensi pembangunan dapat terlihat di Gambar 3.7 berikut.

Gambar 3.7. Pengelompokan Indikator Penyusun IPR

INDIKATOR	SUB DIMENSI	DIMENSI		
Daya beli (PPP) PDRB per kapita (PPP) Tingkat urbanisasi [Persentase Penduduk Perkotaan]	Pendapatan dan Urbanisasi	Ekonomi		
Pekerja di sektor formal (%) Penduduk yang bekerja fulltime/purna waktu (%) [100-setengah penganggur] Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi (%)	Ketenagakerjaan			
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%) Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB (%)	Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi			
Rata-rata lama sekolah (tahun) Angka melek huruf (%) APS 7-12 tahun (%) APS 13-15 tahun (%) APS 16-18 tahun (%) Penduduk usia 24+ yang menamatkan perguruan tinggi (%)	Pendidikan		Sosial	
Angka harapan hidup (tahun) Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan (%) Balita mendapat imunisasi (%) [Rata-rata BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis]	Kesehatan			
1/Pertumbuhan penduduk 1/Rasio Ketergantungan 1/Fertilitas (TFR)	Kependudukan			
Rumah tangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik (%) Penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan (%) Penduduk tidak miskin (%)	Sosial Lainnya			
Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD Rasio murid SLTP/Sederajat terhadap kelas SLTP Rasio murid SLTA/Sederajat terhadap kelas SLTA	Pendidikan			Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Rasio empat tidur Rumahsakit thd 100000 penduduk Rasio puskesmas terhadap 100000 penduduk Rasio dokter thd 100000 penduduk Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (%) Penduduk yang berobat ke tenaga medis/fasilitas kesehatan (%)	Kesehatan			
Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%) Rasio kantor bank per kecamatan Luas lahan sawah beririgasi (%) Panjang jalan diaspal (%)	Infrastruktur/Pelayanan Publik Lainnya			
Konsentrasi BOD (Biochemical Oxygen Demand) pada air sungai Konsentrasi COD (Chemical Oxygen Demand) pada air sungai Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) pada air sungai Desa tidak mengalami pencemaran air (%) Desa tidak mengalami pencemaran tanah (%) Rumah tangga dengan akses air minum bersih (%) Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	Pencemaran air/tanah	Lingkungan Hidup		
Konsentrasi NO ₂ di udara Konsentrasi SO ₂ di udara Desa tidak mengalami pencemaran udara (%)	Pencemaran udara			
Rumah tangga menguasai PC/laptop/notebook (%) Rumah tangga dengan paling tidak 1 art mengakses internet (%)	Teknologi	Teknologi, Informasi dan Komunikasi		
Penduduk mendengarkan siaran radio (%) Penduduk menonton siaran TV (%) Penduduk membaca surat kabar (%)	Informasi			
Rumah tangga menguasai telepon rumah (%) Rumah tangga menguasai HP (%) Rasio jumlah kantor pos terhadap 10 desa	Komunikasi			

INDIKATOR PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR)

3.6. Penentuan Target Capaian Setiap Indikator

Salah satu tantangan dalam penyempurnaan penyusunan IPR kajian lanjutan ini adalah menentukan angka target capaian untuk setiap indikator terpilih. Penentuan target capaian sangat penting dalam penyempurnaan penyusunan IPR karena target capaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan IPR yang dapat mengukur perubahan kinerja pembangunan suatu wilayah antar waktu. Kendala utama dalam penentuan target capaian pada beberapa indikator adalah tidak adanya referensi yang jelas mengenai nilai ideal yang harus dicapai. Misalnya untuk indikator pertumbuhan ekonomi, berapa angka pertumbuhan ekonomi yang dianggap ideal sebagai target capaian sulit ditetapkan mengingat tidak adanya referensi yang menyatakan secara tegas.

Meskipun demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam penentuan target capaian untuk sejumlah indikator yang tidak memiliki acuan yang jelas akan diambil beberapa pendekatan dalam kajian lanjutan ini. Pertama, nilai maksimum (jika arahnya positif atau semakin tinggi semakin baik) atau minimum (jika arahnya negatif atau semakin rendah semakin baik) atau nilai rata-rata dari semua provinsi yang ada pada periode tertentu dapat dipakai sebagai acuan. Kedua, nilai target capaian ideal dapat diambil berdasarkan capaian negara tertentu untuk indikator-indikator yang relevan yang dapat dibandingkan antar negara. Cara ini telah diadopsi oleh UNDP ketika menyusun IPM. Ketiga, penentuan target capaian didasarkan pada target capaian yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah atau badan dunia (misal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau MDGs). Keempat, target capaian ideal dapat ditentukan secara subyektif berdasarkan masukan para ahli berdasarkan pengalaman mereka di bidangnya.

4

METODOLOGI PENYUSUNAN IPR

4.1. Sumber Data

IPR kajian lanjutan memuat data yang diperoleh dari BPS baik hasil sensus maupun survei, sedangkan data lain diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, PT POS Indonesia dan Bank Indonesia. Data-data yang dikumpulkan dari BPS merupakan data hasil pengolahan maupun dikutip dari berbagai publikasi. Demikian halnya dengan data yang diperoleh dari instansi lain dikutip dari berbagai publikasi, baik elektronik maupun cetak.

4.2. Transformasi Indikator

Setelah data indikator dikumpulkan, maka perlu dilakukan transformasi, karena satuan data berbeda-beda. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah metode Maksimum-Minimum (Max-Min). Metode ini digunakan dalam kondisi yang sama dengan standarisasi atau metode normalisasi lainnya yaitu jika data set memiliki ukuran yang berbeda. Dalam metode ini, seluruh data

dinormalisasi sehingga semua indikator dasar ditransformasi ke dalam sistem skor 0 – 100 sebelum dilakukan agregasi. Skor 0 dan 100 menunjukkan posisi provinsi pada tingkat pembangunan (*level of development*) terendah dan tertinggi di antara 33 provinsi. Adapun model matematis metode Max-Min sebagai berikut :

$$I_{in} = \frac{X_{ni} - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

dimana:

X_{\min} = nilai capaian/target minimum

X_{\max} = nilai capaian/target maksimum

Untuk keseragaman data, semua data yang memiliki hubungan negatif dengan pembangunan, dikonversi ke arah positif. Contohnya angka morbiditas yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggu aktivitasnya dikonversi menjadi banyaknya penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggu aktivitasnya. Demikian juga dengan Angka Beban Ketergantungan yang menunjukkan banyaknya penduduk berusia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif, dikonversi ke arah positif menjadi banyaknya penduduk berusia produktif yang mampu menanggung 100 penduduk usia tidak produktif. Indikator lain yang dikonversi adalah: Total Fertility Rate, angka pertumbuhan penduduk, dan rasio murid-kelas.

4.3. Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Indikator

Metode Max-Min yang digunakan dalam penghitungan IPR kajian lanjutan ini menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum yang bersifat fixed/tetap, sehingga dapat dibandingkan antar waktu. Nilai minimum dapat berarti sebagai nilai yang paling rendah atau capaian yang minimum, sedangkan nilai maksimum dapat berarti sebagai nilai yang ingin dicapai atau nilai tertinggi yang pernah diperoleh. Penentuan nilai maksimum dan minimum ini berlaku untuk setiap indikator. Penentuan nilai minimum dan maksimum (nilai capaian) dari setiap indikator didasarkan pada prinsip-prinsip yang dibangun oleh UNDP. Dalam penyusunan IPR ini, penentuan nilai minimum-maksimum (target) dari setiap indikator mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Nilai maksimum-minimum yang mungkin yang dapat terjadi pada indikator terpilih
- ✓ Nilai rata-rata ideal secara nasional dari indikator terpilih
- ✓ Target pembangunan yang ditentukan pemerintah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang
- ✓ Nilai tertinggi atau terendah (nilai ideal) yang pernah dicapai oleh suatu negara dalam indikator terpilih
- ✓ Analisis pakar terhadap nilai ideal suatu indikator
- ✓ Mengacu pada referensi yang ada tentang nilai minimum-maksimum (ideal) yang telah digunakan dalam pengukuran.

Dengan mengacu pada beberapa ketentuan tersebut, nilai minimum-maksimum (nilai capaian ideal) dari setiap indikator untuk IPR kajian lanjutan ini ditentukan, dan nilainya seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Nilai Maksimum-Minimum/Capaian Indikator IPR

Indikator	Minimum/Nilai capaian	Maksimum/Nilai capaian	Keterangan/Referensi
DIMENSI EKONOMI			
Daya beli (rupiah)	360 000	732 720	Publikasi IPM
PDRB per kapita (rupiah)	1 320 000	160 000 000	Visi Indonesia 2030
Tingkat urbanisasi [Persentase Penduduk Perkotaan]	0	100	
Pekerja di sektor non pertanian (%)	0	100	
Penduduk yang bekerja fulltime/purna waktu (%)	0	100	
Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi (%)	0	100	
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	0	100	
Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	0	40	Nilai yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 7% (Analisis Pakar)
Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB (%)	0	80	Mengacu pada negara maju
DIMENSI SOSIAL			
Rata-rata lama sekolah (tahun)	0	15	Publikasi IPM
Angka melek huruf (%)	0	100	
APS 7-12 tahun (%)	0	100	
APS 13-15 tahun (%)	0	100	
APS 16-18 tahun (%)	0	100	
Penduduk usia 24+ yang menamatkan perguruan tinggi (%)	0	42	Mengacu pada negara maju
Angka harapan hidup (tahun)	25	86	Publikasi IPM
Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan (%)	0	100	
Balita mendapat imunisasi (%) [Rata-rata BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis]	0	100	
Pertumbuhan penduduk (%)	1,1	6	Minimum mengacu target pemerintah, maksimum mengacu negara di Afrika

Rasio Ketergantungan	45	98	Minimum mengacu pada negara Jerman, Maksimum mengacu pada angka yg pernah dicapai salah satu negara Arab
Fertilitas (TFR)	2,1	7,5	Maksimum mengacu pada salah satu negara Afrika, minimum mengacu target pemerintah
Rumahtangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik (%)	0	100	
Penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan (%)	0	100	
Penduduk tidak miskin (%)	0	93	Target pemerintah dalam MDGs
DIMENSI INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK			
Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD	28	50	Mendiknas
Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP	28	50	Mendiknas
Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA	32	50	Mendiknas
Rasio tempat tidur Rumahsakit thd 100000 penduduk	0	75	Rasio ideal (Indikator pemanfaatan Fasilitas RS)
Rasio puskesmas terhadap 100000 penduduk	0	35	Maksimum mengacu pada perkiraan ideal 1 desa 1 puskesmas
Rasio dokter thd 100000 penduduk	10	60	Maksimum mengacu pada sasaran Indonesia Sehat 2010
Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (%)	0	100	
Penduduk yang berobat ke tenaga medis/fasilitas kesehatan (%)	0	100	
Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	0	100	
Rasio kantor bank per kecamatan	0	3	Rata-rata jumlah bank per kecamatan
Luas lahan sawah beririgasi (%)	0	100	

Panjang jalan yang diaspal (%)	0	100	
DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP			
Konsentrasi BOD (Biochemical Oxygen Demand) pada air sungai (mg/L)	-	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Konsentrasi COD (Chemical Oxygen Demand) pada air sungai (mg/L)	-	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) pada air sungai (mg/L)	6	--	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Desa tidak mengalami pencemaran air (%)	0	100	
Desa tidak mengalami pencemaran tanah (%)	0	100	
Konsentrasi NO ₂ di udara (ug/M3)	--	100	
Konsentrasi SO ₂ di udara (ug/M3)	--	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Desa tidak mengalami pencemaran udara (%)	0	100	
DIMENSI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
Rumahtangga menguasai PC/laptop/notebook (%)	0	100	
Rumahtangga dengan paling tidak 1 art mengakses internet (%)	0	100	
Penduduk mendengarkan siaran radio (%)	0	100	
Penduduk menonton siaran TV (%)	0	100	
Penduduk membaca surat kabar (%)	0	100	
Rumahtangga menguasai telepon rumah (%)	0	100	
Rumahtangga menguasai HP (%)	0	100	
Rasio jumlah kantor pos terhadap 10 desa	0	1	Asumsi 1 kec 1 kantor pos (rata-rata 1 kec ada sekitar 10 desa)

Khusus pada dimensi lingkungan, untuk beberapa indikator pencemaran udara (NO₂, SO₂) dan pencemaran air (BOD, COD, DO), transformasi nilai ke dalam skala 0-100 mengikuti metode yang digunakan dalam publikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dihasilkan oleh Direktorat Ketahanan Sosial, BPS, dengan formula:

$100 - [(X - S)/S] \times 100$], untuk NO_2 , SO_2 , BOD, COD

$100 - [(S - X)/S] \times 100$], untuk DO

S = mutu baku (ambang batas yang ditolerir)

BOD = *Biochemical Oxygen Demand*

COD = *Chemical Oxygen Demand*

DO = *Dissolved Oxygen*

Catatan: Rumus tersebut merupakan perubahan/penurunan dari kualitas yang ditetapkan (standar baku yang ditetapkan)

4.4. Pembobotan Indikator

4.4.1. Metode Penentuan Bobot

Penggunaan penimbang (bobot) dapat mempunyai efek yang signifikan pada indeks komposit yang dihasilkan. Penimbang yang paling sering digunakan pada Indikator Komposit adalah *Equal Weighting* (EW), yaitu semua variabel diberikan penimbang yang sama. Ini menunjukkan bahwa semua variabel dianggap sama "penting". Namun disisi lain EW juga dapat menyembunyikan ketiadaan suatu data statistik atau suatu basis empiris, misalnya ketika ada ketidakcukupan informasi dari hubungan sebab akibat atau kekurangan kesepakatan pada suatu alternatif. Setidaknya, untuk kesamaan penimbang bukan berarti "tidak ada penimbang", akan tetapi secara implisit menunjukkan penimbangannya adalah sama.

Lebih dari itu, jika suatu variabel dikelompokkan dalam dimensi-dimensi dan terkumpul dalam suatu gabungan, kemudian penerapan kesamaan penimbang pada variabel-variabel mungkin menyiratkan bahwa penimbang berbeda dalam dimensi (kelompok dengan dimensi lebih besar akan mempunyai penimbang yang lebih tinggi), akan menghasilkan ketidakseimbangan struktur dalam suatu indeks komposit.

Sejumlah teknik penimbang, beberapa diantaranya diturunkan dari model statistik. Model statistik seperti analisis komponen utama (PCA) atau analisis faktor (FA) dapat digunakan untuk kelompok indikator sesuai dengan besarnya korelasi. Beberapa metoda statistik lain yang dapat digunakan untuk penentuan besaran penimbang pada setiap variabel dalam menyusun indeks komposit selain adalah Metode Regresi, Matrik Korelasi dan Koefisien Variasi. Metoda-metode tersebut secara singkat dijelaskan di bawah ini.

Metode regresi

Penentuan penimbang dengan menggunakan metode regresi dilakukan dengan cara memilih satu variabel dari satu set indikator dan variabel tersebut digunakan sebagai variabel rujukan atau *criterion variable*. Variabel rujukan yang sering dipilih dalam penyusunan indeks pembangunan adalah GDP/GNP per kapita yang diregresikan terhadap variabel-variabel lain (semua variabel dinyatakan dalam bentuk yang distandarisasi) dan penimbang untuk setiap variabel diperoleh dari estimasi koefisien-koefisien regresi. Prosedur tersebut bersifat obyektif kecuali untuk pemilihan *criterion variable*.

Koefisien Variasi

Penentuan penimbang dengan metode koefisien variasi didasarkan pada asumsi bahwa variabel yang lebih penting memiliki variasi yang relatif lebih kecil dibanding variabel lain yang kurang penting. Dengan cara ini, besarnya penimbang adalah proporsional terhadap rasio dari jumlah kolom (baris) dari nilai-nilai absolut koefisien korelasi terhadap koefisien variasi dari masing-masing variabel.

Matriks Korelasi

Penimbang yang ditentukan berdasarkan pada matriks korelasi diasumsikan proporsional (sebanding) dengan jumlah nilai absolut koefisien korelasi pada masing-masing baris atau kolom. Penimbang untuk setiap indikator ditentukan dengan menghitung proporsi dari jumlah tiap-tiap

baris/kolom terhadap jumlah keseluruhan. Nilai proporsi tersebut mengindikasikan kontribusi dari setiap indikator dalam memberikan informasi yang ada dalam dimensi yang tersusun dari sejumlah indikator yang ada.

Menurut Ray (2006), pada kedua metode terakhir asumsi yang mendasari bahwa sebuah variabel yang lebih penting akan memiliki jumlah koefisien korelasi yang lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain adalah sebuah asumsi yang masuk akal.

4.4.2. Penentuan Bobot Indikator

Dalam kajian lanjutan penyusunan Indeks Pembangunan Regional perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam pemilihan metoda penentuan penimbang. Obyektifitas tentu merupakan syarat pertama yang harus dipertimbangkan. Syarat lain adalah aspek kemudahan dan kesederhanaan dalam arti metode yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan dan mudah dikerjakan dengan cara yang sederhana. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, dari sejumlah metode pembobotan yang telah dijelaskan di atas, matriks korelasi dipilih sebagai metode pembobotan untuk penyusunan Indeks Pembangunan Regional pada kajian lanjutan ini.

Penimbang yang ditentukan berdasarkan pada matriks korelasi diasumsikan proporsional (sebanding) dengan jumlah nilai absolut koefisien korelasi pada masing-masing baris atau kolom. Penimbang untuk setiap indikator ditentukan dengan menghitung proporsi dari jumlah tiap-tiap baris/kolom terhadap jumlah keseluruhan. Nilai proporsi tersebut mengindikasikan kontribusi dari setiap indikator dalam memberikan informasi yang ada dalam dimensi yang tersusun dari sejumlah indikator yang ada. Perlu dicatat bahwa matriks korelasi dibentuk pada setiap subdimensi, dan penimbang yang dihasilkan pada setiap indikator digunakan untuk membangun indeks komposit dari setiap subdimensi. Adapun rincian bobot setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Bobot Setiap Indikator Penyusun IPR

Indikator	Bobot	Indikator	Bobot
DIMENSI EKONOMI			
<i>Pendapatan dan Urbanisasi</i>		<i>Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi</i>	
Daya beli (PPP)	0.30	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	0.40
PDRB per kapita (PPP)	0.35	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	0.30
Tingkat urbanisasi [Persentase Penduduk Perkotaan]	0.35	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	0.30
<i>Ketenagakerjaan</i>			
Pekerja di sektor formal	0.35		
Penduduk yang bekerja fulltime/purna waktu	0.35		
Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi	0.30		
DIMENSI SOSIAL			
<i>Pendidikan</i>		<i>Kependudukan</i>	
Rata-rata lama sekolah (tahun)	0.20	Pertumbuhan penduduk	0.30
Angka melek huruf	0.15	Rasio Ketergantungan	0.35
APS 7-12 tahun	0.15	Fertilitas (TFR)	0.35
APS 13-15 tahun	0.20	<i>Sosial Lainnya</i>	
APS 16-18 tahun	0.15	Rumahtangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik	0.30
Penduduk usia 24+ yang menamatkan perguruan tinggi	0.15	Penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan	0.35
		Persentase Penduduk tidak miskin	0.35
<i>Kesehatan</i>			
Angka harapan hidup (tahun)	0.35		
Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan	0.30		
Balita mendapat imunisasi [Rata-rata BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis]	0.35		

DIMENSI INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK			
<i>Pendidikan</i>		<i>Infrastruktur & Pelayanan Publik Lainnya</i>	
Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD	0.30	Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik	0.20
Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP	0.30	Rasio kantor bank per kecamatan	0.30
Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA	0.40	Luas lahan sawah beririgasi	0.20
<i>Kesehatan</i>		Panjang jalan diaspal	0.30
Rasio tempat tidur Rumah Sakit thd 100000 penduduk	0.25		
Rasio puskesmas terhadap 100000 penduduk	0.10		
Rasio dokter thd 100000 penduduk	0.20		
Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (%)	0.25		
Penduduk yang berobat ke tenaga medis/fasilitas kesehatan	0.20		
DIMENSI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
<i>Pencemaran Air dan Tanah</i>		<i>Pencemaran Udara</i>	
Konsentrasi BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>) pada air sungai	0.05	Konsentrasi NO ₂ di udara	0.20
Konsentrasi COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>) pada air sungai	0.05	Konsentrasi SO ₂ di udara	0.40
Konsentrasi DO (<i>Dissolved Oxygen</i>) pada air sungai	0.15	Desa tidak mengalami pencemaran udara	0.40
Desa tidak mengalami pencemaran air	0.15		
Desa tidak mengalami pencemaran tanah	0.15		
Rumahtangga dengan sumber air minum bersih	0.25		
Rumahtangga dengan sanitasi layak	0.20		

DIMENSI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
<i>Teknologi</i>		<i>Komunikasi</i>	
Rumahtangga menguasai PC/laptop/notebook	0.50	Rumahtangga menguasai telepon rumah	0.40
Rumahtangga dengan paling tidak 1 art mengakses internet	0.50	Rumahtangga menguasai HP	0.40
<i>Informasi</i>		Rasio jumlah kantor pos terhadap 10 desa	0.20
Penduduk mendengarkan siaran radio	0.30		
Penduduk menonton siaran TV	0.30		
Penduduk membaca surat kabar	0.40		

Untuk menghitung bobot setiap indikator, maka diperlukan matriks korelasi masing-masing subdimensi seperti contoh berikut. Misalkan untuk subdimensi kemampuan keuangan daerah diperoleh matriks korelasi 3x3 yang menggambarkan korelasi X1 dengan X1, X1 dengan X2, X1 dengan X3, X2 dengan X2, X2 dengan X3, serta X3 dengan X3. Untuk mendapatkan bobot setiap indikator maka jumlahkan masing-masing baris atau kolom. Kemudian hasil tersebut diagregatkan. Contoh baris 1 dijumlahkan dengan baris 2 dan baris 3 (1,96+1,50+1,94) diperoleh hasil 5,39. Untuk mendapatkan bobot maka masing-masing penjumlahan baris/kolom dibagi dengan nilai agregatnya (5,39). Contoh bobot untuk indikator rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (X1) adalah 0,36, untuk mempermudah perhitungan dapat dibulatkan menjadi 0,35 (catatan: diupayakan nilainya berakhiran 5 atau 0). Demikian dengan bobot indikator lainnya menggunakan cara yang sama.

**CARA MEMPEROLEH BESARAN PENIMBANG SETIAP INDIKATOR
DENGAN METODE KORELASI**

	X1	X2	X3	Jumlah
X1	1,00	0,26	0,70	1,96
X2	0,26	1,00	0,24	1,50
X3	0,70	0,24	1,00	1,94
Jumlah	1,96	1,50	1,94	5,39
Bobot hasil hitungan	0,36	0,28	0,36	1,00
Bobot disederhanakan	0,35	0,30	0,35	

X1 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

X2 Kontribusi PMTB terhadap PDRB

X3 Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB

4.5. Pembobotan Dimensi dengan Metode *Equal Weighting*

Selain melakukan pembobotan terhadap indikator, dalam hal ini menggunakan metode korelasi, untuk menghasilkan nilai indeks komposit akhir (IPR) juga diperlukan bobot setiap dimensi dan subdimensi. Metode yang dipilih adalah metode *Equal Weighting* yang merupakan metode dengan sistem penghitungan yang lebih mudah karena dalam hal pembobotan dimensi menggunakan bobot yang sama. Adapun karakteristik metode ini adalah:

- ✓ Prosesnya mudah atau sederhana untuk dilakukan
- ✓ Tidak membutuhkan peralatan (*software*) tertentu maupun keahlian spesifik, hanya membutuhkan operasi matematika sederhana dan dapat menggunakan *microsoft excel*.
- ✓ Pergerakan data pada setiap kelompok dan sub kelompok dengan mudah dapat ditelusuri, untuk keperluan analisis pada setiap kelompok maupun sub kelompok.

Kelemahan dari metode ini adalah bobot suatu kelompok (dalam hal ini dimensi) tidak ditentukan oleh banyaknya indikator yang digunakan, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktur dalam suatu indeks komposit. Hal tersebut dapat bertentangan dengan kerangka dimensi teoritik. Namun hal

ini bisa diminimalisir jika pemilihan indikator sudah sangat tepat pada masing-masing dimensi. Oleh sebab itu, pemilihan indikator terlebih dahulu dikonsultasikan dengan beberapa ahli dan didiskusikan lebih lanjut.

4.6. Pembentukan IPR dan Dimensi IPR dengan Agregasi Linier

Metode agregasi merupakan bagian yang cukup penting dalam membangun indeks komposit, karena dengan agregasi ini akan terbentuk nilai akhir suatu indeks. Ada tiga metode agregasi yang dikenal, yaitu *Linear Aggregation* (LA), *Geometric Aggregation* (GA) dan *Multi Criteria Aggregation* (MCA). Metode agregasi linier (*Linear Aggregation*/LA), digunakan jika setiap indikator memiliki ukuran yang sama dan berdasarkan pada proporsionalitas bobot indikator, sedangkan GA cenderung digunakan pada pembentukan indeks komposit yang mengagregasikan skor-skor bernilai tinggi untuk mendeteksi perubahan kecil yang terjadi.

Dalam LA, pengaruh perbedaan nilai indikator bersifat konstan, sedangkan dalam GA, pengaruh tersebut akan sangat rendah untuk indikator yang nilainya rendah. Rumusan metode LA yang umum digunakan diterapkan dalam pembentukan indeks komposit baik untuk sub-dimensi, dimensi maupun nilai IPR secara keseluruhan.

- *Pembentukan indeks komposit sub-dimensi dalam setiap dimensi*

Penjumlahan bobot dan nilai indikator yang telah dinormalisasi/transformasi digunakan formula berikut:

$$ISubD_i = \sum_{q=1}^Q W_q I_q$$

dimana:

$ISubD_i$ = Indeks komposit sub-dimensi ke-i

W_q = bobot masing-masing indikator yang terbentuk ke-q dimana

$$\sum_q W_q = 1 \text{ dan } 0 \leq W_q \leq 1$$

I_q = nilai indikator ke-q

- *Pembentukan indeks komposit dimensi pembentukan IPR*

Pembentukan indeks komposit setiap dimensi pembentuk IPR didasarkan pada agregasi linier dengan bobot yang sama untuk setiap sub-dimensi yang diformulasikan sebagai berikut:

$$ID_i = \sum_{q=1}^Q W_q \text{SubD}_q$$

dimana:

ID_i = Indeks komposit dimensi ke-i

W_q = bobot masing-masing indikator yang terbentuk ke-q dengan nilai yang sama dimana (nilai bobot sama untuk setiap sub-dimensi)

$$\sum_q W_q = 1 \text{ dan } 0 \leq W_q \leq 1$$

SubD_q = nilai indeks komposit sub-dimensi ke-q

- *Pembentukan indeks komposit IPR*

Sedangkan nilai IPR sendiri dibentuk dengan agregasi linier dengan penimbang (bobot) yang sama untuk setiap dimensi dan diformulasikan sebagai berikut:

$$IPR = \sum_{c=1}^C W_c ID_c$$

dimana:

W_c = bobot masing-masing dimensi ke-c (bobot setiap dimensi sama), dimana

$$\sum_c W_c = 1 \text{ dan } 0 \leq W_c \leq 1$$

ID_c = nilai indeks komposit dimensi ke-c

4.7. Langkah Penghitungan IPR

Secara ringkas, langkah penghitungan IPR adalah sebagai berikut:

1. Menyusun matrik data $m \times n$, dimana n sejumlah provinsi yang diobservasi, dalam hal ini sebanyak 33 provinsi, sedangkan m sejumlah indikator yang diobservasi, yaitu sebanyak 52 indikator, indikator tersebut dibuat agar semua berarah positif terhadap pembangunan.
2. Mengimputasi *missing* data, baik mengimputasi dengan nilai rata-rata ataupun dengan cara interpolasi. Sedangkan untuk data yang ketersediaannya tidak kontinyu menggunakan data tahun tertentu, dengan asumsi perubahannya tidak terlalu signifikan.
3. Normalisasi data indikator dengan metode maksimum-minimum, menggunakan formula yang tercantum sebelumnya, dimana nilai maksimum dan nilai minimumnya sudah ditetapkan, seperti pada tabel 4.1
4. Menghitung bobot setiap indikator dengan menggunakan metode korelasi, bobot ini akan digunakan untuk penghitungan selanjutnya, sehingga nilainya tetap (*fixed*).
5. Menghitung indeks komposit masing-masing kelompok sub dimensi dari indikator yang ada pada setiap kelompok dimensi, dengan metode rata-rata tertimbang, yaitu menjumlahkan perkalian seluruh indikator yang telah dinormalisasi dengan nilai bobot masing-masing indikator pada setiap sub-dimensi.
6. Menghitung indeks komposit masing-masing kelompok dimensi dari indeks komposit setiap sub dimensi, dengan cara menjumlahkan seluruh indeks komposit sub dimensi pada tahap 5 dibagi dengan jumlah sub-dimensi yang ada di setiap dimensi, atau dengan kata lain menggunakan metode *linier agregation*, dimana bobot setiap subdimensi sama (*equal weighting*).
7. Menghitung agregat IPR dari indeks komposit masing-masing dimensi, dengan cara menjumlahkan indeks komposit setiap kelompok dimensi kemudian membaginya dengan jumlah dimensi (5 dimensi), dimana setiap dimensi dianggap sama pentingnya sehingga mempunyai penimbang yang sama (*Equal weighting*).

5

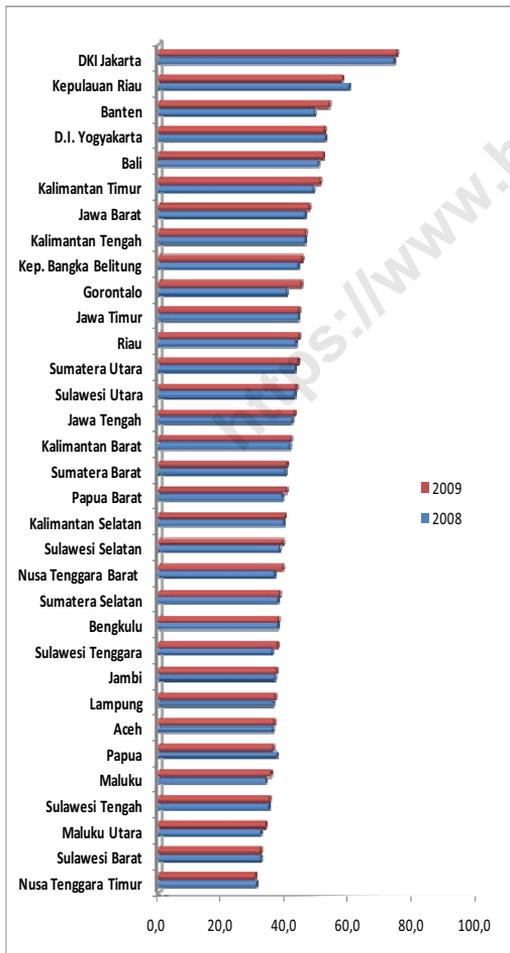
KINERJA PEMBANGUNAN REGIONAL

Indeks Pembangunan Regional (IPR) adalah indeks kinerja yang berorientasi pada outcome atau hasil pembangunan. IPR mencoba mengukur kondisi wilayah dari berbagai dimensi pembangunan yang didasarkan pada target capaian yang telah ditentukan. Hasil penyusunan IPR dapat membantu pembuat kebijakan, akademisi, dan para ahli pembangunan khususnya dalam menyediakan dasar kuantitatif untuk membandingkan, menganalisis, dan memahami kinerja pembangunan wilayah. Karena IPR dibangun berdasarkan sejumlah dimensi pembangunan, IPR juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan kemajuan yang telah dicapai dalam setiap bidang pembangunan dan menyusun kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong kemajuan wilayah. Hasil dari kajian penyusunan IPR dalam kaitannya dengan analisis kinerja pembangunan baik antar waktu maupun antar wilayah lebih jauh dibahas secara detil pada pembahasan berikut.

5.1. Kinerja Pembangunan Dimensi Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan. Pembangunan ekonomi pada intinya adalah meningkatkan pendapatan penduduk dan output secara keseluruhan, yang salah satunya didukung oleh kondisi ketenagakerjaan yang kondusif, rangsangan terhadap investasi, serta kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu penghitungan IPR dalam dimensi ekonomi meliputi aspek-aspek tersebut.

Gambar 5.1. Indeks Dimensi Ekonomi, 2008-2009



Pada tahun 2009 lima provinsi dengan nilai indeks ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, DI Yogyakarta dan Bali. Tingginya pencapaian kinerja ekonomi DKI Jakarta disebabkan tingginya nilai pencapaian baik sub dimensi pendapatan dan urbanisasi, sub-dimensi ketenagakerjaan maupun sub dimensi kemampuan keuangan daerah, investasi dan struktur ekonomi. Hampir semua indikator dalam dimensi ekonomi memiliki skor yang tinggi untuk DKI Jakarta. Misalnya tingkat urbanisasi yang telah mencapai skor tertinggi (100) dan kontribusi sektor tersier dalam PDRB yang

mencapai lebih dari 70 persen. Sementara itu, tingginya pencapaian kinerja ekonomi di Kepulauan Riau utamanya disumbang oleh tingginya nilai sub dimensi ketenagakerjaan serta kontribusi PMTB terhadap PDRB yang sudah melebihi target yang ditetapkan (40 persen). Tiga provinsi lainnya (Banten, DI Yogyakarta dan Bali) memiliki karakteristik ekonomi yang relatif serupa.

Tabel 5.1. Peringkat IPR Dimensi Ekonomi

	Provinsi	Peringkat		Indeks Dimensi Ekonomi	
		2008	2009	2008	2009
11	Aceh	27	27	35,8	36,2
12	Sumatera Utara	12	13	42,7	43,7
13	Sumatera Barat	17	17	39,9	40,3
14	Riau	11	12	43,0	43,9
15	Jambi	24	25	36,5	36,8
16	Sumatera Selatan	21	22	37,3	37,8
17	Bengkulu	22	23	37,3	37,4
18	Lampung	26	26	35,9	36,5
19	Kep. Bangka Belitung	10	9	43,7	44,9
21	Kepulauan Riau	2	2	59,8	57,7
31	DKI Jakarta	1	1	73,8	74,6
32	Jawa Barat	7	7	46,1	47,3
33	Jawa Tengah	14	15	41,9	42,6
34	D.I. Yogyakarta	3	4	52,5	52,2
35	Jawa Timur	9	11	43,8	43,9
36	Banten	5	3	48,9	53,6
51	Bali	4	5	50,0	51,8
52	Nusa Tenggara Barat	25	21	36,3	38,8
53	Nusa Tenggara Timur	33	33	30,7	30,4
61	Kalimantan Barat	15	16	41,2	41,6
62	Kalimantan Tengah	8	8	46,1	46,2
63	Kalimantan Selatan	18	19	39,1	39,6
64	Kalimantan Timur	6	6	48,6	50,5
71	Sulawesi Utara	13	14	42,7	43,2
72	Sulawesi Tengah	29	30	34,7	34,8
73	Sulawesi Selatan	20	20	37,8	38,8
74	Sulawesi Tenggara	28	24	35,5	37,2
75	Gorontalo	16	10	40,2	44,6
76	Sulawesi Barat	32	32	31,9	31,9
81	Maluku	30	29	33,7	35,2
82	Maluku Utara	31	31	31,9	33,6
91	Papua Barat	19	18	38,6	40,2
92	Papua	23	28	37,1	35,8

Lima provinsi yang memiliki pencapaian kinerja ekonomi yang rendah diantaranya: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku. Pada tahun 2009, rendahnya pencapaian kinerja ekonomi di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah disebabkan oleh pendapatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, sedangkan rendahnya nilai pencapaian ekonomi tiga provinsi lainnya (Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku) disebabkan oleh rendahnya kemampuan keuangan daerah, minimnya investasi dan struktur perekonomian yang masih didominasi sektor primer. Rendahnya pencapaian ekonomi di sejumlah provinsi wilayah timur Indonesia seharusnya menjadi perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan perekonomian di wilayah tersebut.

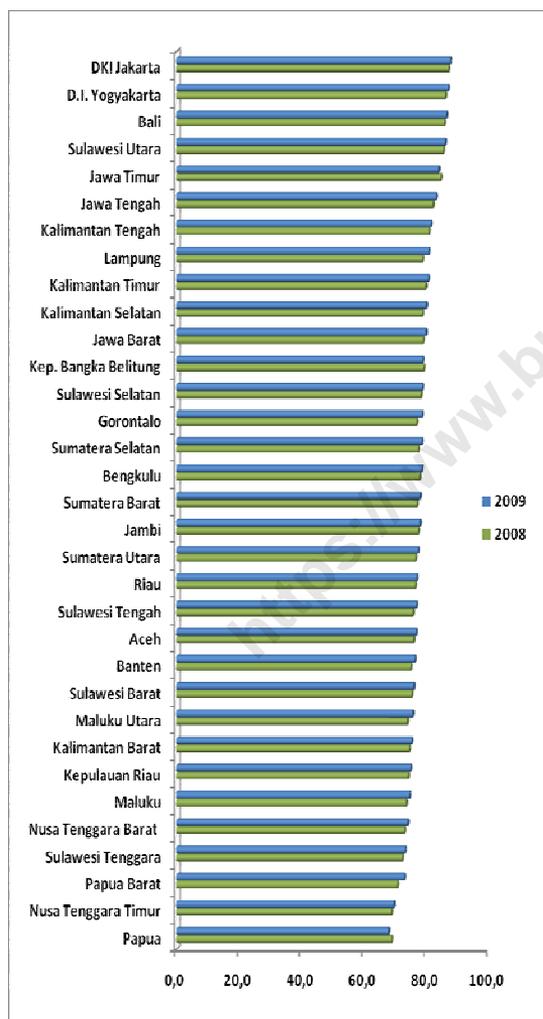
Meskipun terlihat adanya kesenjangan yang besar antar provinsi dalam kinerja pembangunan ekonomi seperti terlihat pada kisaran skor dari indeks dimensi ekonomi (terendah 30,4 dan tertinggi 74,6), jika dilihat perkembangannya selama periode 2008-2009, terlihat bahwa indeks dimensi ekonomi mengalami peningkatan di hampir semua provinsi. Sub dimensi ketenagakerjaan merupakan aspek yang cepat berkembang di bandingkan dengan sub dimensi pendapatan dan urbanisasi yang cenderung bergerak sangat lambat, sedangkan sub dimensi kemampuan keuangan, investasi dan struktur ekonomi yang meningkat cukup tinggi hanya terjadi di beberapa provinsi saja.

5.2. Kinerja Pembangunan Dimensi Sosial

Pembangunan sosial yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sosial lainnya juga merupakan hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pembangunan ekonomi. Dimensi sosial mencakup aspek sumber daya manusia baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Indeks pembangunan regional dimensi sosial ini juga secara langsung mengukur capaian pembangunan dalam hal kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Seperti halnya pada kinerja perekonomian, selama periode 2008-2009, kinerja pembangunan dimensi sosial terbaik juga dicapai oleh DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali. Dua provinsi yang menduduk posisi berikutnya adalah

Gambar 5.2. Indeks Dimensi Sosial, 2008-2009



Sulawesi Utara dan Jawa Timur.

Di lima provinsi tersebut sub dimensi kependudukan sudah mencapai skor ideal yaitu 100. Artinya baik pertumbuhan penduduk, rasio ketergantungan dan tingkat fertilitas sudah mencapai target yang ditetapkan, sementara pada sub dimensi lain seperti pendidikan, nilainya masih relatif lebih rendah meskipun capaiannya sudah menembus skor di atas 67 (lihat Lampiran). Lima provinsi yang memiliki pencapaian dimensi sosial terendah adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat. Papua memiliki tingkat pendidikan penduduk yang paling rendah, sedangkan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai yang rendah dalam sub-dimensi kependudukan.

Tabel 5.2. Peringkat IPR Dimensi Sosial

	Provinsi	Peringkat		Indeks Dimensi Sosial	
		2008	2009	2008	2009
11	Aceh	21	22	75,9	76,7
12	Sumatera Utara	19	19	76,5	77,4
13	Sumatera Barat	17	17	77,0	78,0
14	Riau	20	20	76,4	76,9
15	Jambi	15	18	77,5	77,9
16	Sumatera Selatan	16	15	77,4	78,5
17	Bengkulu	14	16	77,8	78,5
18	Lampung	11	8	78,8	80,7
19	Kep. Bangka Belitung	9	12	79,2	78,8
21	Kepulauan Riau	26	27	74,1	75,0
31	DKI Jakarta	1	1	87,2	87,7
32	Jawa Barat	10	11	79,0	79,8
33	Jawa Tengah	6	6	82,1	83,2
34	D.I. Yogyakarta	2	2	86,1	87,0
35	Jawa Timur	5	5	84,6	84,0
36	Banten	24	23	75,0	76,3
51	Bali	3	3	85,9	86,5
52	Nusa Tenggara Barat	29	29	73,0	74,0
53	Nusa Tenggara Timur	33	32	68,9	69,6
61	Kalimantan Barat	25	26	74,5	75,4
62	Kalimantan Tengah	7	7	80,8	81,5
63	Kalimantan Selatan	12	10	78,8	79,9
64	Kalimantan Timur	8	9	79,8	80,6
71	Sulawesi Utara	4	4	85,5	86,0
72	Sulawesi Tengah	22	21	75,7	76,8
73	Sulawesi Selatan	13	13	78,2	78,7
74	Sulawesi Tenggara	30	30	72,3	73,3
75	Gorontalo	18	14	76,9	78,6
76	Sulawesi Barat	23	24	75,4	75,9
81	Maluku	28	28	73,5	74,6
82	Maluku Utara	27	25	73,9	75,6
91	Papua Barat	31	31	70,7	73,0
92	Papua	32	33	68,9	67,9

Berdasarkan Gambar 5.2, secara umum dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pembangunan dalam dimensi sosial sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat pada kisaran skor yang dicapai yaitu antara 67 dan 88. Kisaran skor ini jauh lebih merata dibandingkan dengan kisaran skor yang dicapai pada pembangunan di bidang ekonomi yang terlihat lebih timpang.

5.3. Kinerja Pembangunan Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pembangunan infrastruktur daerah seringkali menjadi hal yang mudah digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, karena hasilnya dapat dilihat langsung secara kasat mata. Akan tetapi perlu diingat bahwa infrastruktur dan fasilitas publik yang tampak tersebut secara riil belum tentu menggambarkan kemudahan penduduk untuk mengakses maupun pemanfaatan fasilitas yang ada. Dilihat dari aspek pengukuran, ketersediaan data yang mengukur pemanfaatan fasilitas publik tidak banyak tersedia. Oleh karena itu sejumlah indikator yang masuk dalam dimensi infrastruktur dan pelayanan publik didekati dengan sejumlah indikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan dimensi tersebut.

Pada tahun 2009, diantara 33 provinsi yang ada di Indonesia, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara tentunya memiliki fasilitas yang paling lengkap dibanding wilayah lainnya. Provinsi yang tidak kalah baiknya dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik adalah D.I. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali dan Kepulauan Riau. Fasilitas publik yang dianggap sudah memadai di lima provinsi tersebut adalah rasio tempat tidur per 100.000 penduduk yang sudah mencapai lebih dari 75 unit per 100.000 penduduk. Selain itu, rasio bank per kecamatan juga sudah melebihi target 3 bank per kecamatan, kecuali di Sulawesi Utara yang belum mencapai target tersebut.

Sementara itu, provinsi yang memiliki nilai indeks infrastruktur dan pelayanan publik terendah pada tahun 2009 adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Kalimantan Tengah. Meskipun tahun sebelumnya posisi Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat hanya bertukar tempat, sedangkan Kalimantan Tengah menggantikan posisi Banten. Fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya seperti bank, jalan dan irigasi yang masih relatif rendah di provinsi-provinsi tersebut menyebabkan rendahnya nilai indeks infrastruktur dan

pelayanan publik, sementara fasilitas pendidikan umumnya sudah cukup memadai.

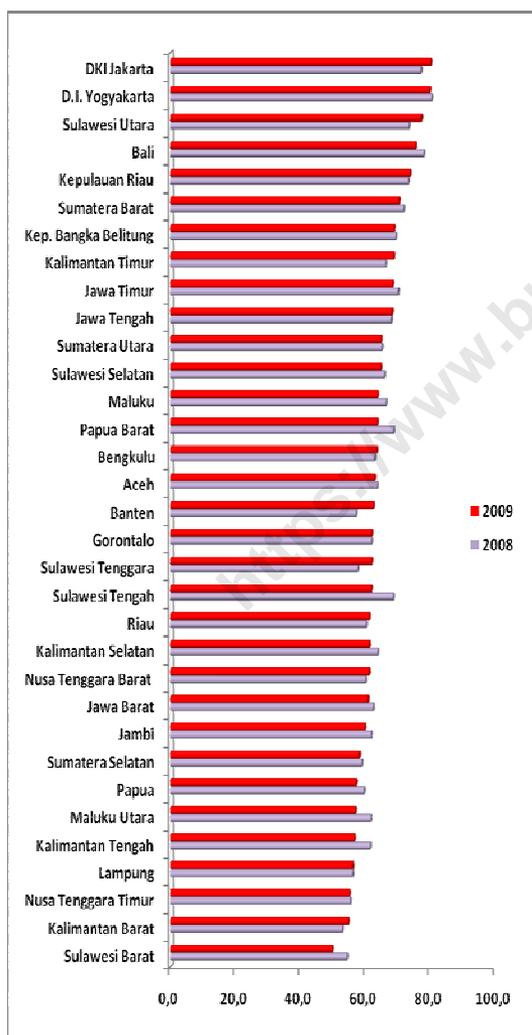
Tabel 5.3. Peringkat IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

	Provinsi	Peringkat		Indeks Dimensi Infrastruktur & Pelayanan Publik	
		2008	2009	2008	2009
11	Aceh	17	16	63,6	62,8
12	Sumatera Utara	15	11	65,1	64,9
13	Sumatera Barat	6	6	71,9	70,3
14	Riau	24	21	60,3	61,2
15	Jambi	21	25	61,8	59,9
16	Sumatera Selatan	27	26	58,9	58,1
17	Bengkulu	18	15	62,9	63,5
18	Lampung	30	30	56,1	56,1
19	Kep. Bangka Belitung	8	7	69,4	68,8
21	Kepulauan Riau	5	5	73,2	73,8
31	DKI Jakarta	3	1	77,1	80,1
32	Jawa Barat	19	24	62,5	60,8
33	Jawa Tengah	11	10	68,0	68,2
34	D.I. Yogyakarta	1	2	80,4	79,8
35	Jawa Timur	7	9	70,1	68,3
36	Banten	29	17	57,2	62,6
51	Bali	2	4	78,0	75,4
52	Nusa Tenggara Barat	25	23	60,2	61,1
53	Nusa Tenggara Timur	31	31	55,4	55,1
61	Kalimantan Barat	33	32	53,0	54,7
62	Kalimantan Tengah	23	29	61,4	56,6
63	Kalimantan Selatan	16	22	63,8	61,2
64	Kalimantan Timur	13	8	66,3	68,7
71	Sulawesi Utara	4	3	73,5	77,3
72	Sulawesi Tengah	10	20	68,6	61,9
73	Sulawesi Selatan	14	12	65,8	64,8
74	Sulawesi Tenggara	28	19	57,8	62,0
75	Gorontalo	20	18	61,9	62,0
76	Sulawesi Barat	32	33	54,3	49,8
81	Maluku	12	13	66,4	63,7
82	Maluku Utara	22	28	61,6	56,9
91	Papua Barat	9	14	68,7	63,7
92	Papua	26	27	59,6	57,2

Jika dibandingkan dengan dimensi pembangunan lainnya, indeks infrastruktur dan pelayanan publik tidak mengalami kemajuan yang menggembirakan. Bahkan sejumlah provinsi mengalami penurunan selama periode 2008-2009. Penurunan indeks ini utamanya disebabkan oleh

meningkatnya daya tampung ruang kelas, baik untuk siswa tingkat SD, SMP maupun SMA. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah siswa tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah ruang kelas. Akibatnya rasio murid kelas meningkat. Secara umum, berdasarkan capaian atau skor indeks dimensi infrastruktur dan

Gambar 5.3. Indeks Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik, 2008-2009



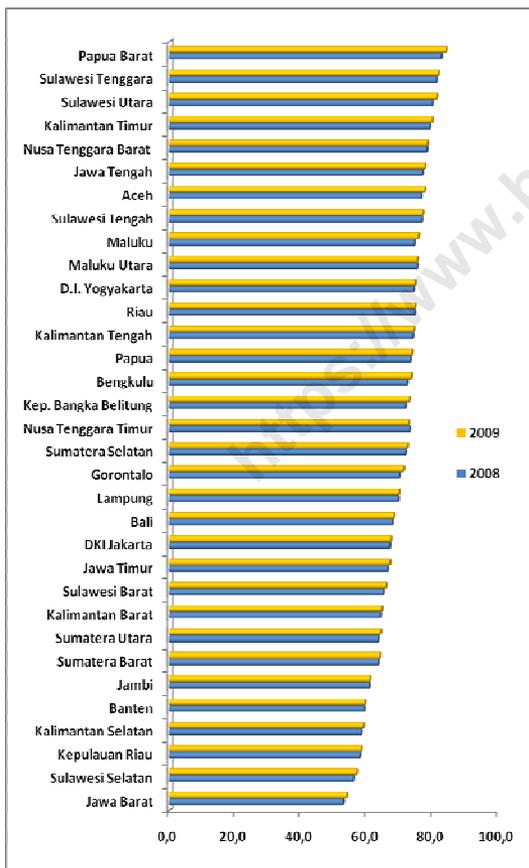
pelayanan publik, ketimpangan antar provinsi juga cukup tinggi seperti ditunjukkan oleh kisaran indeks antara 49 dan 81.

Jika dilihat perkembangan menurut sub dimensi, selama periode 2008-2009, terlihat bahwa sub dimensi pendidikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan faktor yang paling besar kontribusinya terhadap penurunan indeks infrastruktur dan pelayanan publik. Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan dalam indeks infrastruktur di bidang pendidikan. Sebaliknya, untuk sub dimensi penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang kesehatan, ada kecenderungan kinerja yang meningkat di seluruh provinsi (lihat Lampiran).

5.4. Kinerja Pembangunan Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup

Secara umum kinerja pembangunan dimensi kualitas lingkungan hidup relatif baik dengan kisaran indeks antara 53 dan 85. Selama periode 2008-2009, terlihat bahwa Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki nilai indeks lingkungan hidup yang tertinggi diantara 33 provinsi lainnya, sedangkan Jawa

Gambar 5.4. Indeks Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, 2008-2009



Barat, Sulawesi Selatan Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Banten merupakan provinsi dengan nilai indeks lingkungan hidup terendah. Jika dibandingkan dengan dimensi lain, ternyata provinsi yang memiliki indeks tertinggi pada dimensi lain, justru mempunyai nilai indeks yang rendah dalam dimensi kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa di satu sisi pembangunan pada dimensi tertentu khususnya ekonomi kemungkinan berdampak negatif pada dimensi lingkungan hidup, sementara di sisi lain pembangunan kualitas lingkungan hidup kurang mendapat perhatian.

Tabel 5.4. Peringkat IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup

	Provinsi	Peringkat		Indeks Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup	
		2008	2009	2008	2009
11	Aceh	8	7	76,5	77,7
12	Sumatera Utara	27	26	63,5	64,2
13	Sumatera Barat	26	27	63,5	64,0
14	Riau	10	12	74,5	74,7
15	Jambi	28	28	60,8	60,9
16	Sumatera Selatan	18	18	71,7	72,4
17	Bengkulu	16	15	72,2	73,6
18	Lampung	20	20	69,5	69,8
19	Kep. Bangka Belitung	17	16	71,8	73,0
21	Kepulauan Riau	31	31	57,8	58,3
31	DKI Jakarta	22	22	67,0	67,3
32	Jawa Barat	33	33	52,8	53,9
33	Jawa Tengah	6	6	76,9	77,7
34	D.I. Yogyakarta	12	11	74,2	74,7
35	Jawa Timur	23	23	66,4	67,0
36	Banten	29	29	59,3	59,5
51	Bali	21	21	67,8	68,3
52	Nusa Tenggara Barat	5	5	78,3	78,5
53	Nusa Tenggara Timur	15	17	73,1	72,8
61	Kalimantan Barat	25	25	64,1	64,6
62	Kalimantan Tengah	13	13	74,0	74,3
63	Kalimantan Selatan	30	30	58,3	59,0
64	Kalimantan Timur	4	4	79,2	80,0
71	Sulawesi Utara	3	3	80,0	81,2
72	Sulawesi Tengah	7	8	76,7	77,1
73	Sulawesi Selatan	32	32	55,8	57,0
74	Sulawesi Tenggara	2	2	81,1	81,9
75	Gorontalo	19	19	69,8	71,2
76	Sulawesi Barat	24	24	65,0	65,9
81	Maluku	11	9	74,5	75,7
82	Maluku Utara	9	10	75,4	75,4
91	Papua Barat	1	1	82,7	84,1
92	Papua	14	14	73,3	73,7

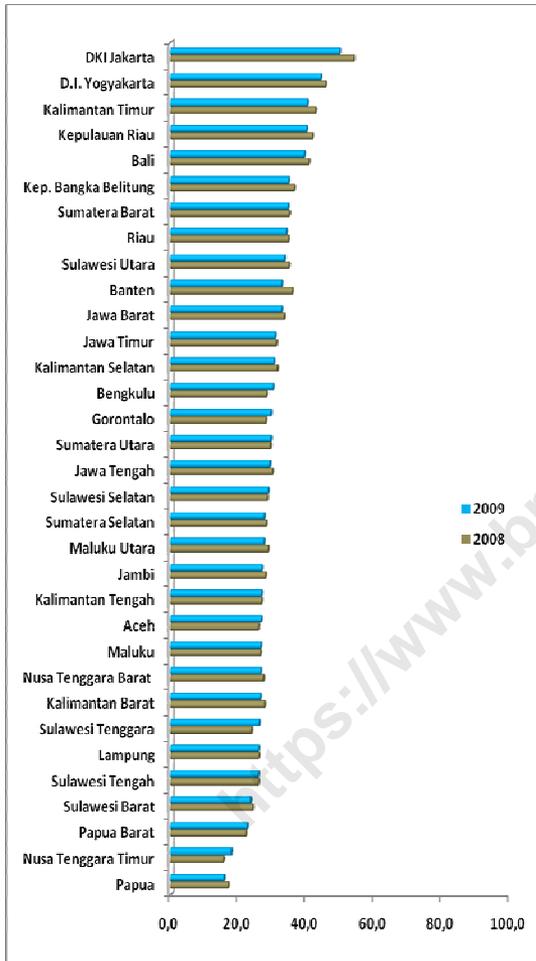
Hal yang menarik jika melihat indeks lingkungan hidup DKI Jakarta yang diperkirakan memiliki tingkat pencemaran yang sangat tinggi justru berada pada posisi tidak terlalu bawah. Hal ini mungkin terkait dengan masuknya beberapa indikator yang mampu mengangkat indeks dimensi kualitas lingkungan hidup seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi. Indeks dari kedua indikator tersebut cukup tinggi untuk DKI Jakarta. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indeks dimensi kualitas lingkungan hidup, nilai indeks

komposit akhir (IPR) dibedakan analisisnya dengan menyertakan indeks lingkungan hidup dan tanpa memasukkan indeks lingkungan hidup dalam penghitungannya. Hal ini akan di bahas selanjutnya.

5.5. Kinerja Pembangunan Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berkembang sangat jauh saat ini dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik terhadap cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Akibatnya kecepatan kinerja bisnis meningkat dengan cepat. Kecepatan proses meningkat sangat tajam di banyak aktivitas modern manusia. Namun sayangnya belum semua wilayah di Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan TIK tersebut, bahkan beberapa daerah masih tertinggal dalam hal ini. Misalnya Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Rendahnya nilai indeks TIK di provinsi tersebut disebabkan oleh akses yang rendah terhadap media cetak dan elektronik, media komunikasi, dan yang utama rendahnya akses terhadap internet dan penguasaan komputer/PC/laptop, yang belum mencapai 10 persen. Sebaliknya di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Bali, akses terhadap TIK sudah cukup baik, bahkan ketersediaan kantor pos per 10 desa sudah melebihi target yang ditetapkan.

Gambar 5.5. Indeks Dimensi TIK, 2008-2009



Bila dilihat secara umum seperti yang terlihat pada Gambar 5.5, berdasarkan hasil penghitungan indeks TIK diketahui bahwa pembangunan di bidang TIK masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Di bandingkan dimensi lain, indeks TIK memiliki nilai terendah, dengan kisaran antara 15 sampai 54. Selanjutnya jika dilihat perkembangan antar sub dimensi, selama periode 2008-2009, terlihat bahwa sub dimensi informasi yang diukur berdasarkan persentase penduduk yang mendengarkan siaran radio dan membaca surat kabar mengalami penurunan hampir di setiap provinsi. Hal tersebut kemungkinan besar disebabkan adanya pergeseran

dalam hal mengakses berita dari media cetak ke media elektronik yang menyebabkan media informasi radio dan surat kabar tidak lagi menjadi sumber utama informasi. Pergeseran ini terlihat dengan adanya peningkatan indeks sub-dimensi komunikasi dan teknologi.

Tabel 5.5. Peringkat IPR Dimensi Teknologi Komunikasi dan Informasi

	Provinsi	Peringkat		Indeks Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		2008	2009	2008	2009
11	Aceh	27	23	25,9	26,8
12	Sumatera Utara	15	16	29,4	29,5
13	Sumatera Barat	8	7	34,9	34,6
14	Riau	10	8	34,7	34,1
15	Jambi	21	21	27,9	26,9
16	Sumatera Selatan	19	19	28,2	27,6
17	Bengkulu	18	14	28,3	30,1
18	Lampung	26	28	26,0	25,9
19	Kep. Bangka Belitung	6	6	36,5	34,8
21	Kepulauan Riau	4	4	41,7	40,1
31	DKI Jakarta	1	1	54,0	49,8
32	Jawa Barat	11	11	33,5	32,8
33	Jawa Tengah	14	17	30,0	29,2
34	D.I. Yogyakarta	2	2	45,7	44,3
35	Jawa Timur	13	12	31,1	30,8
36	Banten	7	10	35,8	32,8
51	Bali	5	5	40,8	39,3
52	Nusa Tenggara Barat	23	25	27,3	26,6
53	Nusa Tenggara Timur	33	32	15,5	17,9
61	Kalimantan Barat	22	26	27,7	26,5
62	Kalimantan Tengah	24	22	26,9	26,8
63	Kalimantan Selatan	12	13	31,4	30,4
64	Kalimantan Timur	3	3	42,7	40,3
71	Sulawesi Utara	9	9	34,9	33,6
72	Sulawesi Tengah	28	29	25,9	25,8
73	Sulawesi Selatan	17	18	28,5	28,8
74	Sulawesi Tenggara	30	27	23,9	26,1
75	Gorontalo	20	15	28,0	29,5
76	Sulawesi Barat	29	30	24,2	23,6
81	Maluku	25	24	26,5	26,6
82	Maluku Utara	16	20	28,8	27,5
91	Papua Barat	31	31	22,2	22,6
92	Papua	32	33	17,0	15,7

5.6. Kinerja Pembangunan Regional Secara Umum

Kinerja pembangunan regional secara umum yang mencakup lima dimensi pembangunan dapat dilihat secara ringkas pada nilai Indeks Pembangunan Regional (IPR) yang merupakan komposit dari dimensi pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur dan pelayanan publik, kualitas

lingkungan hidup dan TIK. Berdasarkan angka IPR hasil komposit dari semua dimensi pembangunan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali dan Kalimantan Timur menduduki posisi lima besar, baik pada tahun 2008 maupun tahun 2009. DKI Jakarta mampu mencatat skor IPR sekitar 72 melebihi provinsi lainnya. Hal tersebut disebabkan DKI Jakarta unggul di setiap dimensi pembangunan, kecuali dimensi kualitas lingkungan hidup yang memiliki indeks yang lebih rendah di dibandingkan 4 provinsi lainnya. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat aktivitas ekonomi yang tinggi ditambah dengan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan DKI Jakarta memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi pula.

Jika dilihat berdasarkan pulau, di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan nilai pencapaian IPR tertinggi, yaitu 61,4 pada tahun 2008 dan 61,0 pada tahun 2009, atau peringkat ke-6. Hanya dimensi sosial dan kualitas lingkungan hidup yang memiliki nilai yang rendah diantara provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera. Rendahnya nilai indeks sosial di provinsi Kepulauan Riau utamanya disebabkan oleh faktor demografi penduduknya yang berkaitan dengan struktur penduduk tua dan penduduk muda dan masalah pertumbuhan penduduk yang masih lebih tinggi di dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Sumatera. Kepulauan Bangka Belitung juga merupakan provinsi dengan nilai IPR lebih baik dibandingkan provinsi di Pulau Sumatera lainnya, yaitu mencapai 60,1 atau menduduki peringkat ke-7 secara nasional pada tahun 2008 dan turun menjadi peringkat ke-8 pada tahun 2009. Faktor penyumbang terhadap cukup tingginya nilai IPR di provinsi ini adalah relatif tingginya kinerja pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

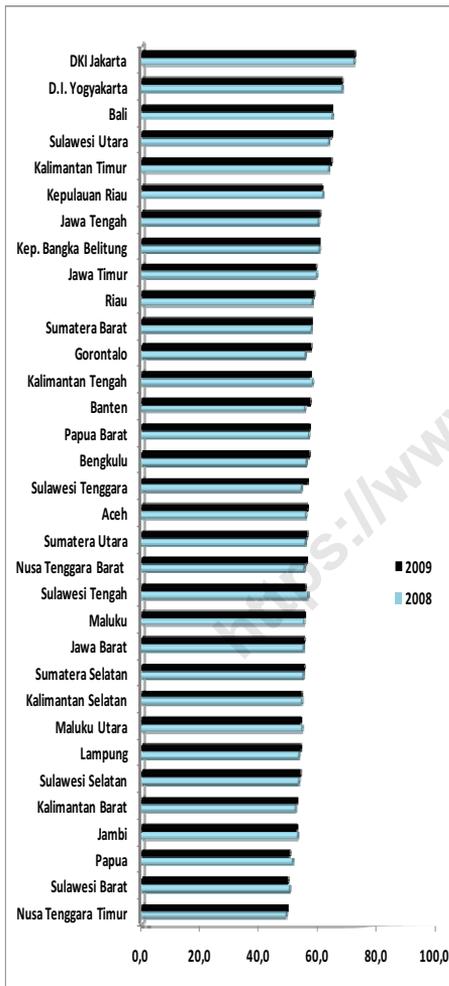
Tabel 5.6. Peringkat IPR menurut Provinsi

	Provinsi	IPR Gabungan Semua Dimensi				IPR Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup			
		Peringkat		Indeks		Peringkat		Indeks	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
11	Aceh	16	18	55,5	56,0	23	20	49,1	50,8
12	Sumatera Utara	17	19	55,4	55,9	15	14	52,5	53,6
13	Sumatera Barat	12	11	57,4	57,5	9	10	54,9	55,7
14	Riau	11	10	57,8	58,2	14	13	52,5	54,1
15	Jambi	29	30	52,9	52,5	21	22	49,8	50,4
16	Sumatera Selatan	23	24	54,7	54,9	22	21	49,3	50,7
17	Bengkulu	15	16	55,7	56,6	19	19	50,0	52,5
18	Lampung	27	27	53,2	53,8	27	26	48,1	49,8
19	Kep. Bangka Belitung	7	8	60,1	60,1	8	7	56,0	56,8
21	Kepulauan Riau	6	6	61,4	61,0	4	4	61,0	61,6
31	DKI Jakarta	1	1	71,8	71,9	1	1	72,9	72,9
32	Jawa Barat	22	23	54,8	54,9	11	12	54,0	55,2
33	Jawa Tengah	8	7	59,8	60,2	10	9	54,6	55,7
34	D.I. Yogyakarta	2	2	67,8	67,6	2	2	65,0	66,1
35	Jawa Timur	9	9	59,2	58,8	7	8	56,2	56,8
36	Banten	19	14	55,2	56,9	12	11	53,7	55,6
51	Bali	3	3	64,5	64,3	3	3	62,5	63,3
52	Nusa Tenggara Barat	20	20	55,0	55,8	26	23	48,4	50,0
53	Nusa Tenggara Timur	33	33	48,7	49,2	33	33	41,3	43,2
61	Kalimantan Barat	30	29	52,1	52,5	29	28	47,5	49,7
62	Kalimantan Tengah	10	13	57,8	57,1	13	17	52,6	52,8
63	Kalimantan Selatan	25	25	54,3	54,0	16	18	52,4	52,7
64	Kalimantan Timur	4	5	63,3	64,0	6	6	57,8	59,7
71	Sulawesi Utara	5	4	63,3	64,2	5	5	58,1	60,1
72	Sulawesi Tengah	14	21	56,3	55,3	20	25	49,9	49,8
73	Sulawesi Selatan	28	28	53,2	53,6	17	16	51,7	52,9
74	Sulawesi Tenggara	26	17	54,1	56,1	30	29	46,1	49,6
75	Gorontalo	18	12	55,4	57,2	18	15	50,9	53,2
76	Sulawesi Barat	32	32	50,1	49,4	31	31	45,2	45,5
81	Maluku	21	22	54,9	55,2	24	24	48,6	50,0
82	Maluku Utara	24	26	54,3	53,8	28	30	47,5	48,4
91	Papua Barat	13	15	56,6	56,7	25	27	48,5	49,7
92	Papua	31	31	51,2	50,1	32	32	43,9	44,3

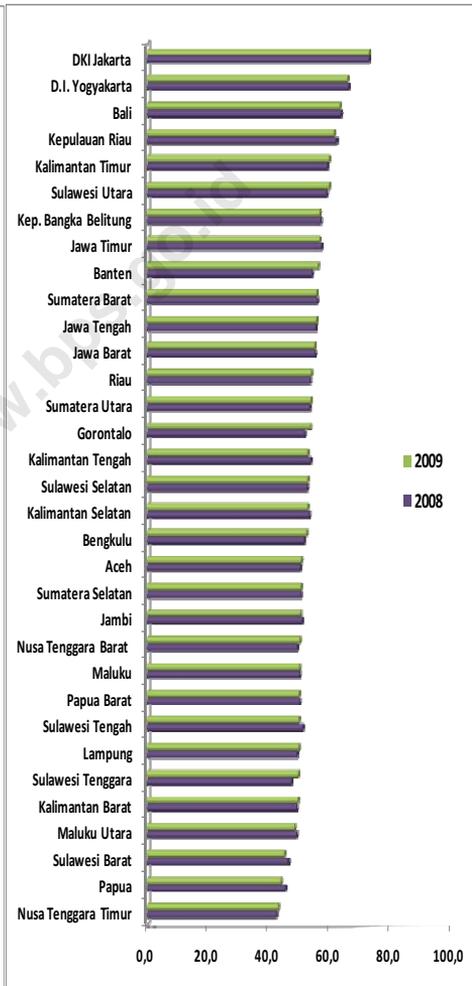
Sementara itu Jambi dan Lampung merupakan provinsi dengan peringkat terendah di antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Bahkan Jambi berada pada posisi 29 pada tahun 2008 dan turun menjadi posisi 30 pada tahun berikutnya, sedangkan Lampung berada pada posisi ke-28 pada tahun 2008 dan naik menjadi posisi ke-27 pada tahun berikutnya. Aspek pembangunan yang

menyebabkan rendahnya IPR di kedua provinsi adalah dimensi ekonomi, dimensi infrastruktur dan pelayanan publik dan dimensi TIK.

Gambar 5.6. IPR Gabungan Semua Dimensi, 2008-2009



Gambar 5.7. IPR Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, 2008-2009



Di wilayah Kalimantan, setelah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan nilai pencapaian IPR cukup tinggi dibandingkan provinsi lain pada wilayah yang sama, dengan posisi pencapaian IPR berada

pada urutan 10 pada tahun 2008 dan turun posisi ke-13 pada tahun 2009. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan pencapaian IPR paling rendah di Kalimantan, bahkan menduduki posisi 30 dan 29 masing-masing pada tahun 2008 dan 2009. Penyebab lebih rendahnya IPR di Kalimantan Barat utamanya disebabkan oleh rendahnya kinerja di bidang infrastruktur dan pelayanan publik, khususnya penyediaan fasilitas Kesehatan.

Di wilayah Sulawesi, IPR cukup bervariasi yang menunjukkan adanya ketimpangan. Sulawesi Utara memiliki IPR yang bagus, tahun 2008 menduduki peringkat ke-4, bahkan tahun 2009 berada di peringkat ke-3. Kondisi tersebut berbeda dengan provinsi lainnya yang cenderung memiliki IPR yang nilainya jauh di bawah Sulawesi Utara. Tingginya variasi angka IPR provinsi-provinsi di kawasan Sulawesi menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi, pembangunan belum merata. Ketimpangan juga terjadi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bali selalu memiliki nilai IPR dan indeks dimensi yang tinggi, sementara Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat berada jauh di bawahnya.

Sementara itu di Pulau Jawa, Jawa Barat sebagai provinsi terdekat dengan pusat pertumbuhan (DKI Jakarta) memiliki IPR (gabungan semua dimensi) yang jauh dari DKI Jakarta. Rendahnya IPR Jawa Barat disebabkan oleh rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks infrastruktur dan pelayanan publik. Rendahnya indeks lingkungan di Jawa Barat terkait dengan tingginya pencemaran udara terutama pencemaran oleh SO₂ yang lebih tinggi dari provinsi lainnya di pulau Jawa. Sedangkan rendahnya indeks infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat disebabkan oleh rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Meskipun dilihat secara kasat mata pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di bidang pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat cukup baik secara kuantitas, namun setelah indikator ditimbang dengan jumlah penduduk terlihat bahwa akses maupun kapasitasnya belum memenuhi kondisi ideal yang harus dicapai.

Sementara itu, jika indeks dimensi kualitas lingkungan hidup tidak dimasukkan sebagai salah satu komponen penghitungan IPR, diperoleh hasil IPR yang sangat berbeda (lihat Tabel 5.6 dan Gambar 5.7). Dengan kata lain terjadi perubahan peringkat yang cukup mencolok pada sejumlah provinsi. Beberapa provinsi yang memiliki indeks lingkungan yang cukup tinggi jatuh ke posisi-posisi lebih rendah. Misalnya Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Sulawesi Tengah mengalami penurunan peringkat. Beberapa provinsi lain yang memiliki indeks kualitas lingkungan yang rendah berubah peringkat IPRnya menjadi posisi yang lebih tinggi, misalnya Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan dan Banten. Ketika kinerja pembangunan regional tidak memperhitungkan pembangunan dimensi kualitas lingkungan hidup, maka Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat memperlihatkan kinerja yang baik, sementara Papua Barat memperlihatkan kinerja yang buruk.

Terlepas dari adanya perbedaan yang signifikan antara nilai IPR yang memasukkan dimensi kualitas lingkungan hidup dan IPR tanpa dimensi kualitas lingkungan hidup, kinerja pembangunan setiap wilayah dapat dievaluasi dengan melihat kinerja pembangunan pada setiap dimensi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dimensi pembangunan mana yang telah mengalami kemajuan dan dimensi pembangunan mana yang belum maju. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya menekankan pada beberapa dimensi tertentu saja (ekonomi, sosial, infrastruktur dan pelayanan publik, dan TIK), tetapi juga memperhatikan pembangunan dimensi lingkungan hidup, serta bagaimana menyelaraskan pembangunan pada dimensi tertentu dengan pembangunan lingkungan hidup, karena dalam banyak kasus percepatan pembangunan di bidang ekonomi, misalnya, berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup. Keterkaitan antara dimensi pembangunan kualitas lingkungan

hidup dengan dimensi pembangunan lain dapat dilihat pada bahasan selanjutnya.

5.7. Keterkaitan Antar Dimensi IPR

Terkait dengan hasil analisis IPR, kiranya perlu dilihat keterkaitan antara IPR dengan setiap dimensi pembentuknya dan juga keterkaitan antar dimensi pembentuk IPR. Tabel 5.7 menyajikan nilai koefisien korelasi antar IPR dan dimensi IPR tahun 2009. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai korelasi yang cukup kuat antara IPR dengan dimensi pembentuk IPR ditunjukkan oleh indeks dimensi infrastruktur dan pelayanan publik diikuti oleh indeks dimensi teknologi, informasi dan komunikasi, indeks dimensi ekonomi dan indeks dimensi sosial. Nilai korelasi terendah ditunjukkan oleh indeks dimensi kualitas lingkungan hidup. Dengan kata lain, kinerja pembangunan regional suatu wilayah utamanya ditentukan oleh keempat dimensi yang menunjukkan korelasi yang kuat, sementara dimensi kualitas lingkungan hidup sedikit pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan regional. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa dimensi kualitas lingkungan hidup tidak penting dalam pengukuran kinerja pembangunan. Pembangunan yang tercipta seharusnya menghasilkan suatu keselarasan pembangunan dalam setiap dimensi.

Jika melihat keterkaitan antar dimensi penyusun IPR, hubungan positif yang cukup kuat antar dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur dan pelayanan publik, dan dimensi teknologi informasi dan komunikasi mengindikasikan adanya keselarasan antar dimensi-dimensi pembangunan tersebut. Akan tetapi, keempat dimensi pembangunan tersebut memiliki korelasi yang sangat lemah atau tidak menunjukkan adanya hubungan korelasi dan bahkan berkorelasi secara negatif dengan dimensi lingkungan hidup. Dengan kata lain pembangunan pada dimensi-dimensi tersebut belum sejalan atau tidak memperhatikan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Hasil

korelasi yang negatif antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan hidup juga mengindikasikan bahwa pembangunan di bidang ekonomi mengabaikan aspek lingkungan hidup.

Tabel 5.7. Nilai Koefisien Korelasi antar Dimensi IPR, 2009

	IPR	IPE	IPS	IPIP	IPKLH	IPTIK
IPR	1	0,83	0,77	0,91	0,18	0,89
IPE	0,83	1	0,60	0,72	-0,24	0,86
IPS	0,77	0,60	1	0,66	-0,09	0,74
IPIP	0,91	0,72	0,66	1	0,05	0,82
IPKLH	0,18	-0,24	-0,09	0,05	1	-0,2
IPTIK	0,89	0,86	0,74	0,82	-0,2	1

Catatan: IPR = Indeks Pembangunan Regional
 IPE = Indeks Pembangunan Ekonomi
 IPS = Indeks Pembangunan Sosial
 IPIP = Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Pelayan Publik
 IPKLH = Indeks Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup
 IPTIK = Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.8. Keterkaitan IPR dengan Indikator Pembangunan Lain

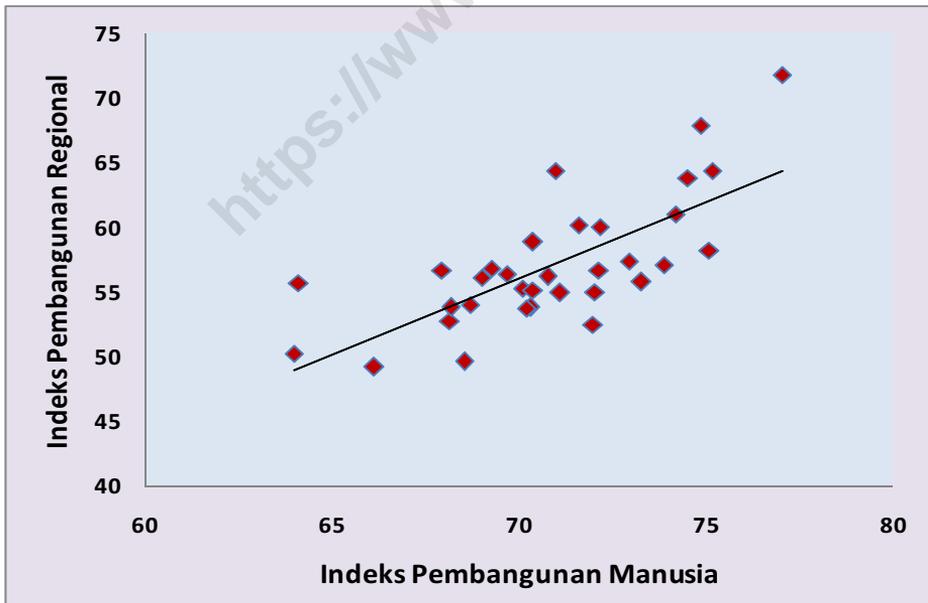
Kiranya menarik untuk melihat keterkaitan antara IPR dengan ukuran pembangunan lain seperti IPM dan pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara IPR dengan kedua ukuran tersebut dikaji pada pembahasan berikut.

Hubungan antara IPR dan IPM

Gambar di bawah ini memperlihatkan hubungan antara Indeks Pembangunan Regional (IPR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambar tersebut jelas menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara IPR dan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum ada kecenderungan bahwa semakin tinggi nilai IPM suatu daerah semakin tinggi pula nilai IPRnya. Meskipun demikian, hubungan antara keduanya terlihat tidak sangat kuat seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi r sebesar 0.72. Hal ini disebabkan karena IPR mencakup beberapa dimensi pembangunan yang tidak terukur secara langsung oleh IPM.

Hubungan antara IPM dengan beberapa dimensi pembangunan disajikan pada Tabel 5.8. Dari lima dimensi pembentuk IPR, hampir semua dimensi menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai $r > 0,5$, kecuali dimensi kualitas lingkungan hidup yang tidak memperlihatkan adanya keterkaitan, bahkan nilai koefisien bertanda negatif. Dari kelima dimensi pembentuk IPR, dimensi teknologi, informasi dan komunikasi menunjukkan hubungan yang paling kuat dengan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan teknologi informasi dan komunikasi tergantung pada tingkat kemampuan sumber daya manusia, khususnya pendidikan. Pembangunan di Indonesia juga yang belum banyak menyentuh bidang kualitas lingkungan hidup juga terindikasi pada tidak adanya hubungan antara IPR dimensi kualitas lingkungan hidup dengan IPM.

Gambar 5.8. Hubungan antara IPR dan IPM, 2009



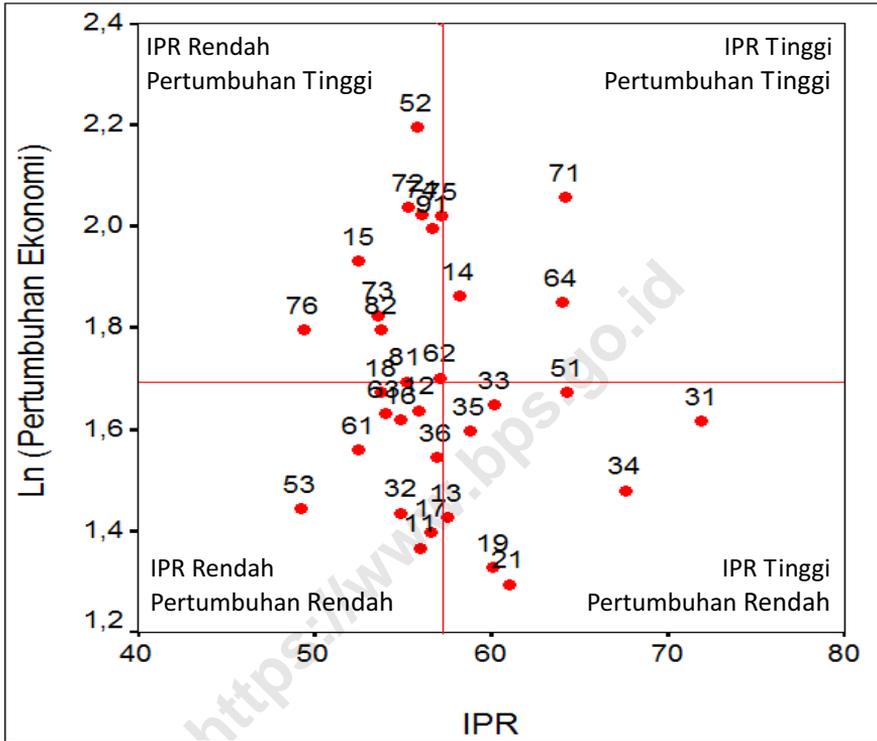
Tabel 5.8. Koefisien Korelasi antara IPM dan Dimensi IPR, 2009

Dimensi IPR	IPM
IPR Total	0,72
IPR Dimensi Ekonomi	0,63
IPR Dimensi Sosial	0,69
IPR Dimensi Infrastruktur & Pelayanan Publik	0,63
IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup	-0,08
IPR Dimensi Informasi Komunikasi dan Teknologi	0,77

Hubungan antara IPR dengan Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 5.9 berikut menyajikan plot antara IPR dan pertumbuhan ekonomi. Pada gambar tersebut jelas terlihat bahwa tidak ada jaminan provinsi dengan nilai IPR yang tinggi, angka pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Jika plot antara IPR dan pertumbuhan ekonomi dibuat menjadi empat kuadran, maka seluruh provinsi yang ada dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu: kelompok dengan nilai IPR tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi, kelompok dengan nilai IPR rendah tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi, kelompok dengan nilai rendah pada IPR dan pertumbuhan ekonomi, dan kelompok dengan nilai IPR tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya rendah. Hasil pengelompokan dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Gambar 5.9. Plot antara IPR dan pertumbuhan ekonomi, 2009



Catatan: Angka yang menempel pada setiap titik menunjukkan kode provinsi. Nama provinsi untuk setiap kode dapat dilihat pada Tabel lampiran. Penentuan tinggi atau rendah didasarkan pada angka rata-rata provinsi. Jika nilainya di atas rata-rata provinsi, maka dikatakan tinggi dan sebaliknya.

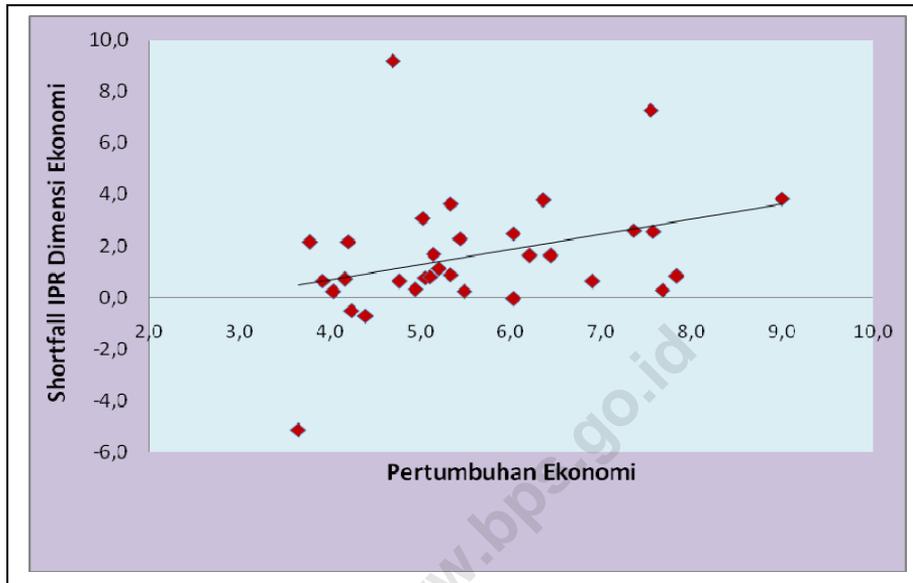
Tabel 5.9. Pengelompokan Provinsi menurut IPR dan Pertumbuhan Ekonomi

IPR Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi	IPR Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Riau Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo	Jambi Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua
IPR Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Rendah	IPR Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Rendah
Aceh Sumatera Utara Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Barat Banten Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Maluku	Sumatera Barat Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Kalimantan Tengah

Catatan: Kategori tinggi dan rendah berdasarkan nilai rata-rata provinsi. Jika nilainya di atas nilai rata-rata maka dikategorikan tinggi, dan sebaliknya.

Hubungan antara IPR dan pertumbuhan ekonomi mungkin akan lebih jelas terlihat dengan melakukan analisis hubungan antara perubahan IPR Dimensi Ekonomi (diukur dengan reduksi *shortfall*) dengan pertumbuhan ekonomi. Analisis hubungan ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang tercipta berhasil meningkatkan nilai capaian IPR khususnya pada dimensi ekonomi. Dari Gambar 5.10 terlihat bahwa variasi antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan IPR Dimensi Ekonomi terlihat sangat tinggi. Meskipun demikian secara umum terlihat ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan IPR Dimensi Ekonomi. Di beberapa provinsi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan peningkatan IPR Dimensi Ekonomi yang tinggi pula, tetapi di beberapa provinsi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan yang tinggi pada IPR Dimensi Ekonomi.

Gambar 5.10. Hubungan antara Reduksi Shortfall IPR Dimensi Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi, 2008-2009



Catatan: Reduksi shortfall menyatakan persentase perubahan (capaian) dari nilai IPR selama periode tertentu terhadap nilai ideal IPR. Nilai ideal=100. Reduksi shortfall diformulasikan sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{(IPR_{t+n} - IPR_t) \times 100}{(IPR_{ideal} - IPR_t)} \right]^{1/n}$$

6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Indeks Pembangunan Regional (IPR) yang disusun dalam kajian lanjutan ini merupakan sebuah ukuran alternatif kinerja pembangunan yang selama ini didominasi oleh IPM. Penyusunan IPR dalam kajian ini didasarkan pada lima dimensi pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur dan pelayanan publik, dimensi kualitas lingkungan hidup, dan dimensi teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa kesimpulan dan ringkasan hasil penyusunan IPR adalah sebagai berikut:

- Secara umum hasil penyusunan IPR dalam kajian lanjutan ini mampu mengukur kinerja pembangunan antar waktu secara absolut dan membandingkan kinerja pembangunan antar wilayah.
- IPR yang dihasilkan selain dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pembangunan secara umum, juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pada berbagai dimensi pembangunan.
- Lima provinsi dengan kinerja ekonomi terbaik pada tahun 2009 adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, DI Yogyakarta, dan Bali, sementara lima provinsi dengan kinerja ekonomi terburuk adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

- Kinerja pembangunan bidang sosial tertinggi tercatat di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Jawa Timur, sedangkan yang terendah tercatat di Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.
- Provinsi-provinsi dengan peringkat tertinggi pada pembangunan di bidang infrastruktur dan pelayanan publik adalah berturut-turut DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali dan Kepulauan Riau, sementara peringkat terendah diduduki oleh Sulawesi Barat diikuti oleh Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Kalimantan Tengah.
- Di bidang kualitas lingkungan hidup, peringkat tertinggi diduduki oleh Papua Barat diikuti oleh Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat, sedang peringkat terendah diduduki oleh Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Banten.
- Kinerja tertinggi dalam pembangunan dimensi teknologi informasi dan komunikasi yang juga merupakan salah satu komponen IPR juga didominasi provinsi-provinsi yang mendominasi berbagai bidang pembangunan selain dimensi kualitas lingkungan hidup, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Bali, sedangkan terendah tercatat di Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.
- Hasil analisis kinerja pembangunan regional secara umum yang diukur berdasarkan IPR gabungan seluruh dimensi menempatkan DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur sebagai lima provinsi dengan kinerja tertinggi. Sementara kinerja pembangunan regional terendah tercatat di Nusa Tenggara Timur diikuti oleh Sulawesi Barat, Papua, Jambi dan Kalimantan Barat.
- Sementara itu jika IPR disusun dengan tidak memasukkan dimensi kualitas lingkungan hidup, hampir tidak ada perubahan pada lima provinsi teratas

kecuali posisi Sulawesi Utara yang digantikan oleh Kepulauan Riau yang saling bertukar tempat, sementara untuk posisi terbawah Maluku Utara masuk ke dalam lima terendah menggantikan posisi Jambi.

- Terkait dengan keterbatasan khususnya dalam penyediaan beberapa indikator kualitas lingkungan hidup yang datanya sangat tergantung pada instansi lain berdasarkan pengukuran di lapangan dan belum diketahui keberlanjutan pengumpulannya setiap tahun, penyusunan IPR yang hanya didasarkan pada 4 dimensi tanpa memasukan dimensi kualitas lingkungan hidup mungkin akan lebih realistis karena bisa terjamin kepastiannya dalam mengukur kinerja pembangunan antar waktu, sementara kinerja pembangunan lingkungan hidup mungkin lebih baik diukur secara terpisah. Dalam kajian ini IPR telah dibedakan menjadi dua yaitu IPR dengan memasukkan semua dimensi pembangunan dan IPR tanpa memasukkan dimensi kualitas lingkungan hidup yang hasilnya telah disebutkan di atas.

6.2. Kegunaan IPR dalam Perumusan Kebijakan

IPR dapat digunakan dalam dua hal. Pertama, IPR dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pembangunan regional secara keseluruhan antar wilayah (provinsi) dan antar waktu secara konsisten. Kedua, IPR hasil kajian lanjutan ini dapat digunakan sebagai *starting point* untuk mendiagnosa perubahan yang terjadi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan IPR, pemerintah daerah dapat memonitor dampak dan hasil pembangunan yang telah dilakukan. Kemajuan pembangunan di suatu wilayah pada setiap aspek pembangunan dapat dilihat dan dianalisa aspek mana yang cepat perkembangannya dan aspek mana yang lambat kemajuannya. Dengan melihat perkembangan secara keseluruhan dan perkembangan pada setiap dimensi pembangunan, pengambil kebijakan dapat dengan mudah menentukan perlakuan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemajuan di bidang yang masih tertinggal.

Karena IPR ini dibangun utamanya berdasarkan indikator *output* dan *outcome*, maka jelas hasil IPR dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang berorientasi pada hasil-hasil pembangunan (*output and outcome oriented*). Selain itu hasil IPR yang disajikan baik dalam bentuk indeks keseluruhan (menggabungkan seluruh dimensi) maupun secara parsial (indeks untuk setiap dimensi), akan dengan mudah membantu pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan khususnya dalam alokasi anggaran. Dengan demikian akan tercipta adanya hubungan langsung (*direct linkage*) antara kinerja dan pendanaan.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN 1. NILAI INDEKS MENURUT DIMENSI PEMBANGUNAN

Indeks Dimensi Ekonomi 2008

Kode	Propinsi	Subdimensi Ekonomi			Ekonomi
		Pendapatan dan Urbanisasi	Ketenagakerjaan	Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi, dan Struktur Ekonomi	
11	Aceh	33,33	45,80	28,22	35,78
12	Sumatera Utara	41,19	48,96	38,00	42,71
13	Sumatera Barat	36,84	45,08	37,72	39,88
14	Riau	51,50	49,80	27,63	42,98
15	Jambi	35,89	44,87	28,60	36,45
16	Sumatera Selatan	38,59	42,00	31,45	37,35
17	Bengkulu	35,36	46,79	29,76	37,30
18	Lampung	31,91	42,57	33,27	35,92
19	Kep. Bangka Belitung	42,89	51,77	36,36	43,67
21	Kepulauan Riau	49,47	72,07	57,88	59,81
31	DKI Jakarta	72,43	73,38	75,67	73,83
32	Jawa Barat	45,01	58,12	35,24	46,12
33	Jawa Tengah	41,19	48,56	35,94	41,90
34	D.I, Yogyakarta	47,43	55,71	54,35	52,50
35	Jawa Timur	42,77	50,00	38,52	43,76
36	Banten	44,96	55,70	46,00	48,89
51	Bali	44,50	54,93	50,52	49,98
52	Nusa Tenggara Barat	38,18	34,77	36,10	36,35
53	Nusa Tenggara Timur	26,36	34,55	31,18	30,70
61	Kalimantan Barat	33,26	48,00	42,27	41,18
62	Kalimantan Tengah	36,71	47,08	54,54	46,11
63	Kalimantan Selatan	38,96	43,69	34,66	39,10
64	Kalimantan Timur	65,97	62,50	17,18	48,55
71	Sulawesi Utara	39,06	47,38	41,62	42,69
72	Sulawesi Tengah	30,72	41,35	31,89	34,65
73	Sulawesi Selatan	35,18	40,96	37,27	37,80
74	Sulawesi Tenggara	30,38	38,76	37,49	35,54
75	Gorontalo	32,91	43,67	44,13	40,24
76	Sulawesi Barat	34,39	33,78	27,51	31,90
81	Maluku	29,61	43,05	28,48	33,72
82	Maluku Utara	29,96	42,14	23,60	31,90
91	Papua Barat	30,22	49,88	35,70	38,60
92	Papua	32,76	46,64	31,76	37,05

Indeks Dimensi Sosial 2008

Kode	Propinsi	Subdimensi Sosial				Sosial
		Pendidikan	Kesehatan	Kependudukan	Sosial Lainnya	
11	Aceh	73,29	75,90	71,13	83,21	75,88
12	Sumatera Utara	71,45	77,02	69,47	88,00	76,48
13	Sumatera Barat	71,22	77,56	73,16	86,16	77,03
14	Riau	71,69	80,15	67,52	86,25	76,40
15	Jambi	67,78	79,31	77,08	85,70	77,47
16	Sumatera Selatan	66,46	79,20	81,42	82,47	77,39
17	Bengkulu	68,69	80,24	81,74	80,57	77,81
18	Lampung	65,22	80,64	82,61	86,63	78,77
19	Kep. Bangka Belitung	62,63	78,83	88,37	86,90	79,18
21	Kepulauan Riau	68,03	80,80	60,89	86,87	74,15
31	DKI Jakarta	76,61	84,35	100,00	87,75	87,18
32	Jawa Barat	65,01	79,52	85,75	85,57	78,96
33	Jawa Tengah	66,17	79,50	96,05	86,80	82,13
34	D,I, Yogyakarta	72,46	84,83	100,00	87,16	86,11
35	Jawa Timur	67,88	82,92	100,00	87,59	84,60
36	Banten	64,42	77,56	72,57	85,62	75,04
51	Bali	69,00	81,52	100,00	92,89	85,85
52	Nusa Tenggara Barat	63,74	76,08	69,70	82,53	73,01
53	Nusa Tenggara Timur	61,02	74,75	55,62	84,09	68,87
61	Kalimantan Barat	63,19	75,25	71,14	88,39	74,49
62	Kalimantan Tengah	67,31	79,80	85,03	91,01	80,79
63	Kalimantan Selatan	64,77	75,06	87,67	87,52	78,75
64	Kalimantan Timur	72,34	82,29	76,59	87,97	79,80
71	Sulawesi Utara	70,02	80,72	100,00	91,12	85,47
72	Sulawesi Tengah	64,60	74,15	75,60	88,46	75,70
73	Sulawesi Selatan	66,04	77,68	82,22	87,05	78,25
74	Sulawesi Tenggara	66,51	78,00	58,05	86,54	72,28
75	Gorontalo	61,42	75,13	86,71	84,34	76,90
76	Sulawesi Barat	63,35	72,56	78,91	86,63	75,36
81	Maluku	72,37	73,06	66,15	82,57	73,54
82	Maluku Utara	69,60	72,21	64,09	89,72	73,90
91	Papua Barat	63,11	77,15	68,14	74,56	70,74
92	Papua	63,26	70,96	67,42	73,93	68,89

Indeks Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2008

Kode	Propinsi	Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik			Infrastruktur dan Pelayanan Publik
		Pendidikan	Kesehatan	Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lainnya	
11	Aceh	73,57	55,65	61,62	63,61
12	Sumatera Utara	68,24	60,82	66,37	65,14
13	Sumatera Barat	82,53	59,15	73,97	71,88
14	Riau	86,19	49,20	45,57	60,32
15	Jambi	88,80	46,60	50,04	61,81
16	Sumatera Selatan	73,41	46,33	56,87	58,87
17	Bengkulu	67,99	58,53	62,14	62,89
18	Lampung	69,92	36,51	61,82	56,08
19	Kep. Bangka Belitung	79,58	49,28	79,47	69,44
21	Kepulauan Riau	83,85	67,22	68,66	73,24
31	DKI Jakarta	62,01	76,26	93,09	77,12
32	Jawa Barat	55,43	40,02	92,17	62,54
33	Jawa Tengah	64,47	51,57	87,88	67,97
34	D.I. Yogyakarta	79,15	74,37	87,70	80,41
35	Jawa Timur	69,75	49,58	91,00	70,11
36	Banten	62,92	36,39	72,23	57,18
51	Bali	65,28	73,05	95,66	78,00
52	Nusa Tenggara Barat	74,63	33,04	72,89	60,19
53	Nusa Tenggara Timur	85,92	36,30	44,02	55,41
61	Kalimantan Barat	70,48	41,71	46,78	52,99
62	Kalimantan Tengah	98,82	43,92	41,55	61,43
63	Kalimantan Selatan	85,52	48,68	57,21	63,80
64	Kalimantan Timur	74,33	64,79	59,68	66,26
71	Sulawesi Utara	79,88	74,02	66,54	73,48
72	Sulawesi Tengah	97,39	43,00	65,31	68,57
73	Sulawesi Selatan	84,20	50,66	62,63	65,83
74	Sulawesi Tenggara	84,45	39,23	49,60	57,76
75	Gorontalo	90,13	43,59	52,06	61,93
76	Sulawesi Barat	82,42	27,54	52,86	54,27
81	Maluku	87,65	50,10	61,40	66,38
82	Maluku Utara	87,41	41,38	56,16	61,65
91	Papua Barat	90,21	72,55	43,31	68,69
92	Papua	77,67	51,98	49,25	59,63

Indeks Dimensi Lingkungan Hidup 2008

Kode	Propinsi	Subdimensi Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup
		Pencemaran Air/Tanah	Pencemaran Udara	
11	Aceh	54,87	98,10	76,49
12	Sumatera Utara	65,14	61,81	63,48
13	Sumatera Barat	60,23	66,80	63,51
14	Riau	56,53	92,49	74,51
15	Jambi	63,73	57,79	60,76
16	Sumatera Selatan	62,80	80,68	71,74
17	Bengkulu	47,49	96,98	72,23
18	Lampung	63,70	75,31	69,51
19	Kep. Bangka Belitung	50,62	92,90	71,76
21	Kepulauan Riau	58,10	57,55	57,82
31	DKI Jakarta	62,13	71,78	66,96
32	Jawa Barat	51,48	54,21	52,84
33	Jawa Tengah	58,08	95,75	76,92
34	D.I, Yogyakarta	61,87	86,48	74,18
35	Jawa Timur	53,65	79,18	66,41
36	Banten	56,01	62,53	59,27
51	Bali	61,25	74,27	67,76
52	Nusa Tenggara Barat	60,64	95,88	78,26
53	Nusa Tenggara Timur	47,65	98,47	73,06
61	Kalimantan Barat	44,75	83,53	64,14
62	Kalimantan Tengah	51,05	96,85	73,95
63	Kalimantan Selatan	55,37	61,21	58,29
64	Kalimantan Timur	61,56	96,87	79,21
71	Sulawesi Utara	62,32	97,67	80,00
72	Sulawesi Tengah	54,77	98,65	76,71
73	Sulawesi Selatan	54,72	56,92	55,82
74	Sulawesi Tenggara	63,18	99,01	81,10
75	Gorontalo	62,31	77,32	69,81
76	Sulawesi Barat	72,15	57,84	64,99
81	Maluku	57,49	91,45	74,47
82	Maluku Utara	60,23	90,48	75,36
91	Papua Barat	69,39	95,94	82,67
92	Papua	50,29	96,35	73,32

Indeks Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2008

Kode	Propinsi	Subdimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi			Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
		Informasi	Teknologi	Komunikasi	
11	Aceh	44,78	25,63	7,22	25,88
12	Sumatera Utara	45,63	34,06	8,40	29,36
13	Sumatera Barat	44,80	47,64	12,37	34,93
14	Riau	48,78	42,60	12,82	34,73
15	Jambi	39,86	36,45	7,49	27,94
16	Sumatera Selatan	43,93	31,60	9,03	28,19
17	Bengkulu	40,74	32,51	11,60	28,28
18	Lampung	42,63	29,98	5,25	25,96
19	Kep. Bangka Belitung	52,02	46,60	10,79	36,47
21	Kepulauan Riau	56,03	56,45	12,75	41,74
31	DKI Jakarta	64,49	67,86	29,61	53,98
32	Jawa Barat	49,14	39,66	11,61	33,47
33	Jawa Tengah	48,11	33,31	8,46	29,96
34	D.I, Yogyakarta	61,29	50,03	25,68	45,67
35	Jawa Timur	47,08	36,00	10,31	31,13
36	Banten	51,48	42,87	13,03	35,79
51	Bali	56,62	52,65	13,11	40,79
52	Nusa Tenggara Barat	39,60	36,23	6,13	27,32
53	Nusa Tenggara Timur	21,99	19,77	4,81	15,52
61	Kalimantan Barat	41,72	34,13	7,10	27,65
62	Kalimantan Tengah	42,02	31,20	7,34	26,85
63	Kalimantan Selatan	46,69	37,94	9,56	31,40
64	Kalimantan Timur	51,16	58,33	18,58	42,69
71	Sulawesi Utara	54,80	38,54	11,23	34,86
72	Sulawesi Tengah	40,46	31,02	6,07	25,85
73	Sulawesi Selatan	43,80	32,58	9,15	28,51
74	Sulawesi Tenggara	37,05	27,13	7,40	23,86
75	Gorontalo	48,54	25,41	10,09	28,01
76	Sulawesi Barat	39,79	27,44	5,24	24,16
81	Maluku	36,88	35,29	7,26	26,48
82	Maluku Utara	41,11	38,01	7,16	28,76
91	Papua Barat	33,09	24,12	9,26	22,16
92	Papua	26,71	16,38	8,04	17,04

Indeks Dimensi Ekonomi 2009

Kode	Propinsi	Subdimensi Ekonomi			Ekonomi
		Pendapatan dan Urbanisasi	Ketenagakerjaan	Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi, dan Struktur Ekonomi	
11	Aceh	33,42	40,76	34,42	36,20
12	Sumatera Utara	41,90	49,88	39,25	43,68
13	Sumatera Barat	37,27	44,44	39,22	40,31
14	Riau	53,34	49,76	28,61	43,90
15	Jambi	36,33	42,54	31,67	36,85
16	Sumatera Selatan	39,13	40,30	34,05	37,83
17	Bengkulu	35,56	45,10	31,67	37,44
18	Lampung	32,45	41,87	35,15	36,49
19	Kep, Bangka Belitung	43,33	53,13	38,19	44,88
21	Kepulauan Riau	50,21	73,00	50,02	57,74
31	DKI Jakarta	74,34	75,19	74,38	74,64
32	Jawa Barat	45,44	59,34	37,08	47,29
33	Jawa Tengah	41,62	48,69	37,35	42,55
34	D,I, Yogyakarta	47,80	53,40	55,28	52,16
35	Jawa Timur	43,42	49,21	39,18	43,94
36	Banten	45,27	65,13	50,36	53,59
51	Bali	45,40	56,77	53,24	51,80
52	Nusa Tenggara Barat	38,87	39,40	38,11	38,79
53	Nusa Tenggara Timur	26,39	31,73	32,93	30,35
61	Kalimantan Barat	33,92	48,62	42,11	41,55
62	Kalimantan Tengah	37,49	49,01	52,20	46,23
63	Kalimantan Selatan	39,60	43,36	35,83	39,60
64	Kalimantan Timur	63,36	66,51	21,62	50,50
71	Sulawesi Utara	39,90	47,21	42,39	43,17
72	Sulawesi Tengah	31,42	40,99	32,12	34,84
73	Sulawesi Selatan	35,95	39,99	40,50	38,81
74	Sulawesi Tenggara	30,99	38,26	42,34	37,20
75	Gorontalo	33,35	51,35	49,07	44,59
76	Sulawesi Barat	34,88	32,31	28,38	31,86
81	Maluku	30,29	46,16	29,25	35,23
82	Maluku Utara	30,33	44,92	25,53	33,59
91	Papua Barat	33,32	52,88	34,39	40,20
92	Papua	34,37	41,35	31,79	35,84

Indeks Dimensi Sosial 2009

Kode	Propinsi	Subdimensi Sosial				Sosial
		Pendidikan	Kesehatan	Kependudukan	Sosial Lainnya	
11	Aceh	74,05	77,37	72,33	83,21	76,74
12	Sumatera Utara	71,99	78,99	70,60	87,92	77,37
13	Sumatera Barat	71,65	79,57	74,58	86,16	77,99
14	Riau	72,09	81,31	67,83	86,36	76,90
15	Jambi	67,11	80,40	78,40	85,75	77,91
16	Sumatera Selatan	66,81	82,44	82,32	82,59	78,54
17	Bengkulu	69,66	81,31	82,40	80,63	78,50
18	Lampung	66,08	82,13	88,05	86,70	80,74
19	Kep. Bangka Belitung	64,38	79,12	85,03	86,77	78,83
21	Kepulauan Riau	70,06	81,07	61,90	86,92	74,99
31	DKI Jakarta	77,09	85,84	100,00	88,00	87,73
32	Jawa Barat	65,46	81,95	86,21	85,63	79,81
33	Jawa Tengah	64,59	84,40	96,85	86,85	83,17
34	D.I, Yogyakarta	74,14	86,87	100,00	87,15	87,04
35	Jawa Timur	66,28	82,00	100,00	87,65	83,98
36	Banten	66,32	79,43	73,67	85,73	76,29
51	Bali	69,04	83,81	100,00	93,03	86,47
52	Nusa Tenggara Barat	63,36	79,42	70,80	82,57	74,04
53	Nusa Tenggara Timur	61,34	76,13	56,90	84,16	69,63
61	Kalimantan Barat	62,85	77,92	72,23	88,58	75,40
62	Kalimantan Tengah	67,50	81,90	85,72	91,04	81,54
63	Kalimantan Selatan	64,98	77,88	89,20	87,63	79,92
64	Kalimantan Timur	72,07	84,24	78,05	87,97	80,58
71	Sulawesi Utara	70,09	83,03	100,00	91,07	86,05
72	Sulawesi Tengah	66,12	75,69	76,96	88,58	76,84
73	Sulawesi Selatan	64,67	80,18	83,05	87,03	78,73
74	Sulawesi Tenggara	68,47	79,00	59,06	86,54	73,27
75	Gorontalo	64,27	77,81	88,28	84,20	78,64
76	Sulawesi Barat	61,30	75,54	80,26	86,63	75,93
81	Maluku	73,29	74,80	67,78	82,54	74,60
82	Maluku Utara	70,30	76,25	66,12	89,80	75,62
91	Papua Barat	69,17	79,10	69,28	74,46	73,00
92	Papua	54,60	74,29	68,73	73,83	67,86

Indeks Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2009

Kode	Propinsi	Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik			Infrastruktur dan Pelayanan Publik
		Pendidikan	Kesehatan	Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lainnya	
11	Aceh	73,62	56,32	58,59	62,84
12	Sumatera Utara	63,93	61,27	69,47	64,89
13	Sumatera Barat	73,69	59,45	77,90	70,34
14	Riau	75,43	49,17	58,97	61,19
15	Jambi	77,23	46,04	56,33	59,87
16	Sumatera Selatan	66,39	47,91	60,06	58,12
17	Bengkulu	69,45	59,99	61,01	63,48
18	Lampung	69,23	37,89	61,10	56,07
19	Kep. Bangka Belitung	76,32	49,89	80,28	68,83
21	Kepulauan Riau	77,60	64,61	79,23	73,81
31	DKI Jakarta	65,42	76,33	98,56	80,10
32	Jawa Barat	50,67	41,61	90,05	60,78
33	Jawa Tengah	63,62	51,69	89,21	68,17
34	D.I. Yogyakarta	75,42	74,07	89,84	79,78
35	Jawa Timur	63,71	49,90	91,35	68,32
36	Banten	69,61	37,83	80,31	62,58
51	Bali	59,75	73,10	93,47	75,44
52	Nusa Tenggara Barat	72,49	33,64	77,23	61,12
53	Nusa Tenggara Timur	81,75	37,96	45,64	55,12
61	Kalimantan Barat	72,73	41,33	50,10	54,72
62	Kalimantan Tengah	80,67	44,74	44,38	56,60
63	Kalimantan Selatan	79,82	49,05	54,65	61,17
64	Kalimantan Timur	72,89	66,18	66,97	68,68
71	Sulawesi Utara	92,33	75,30	64,13	77,25
72	Sulawesi Tengah	82,18	44,46	58,91	61,85
73	Sulawesi Selatan	75,07	52,44	66,93	64,81
74	Sulawesi Tenggara	95,45	37,79	52,65	61,96
75	Gorontalo	86,10	44,91	54,96	61,99
76	Sulawesi Barat	73,81	30,34	45,30	49,82
81	Maluku	81,47	50,33	59,39	63,73
82	Maluku Utara	78,80	44,72	47,30	56,94
91	Papua Barat	76,51	71,66	42,78	63,65
92	Papua	77,25	53,10	41,20	57,18

Indeks Dimensi Lingkungan Hidup 2009

Kode	Propinsi	Subdimensi Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup
		Pencemaran Air/Tanah	Pencemaran Udara	
11	Aceh	57,27	98,10	77,69
12	Sumatera Utara	66,54	61,81	64,18
13	Sumatera Barat	61,24	66,80	64,02
14	Riau	56,86	92,49	74,68
15	Jambi	64,02	57,79	60,91
16	Sumatera Selatan	64,06	80,68	72,37
17	Bengkulu	50,22	96,98	73,60
18	Lampung	64,24	75,31	69,78
19	Kep. Bangka Belitung	53,06	92,90	72,98
21	Kepulauan Riau	59,06	57,55	58,30
31	DKI Jakarta	62,79	71,78	67,29
32	Jawa Barat	53,54	54,21	53,87
33	Jawa Tengah	59,73	95,75	77,74
34	D.I, Yogyakarta	63,00	86,48	74,74
35	Jawa Timur	54,84	79,18	67,01
36	Banten	56,37	62,53	59,45
51	Bali	62,30	74,27	68,28
52	Nusa Tenggara Barat	61,06	95,88	78,47
53	Nusa Tenggara Timur	47,12	98,47	72,80
61	Kalimantan Barat	45,63	83,53	64,58
62	Kalimantan Tengah	51,73	96,85	74,29
63	Kalimantan Selatan	56,87	61,21	59,04
64	Kalimantan Timur	63,19	96,87	80,03
71	Sulawesi Utara	64,79	97,67	81,23
72	Sulawesi Tengah	55,54	98,65	77,09
73	Sulawesi Selatan	57,02	56,92	56,97
74	Sulawesi Tenggara	64,69	99,01	81,85
75	Gorontalo	65,04	77,32	71,18
76	Sulawesi Barat	74,01	57,84	65,92
81	Maluku	59,94	91,45	75,70
82	Maluku Utara	60,32	90,48	75,40
91	Papua Barat	72,27	95,94	84,11
92	Papua	51,12	96,35	73,73

Indeks Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2009

Kode	Propinsi	Subdimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi			Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
		Informasi	Teknologi	Komunikasi	
11	Aceh	42,87	29,43	7,98	26,76
12	Sumatera Utara	42,21	37,85	8,40	29,49
13	Sumatera Barat	41,14	50,41	12,37	34,64
14	Riau	44,94	44,48	12,82	34,08
15	Jambi	35,79	37,44	7,49	26,91
16	Sumatera Selatan	40,12	33,49	9,05	27,55
17	Bengkulu	41,11	37,72	11,60	30,14
18	Lampung	37,49	34,89	5,25	25,88
19	Kep. Bangka Belitung	45,70	47,84	10,79	34,78
21	Kepulauan Riau	49,46	57,99	12,75	40,07
31	DKI Jakarta	51,31	68,48	29,61	49,80
32	Jawa Barat	42,74	43,92	11,61	32,76
33	Jawa Tengah	41,78	37,35	8,46	29,20
34	D.I, Yogyakarta	53,73	53,49	25,68	44,30
35	Jawa Timur	42,57	39,62	10,31	30,83
36	Banten	41,23	44,02	13,03	32,76
51	Bali	49,36	55,48	13,11	39,32
52	Nusa Tenggara Barat	33,91	39,62	6,13	26,55
53	Nusa Tenggara Timur	26,32	22,47	4,81	17,87
61	Kalimantan Barat	36,34	35,92	7,10	26,46
62	Kalimantan Tengah	37,75	35,40	7,34	26,83
63	Kalimantan Selatan	40,73	40,97	9,56	30,42
64	Kalimantan Timur	42,92	59,52	18,58	40,34
71	Sulawesi Utara	47,50	41,92	11,23	33,55
72	Sulawesi Tengah	37,51	33,90	6,07	25,83
73	Sulawesi Selatan	39,60	37,67	9,15	28,80
74	Sulawesi Tenggara	38,16	32,71	7,40	26,09
75	Gorontalo	47,05	31,34	10,09	29,49
76	Sulawesi Barat	34,78	30,80	5,24	23,61
81	Maluku	33,34	39,08	7,26	26,56
82	Maluku Utara	36,38	38,88	7,16	27,47
91	Papua Barat	31,71	26,90	9,26	22,62
92	Papua	21,89	17,20	8,04	15,71

LAMPIRAN 2. DATA DAN INDIKATOR

Dimensi Ekonomi 2008

Kode	Propinsi	Pendapatan dan Urbanisasi			Ketenagakerjaan			Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi, dan Struktur Ekonomi		
		Daya Beli (PPP ribu rupiah)	PDRB per Kapita dalam PPP (ribu rupiah)	Penduduk Perkotaan (%)	Pekerja Sektor Formal (%)	Penduduk Bekerja >35 Jam (%)	Pekerja dengan Upah >UMR (%)	Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB (%)
11	Aceh	605,6	17124,4	28,80	35,61	62,46	57,01	7,89	15,9	35,01
12	Sumatera Utara	630,0	16402,9	46,10	38,26	69,32	53,00	15,66	20,0	44,69
13	Sumatera Barat	631,5	14825,3	34,30	31,55	65,59	54,13	11,07	17,7	53,34
14	Riau	638,3	53265,0	50,40	43,89	64,04	58,05	14,65	22,2	13,58
15	Jambi	628,3	14724,7	32,40	35,63	62,49	53,85	11,00	15,1	34,27
16	Sumatera Selatan	623,5	18721,5	38,70	29,98	58,23	57,99	11,35	22,0	27,70
17	Bengkulu	625,7	8832,9	35,20	23,38	65,11	70,18	9,10	10,6	48,43
18	Lampung	615,0	10078,4	27,00	26,70	62,85	56,00	11,37	18,2	40,22
19	Kep. Bangka Belitung	636,1	19174,1	47,80	45,67	66,54	58,37	11,53	26,2	32,22
21	Kepulauan Riau	637,7	40318,7	52,90	67,14	83,59	72,58	22,79	48,4	33,34
31	DKI Jakarta	625,7	74064,9	100,00	76,66	88,09	58,34	55,25	35,8	71,28
32	Jawa Barat	626,8	14719,4	58,80	43,10	72,69	72,28	21,31	17,9	35,40
33	Jawa Tengah	633,6	11124,1	48,60	37,82	67,76	54,80	18,14	18,5	39,48
34	D.I. Yogyakarta	643,2	10985,2	64,30	44,52	72,84	62,35	17,39	34,1	58,23
35	Jawa Timur	636,6	16687,1	48,90	36,46	65,16	65,52	18,25	17,9	47,56
36	Banten	625,5	12756,2	60,20	52,84	75,69	47,86	27,42	27,2	38,95
51	Bali	626,6	14198,7	57,70	42,33	67,27	71,60	24,58	21,8	64,92
52	Nusa Tenggara Barat	633,6	8080,6	41,90	25,47	55,11	44,33	10,07	25,1	35,35
53	Nusa Tenggara Timur	599,9	4771,4	17,97	16,21	51,18	60,96	6,51	13,4	49,34
61	Kalimantan Barat	624,7	11394,0	27,80	27,84	62,98	72,55	8,39	29,6	44,55
62	Kalimantan Tengah	628,6	15767,4	34,00	29,84	69,79	55,80	7,10	44,8	48,32
63	Kalimantan Selatan	630,8	13276,2	41,50	33,99	62,74	51,40	15,67	18,4	39,00
64	Kalimantan Timur	634,5	101533,7	62,20	51,87	75,55	71,90	9,05	11,3	13,48
71	Sulawesi Utara	625,6	12610,0	43,40	35,96	69,50	50,16	8,20	26,8	48,66
72	Sulawesi Tengah	622,3	11545,2	21,00	26,96	58,72	58,50	6,05	19,7	39,22
73	Sulawesi Selatan	630,8	10908,8	32,20	31,02	59,99	50,35	13,69	20,2	44,30
74	Sulawesi Tenggara	611,7	10700,3	23,00	25,65	56,29	55,45	7,03	24,7	43,07
75	Gorontalo	619,7	6075,6	31,30	35,90	67,26	41,59	6,99	27,4	55,46
76	Sulawesi Barat	625,0	7535,0	33,40	21,36	50,32	53,82	4,30	16,2	36,32
81	Maluku	605,0	4747,10	26,10	23,66	61,18	63,94	5,35	6,06	58,13
82	Maluku Utara	595,7	4018,7	29,70	24,54	56,40	67,85	5,34	8,4	40,45
91	Papua Barat	593,1	17081,8	22,80	37,71	65,72	62,74	1,84	32,7	27,79
92	Papua	599,7	26365,7	22,71	16,56	68,31	72,30	2,06	31,8	18,92

Dimensi Sosial 2008

Kode	Propinsi	Pendidikan					Kesehatan			
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	AMH	APS 7-12	APS 13-15	APS 16-18	Penduduk Usia 24+ Menamatkan PT (%)	Angka Harapan Hidup	Penduduk yang Tidak Mengalami Keluhan Kesehatan (%)	Balita Mendapat Imunisasi (%)
11	Aceh	8,3	95,9	99,03	94,15	72,73	9,18	68,5	78,3	78,4
12	Sumatera Utara	8,5	97,0	98,66	91,10	65,87	7,36	69,2	85,2	74,6
13	Sumatera Barat	8,3	96,7	98,07	88,70	65,73	9,48	69,0	82,0	79,2
14	Riau	8,5	97,8	98,36	91,83	64,11	8,25	71,1	84,3	81,2
15	Jambi	8,1	95,8	97,59	84,78	55,72	7,40	69,7	84,4	81,0
16	Sumatera Selatan	7,6	95,3	97,88	84,55	54,27	6,26	68,8	82,7	83,6
17	Bengkulu	7,6	97,1	98,38	87,42	58,64	8,44	69,2	79,7	88,5
18	Lampung	7,4	95,3	98,26	85,10	50,69	4,84	68,6	82,9	87,9
19	Kep. Bangka Belitung	7,8	94,6	96,76	79,71	47,31	1,26	69,4	82,3	81,9
21	Kepulauan Riau	7,2	93,6	98,31	91,10	64,62	4,87	69,0	84,1	86,6
31	DKI Jakarta	10,2	98,7	98,82	90,53	61,86	16,89	72,9	85,9	88,8
32	Jawa Barat	7,5	95,5	98,24	81,00	47,58	7,37	67,8	83,4	85,6
33	Jawa Tengah	7,7	95,2	98,83	84,27	53,36	5,36	64,6	84,6	89,7
34	D.I. Yogyakarta	6,9	89,2	99,62	92,91	72,46	15,49	71,1	85,4	93,6
35	Jawa Timur	8,7	89,5	98,63	86,54	58,14	5,68	73,1	83,4	86,6
36	Banten	7,0	87,3	97,75	81,28	50,35	10,03	69,1	84,4	77,0
51	Bali	7,8	86,9	98,45	88,07	63,36	10,23	70,6	77,4	91,8
52	Nusa Tenggara Barat	6,5	79,8	97,25	85,57	57,22	7,77	61,5	79,4	89,4
53	Nusa Tenggara Timur	6,4	87,7	93,72	77,76	49,67	6,28	67,0	69,0	85,6
61	Kalimantan Barat	6,6	88,5	97,08	84,50	50,73	5,84	66,3	81,2	77,7
62	Kalimantan Tengah	7,7	97,3	98,45	86,42	53,64	6,49	71,0	84,0	80,6
63	Kalimantan Selatan	7,4	95,1	97,48	79,68	50,30	6,95	63,1	83,2	80,7
64	Kalimantan Timur	8,7	96,4	98,35	90,78	64,71	10,38	70,8	84,4	87,6
71	Sulawesi Utara	8,7	99,1	97,87	88,46	56,84	7,37	72,0	74,7	89,5
72	Sulawesi Tengah	6,9	95,5	97,16	81,13	50,75	7,43	66,2	73,9	81,0
73	Sulawesi Selatan	7,8	95,7	95,71	78,99	52,29	9,18	66,1	84,4	82,2
74	Sulawesi Tenggara	7,3	86,5	97,66	85,62	59,17	9,01	69,6	76,2	84,4
75	Gorontalo	7,0	87,3	94,23	77,68	50,17	5,06	67,4	69,6	85,5
76	Sulawesi Barat	7,7	91,1	94,53	75,75	45,68	8,92	67,4	76,2	72,5
81	Maluku	8,5	97,3	97,52	91,20	71,95	7,73	67,0	78,2	72,9
82	Maluku Utara	7,9	95,4	96,80	89,20	63,39	8,18	65,4	72,4	78,0
91	Papua Barat	6,3	72,5	93,38	88,55	58,15	9,46	68,1	79,3	81,8
92	Papua	7,7	92,2	83,38	78,22	54,13	8,23	67,9	79,5	64,3

Dimensi Sosial 2008 (Lanjutan)

Kode	Propinsi	Kependudukan			Sosial Lainnya		
		Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Ketergantungan (%)	Fertilitas (TFR)	Rumah Tangga dengan Persepsi Tingkat Keamanan Baik dan Sangat Baik (%)	Penduduk yang Tidak Menjadi Korban Kejahatan (%)	Persentase Penduduk Tidak Miskin
11	Aceh	1,62	54,24	2,40	63,3	99,41	78,2
12	Sumatera Utara	1,58	55,52	2,46	66,6	99,18	88,5
13	Sumatera Barat	1,36	56,16	2,45	58,1	99,11	90,5
14	Riau	2,26	51,75	2,35	58,5	98,94	90,5
15	Jambi	1,65	50,15	2,29	55,6	99,11	91,2
16	Sumatera Selatan	1,42	51,52	2,20	54,8	98,64	83,7
17	Bengkulu	1,52	49,48	2,20	51,3	98,69	81,4
18	Lampung	1,36	50,15	2,27	73,6	98,65	79,8
19	Kep. Bangka Belitung	1,39	46,41	2,19	57,9	99,16	92,5
21	4,28	50,15	2,35	59,1	98,90	91,7	
31	DKI Jakarta	0,84	37,74	1,54	61,7	97,82	96,4
32	Jawa Barat	1,43	47,86	2,19	60,0	98,40	88,0
33	Jawa Tengah	0,73	47,93	2,02	70,8	98,83	82,3
34	D.I, Yogyakarta	0,96	38,12	1,39	72,0	98,30	82,8
35	Jawa Timur	0,52	40,45	1,67	72,3	98,69	83,3
36	Banten	1,88	51,52	2,29	55,0	98,19	92,4
51	Bali	1,00	42,65	1,68	77,6	98,90	94,9
52	Nusa Tenggara Barat	1,61	54,80	2,46	64,0	97,92	77,2
53	Nusa Tenggara Timur	1,88	60,35	2,84	69,9	97,88	76,7
61	Kalimantan Barat	1,65	52,91	2,45	65,6	98,79	90,7
62	Kalimantan Tengah	1,39	48,59	2,22	70,6	99,53	93,0
63	Kalimantan Selatan	1,44	46,56	2,17	60,5	98,20	94,9
64	Kalimantan Timur	2,27	46,20	2,23	61,9	99,07	92,3
71	Sulawesi Utara	0,95	43,47	1,91	75,5	98,64	90,2
72	Sulawesi Tengah	1,72	49,93	2,33	78,0	98,76	81,0
73	Sulawesi Selatan	1,33	51,06	2,28	64,6	99,07	87,7
74	Sulawesi Tenggara	2,09	57,98	2,65	71,2	99,07	81,1
75	Gorontalo	1,21	49,78	2,27	72,1	98,54	75,0
76	Sulawesi Barat	1,50	50,83	2,28	66,7	99,27	84,7
81	Maluku	1,42	58,23	2,70	70,0	98,75	71,8
82	Maluku Utara	1,60	57,73	2,65	71,1	99,01	89,6
91	Papua Barat	1,90	49,10	2,71	52,1	99,24	64,3
92	Papua	1,99	49,25	2,68	52,7	98,87	62,5

Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2008

Kode	Propinsi	Pendidikan			Kesehatan				
		Rasio Murid SD per Kelas SD	Rasio Murid SMP per Kelas SMP	Rasio Murid SMA per Kelas SMA	Tempat Tidur RS per 100,000 Penduduk	Puskesmas per 100,000 Penduduk	Dokter per 100,000 Penduduk	Balita dengan Kelahiran Ditolong Tenaga Medis (%)	Penduduk yang Berobat ke Tenaga Medis / Fasilitas Kesehatan (%)
11	Aceh	22,6	39,2	34,1	58,6	7,0	29,6	83,1	27,36
12	Sumatera Utara	27,6	36,5	37,3	85,7	3,8	26,0	86,5	33,65
13	Sumatera Barat	24,2	31,6	35,0	70,1	4,8	29,2	88,2	23,58
14	Riau	27,9	30,7	34,4	37,8	3,5	24,2	79,8	49,93
15	Jambi	25,3	31,0	33,4	46,4	5,7	21,9	69,2	37,12
16	Sumatera Selatan	24,7	36,0	35,7	52,2	3,9	16,0	76,4	31,69
17	Bengkulu	27,0	40,5	35,5	46,0	8,6	44,3	81,1	33,67
18	Lampung	27,7	38,3	35,8	33,3	3,4	12,1	74,2	25,22
19	Kep. Bangka Belitung	23,4	33,6	34,8	45,5	4,5	22,1	79,9	40,08
21	Kepulauan Riau	23,7	34,4	33,0	91,5	4,1	38,9	91,5	33,13
31	DKI Jakarta	33,4	36,5	35,5	151,5	3,8	43,9	97,1	61,71
32	Jawa Barat	33,7	36,5	37,8	35,7	2,4	17,0	65,7	41,06
33	Jawa Tengah	26,8	38,5	37,8	56,3	2,6	19,6	84,9	35,11
34	D,I, Yogyakarta	21,7	35,3	34,1	81,7	3,5	46,0	97,0	48,65
35	Jawa Timur	24,2	36,1	37,0	49,8	2,5	21,3	84,0	33,63
36	Banten	30,0	38,2	36,7	22,8	2,0	18,6	63,5	44,55
51	Bali	25,7	36,8	38,3	90,3	3,2	44,1	96,2	47,18
52	Nusa Tenggara Barat	28,6	34,8	35,4	24,7	3,3	13,8	67,0	27,87
53	Nusa Tenggara Timur	25,4	34,5	32,3	48,3	6,1	19,5	46,0	15,69
61	Kalimantan Barat	20,7	38,7	35,4	53,3	5,3	15,3	61,1	25,25
62	Kalimantan Tengah	20,7	28,2	32,2	47,4	8,2	23,8	59,0	27,44
63	Kalimantan Selatan	20,2	34,3	32,6	58,6	6,2	19,5	75,8	23,19
64	Kalimantan Timur	25,6	36,5	35,1	98,7	6,6	32,5	82,0	42,04
71	Sulawesi Utara	20,6	33,6	34,8	119,4	6,5	56,5	82,2	40,07
72	Sulawesi Tengah	20,9	29,1	30,7	54,5	5,9	20,3	58,4	22,00
73	Sulawesi Selatan	24,7	32,1	34,2	65,9	5,1	25,0	63,5	26,80
74	Sulawesi Tenggara	26,1	32,2	34,0	41,8	10,0	20,6	52,8	25,03
75	Gorontalo	25,0	30,7	33,2	41,1	7,5	26,9	59,3	30,60
76	Sulawesi Barat	25,1	34,0	33,7	21,0	6,8	23,4	39,7	16,47
81	Maluku	22,4	30,1	34,3	110,9	11,58	25,90	44,75	21,21
82	Maluku Utara	23,0	34,3	30,7	49,9	9,5	29,5	36,9	25,05
91	Papua Barat	28,8	27,9	34,4	94,0	13,2	70,0	60,8	23,00
92	Papua	26,2	34,8	34,8	69,3	11,5	32,2	46,9	24,98

Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2008 (Lanjutan)

Kode	Propinsi	Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lainnya			
		Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik (%)	Kantor Bank per Kecamatan	Luas Lahan Sawah Beririgrasi (%)	Panjang Jalan Diaspal (%)
11	Aceh	89,8	1,28	67,5	57,75
12	Sumatera Utara	92,6	2,16	57,6	49,03
13	Sumatera Barat	88,6	2,49	80,9	50,36
14	Riau	87,2	1,68	13,3	28,75
15	Jambi	84,4	1,21	29,1	50,77
16	Sumatera Selatan	83,4	2,02	16,6	55,42
17	Bengkulu	80,6	1,35	70,7	61,14
18	Lampung	86,3	1,90	51,8	50,65
19	Kep. Bangka Belitung	94,0	2,35	74,0	74,56
21	Kepulauan Riau	87,3	3,69	62,8	28,75
31	DKI Jakarta	99,6	65,59	96,3	79,67
32	Jawa Barat	98,4	4,47	80,7	87,83
33	Jawa Tengah	98,5	6,02	71,3	79,76
34	D.I, Yogyakarta	98,8	3,60	84,2	70,32
35	Jawa Timur	98,3	4,71	78,9	85,19
36	Banten	96,5	1,90	55,4	76,34
51	Bali	97,8	9,39	99,4	87,36
52	Nusa Tenggara Barat	86,2	2,14	85,0	57,62
53	Nusa Tenggara Timur	41,7	0,76	69,8	47,10
61	Kalimantan Barat	78,7	1,43	28,6	36,85
62	Kalimantan Tengah	75,2	0,94	37,0	32,36
63	Kalimantan Selatan	93,8	1,59	11,0	67,82
64	Kalimantan Timur	93,2	2,41	28,4	37,51
71	Sulawesi Utara	95,8	1,31	82,0	59,50
72	Sulawesi Tengah	77,7	0,84	93,2	75,63
73	Sulawesi Selatan	88,5	1,83	62,0	47,35
74	Sulawesi Tenggara	76,3	0,51	76,0	46,73
75	Gorontalo	76,9	1,03	66,6	43,52
76	Sulawesi Barat	77,6	0,85	58,6	57,12
81	Maluku	75,06	0,89	100,0	58,45
82	Maluku Utara	75,8	0,16	77,1	79,75
91	Papua Barat	67,5	0,34	62,8	46,10
92	Papua	41,8	0,40	86,6	65,30

Dimensi Lingkungan Hidup 2008

Kode	Propinsi	Pencemaran Air/Tanah						
		Konsentrasi BOD pada Air Sungai (mg/L)	Konsentrasi COD pada Air Sungai (mg/L)	Konsentrasi DO pada Air Sungai (mg/L)	Desa tidak Mengalami Pencemaran Air (%)	Desa tidak Mengalami Pencemaran Tanah (%)	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Bersih (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)
11	Aceh	5,48	76,00	3,31	90,72	98,15	41,23	39,80
12	Sumatera Utara	27,00	134,00	5,10	91,45	99,10	52,27	53,70
13	Sumatera Barat	64,00	197,60	5,20	88,53	96,54	49,51	35,46
14	Riau	100,00	778,05	3,00	86,78	98,69	41,02	54,76
15	Jambi	4,00	15,00	5,46	89,56	98,70	46,89	38,11
16	Sumatera Selatan	3,74	54,00	5,55	90,78	98,64	48,23	39,03
17	Bengkulu	30,80	51,20	2,10	90,90	99,04	31,31	29,61
18	Lampung	2,03	27,95	4,89	90,21	99,36	45,01	34,32
19	Kep. Bangka Belitung	4,82	28,95	1,90	54,94	84,30	54,03	57,40
21	Kepulauan Riau	323,00	1,680,00	2,60	91,72	99,08	56,82	43,89
31	DKI Jakarta	87,45	126,67	0,03	76,78	98,88	87,77	68,82
32	Jawa Barat	140,00	399,00	1,00	84,18	97,77	50,41	45,41
33	Jawa Tengah	14,31	955,36	2,50	90,69	98,68	58,09	44,49
34	D.I. Yogyakarta	26,98	74,40	2,58	86,07	97,72	69,61	52,25
35	Jawa Timur	185,10	695,40	0,10	92,55	99,24	65,16	41,70
36	Banten	30,00	96,00	2,00	85,31	97,81	53,89	50,34
51	Bali	48,00	97,40	1,00	87,78	98,88	74,57	60,55
52	Nusa Tenggara Barat	11,80	2,00	3,40	87,19	98,90	50,00	33,64
53	Nusa Tenggara Timur	26,32	29,00	1,31	97,47	99,71	45,13	17,56
61	Kalimantan Barat	4,60	24,00	2,90	75,88	94,19	19,44	35,64
62	Kalimantan Tengah	21,10	50,10	4,30	79,01	98,20	35,46	24,28
63	Kalimantan Selatan	75,20	151,40	3,27	84,09	97,26	54,00	32,48
64	Kalimantan Timur	3,70	28,94	2,57	82,57	97,46	67,51	52,50
71	Sulawesi Utara	8,70	14,70	2,96	90,56	98,53	58,47	46,46
72	Sulawesi Tengah	47,00	126,90	2,70	93,59	98,52	45,74	38,86
73	Sulawesi Selatan	55,18	122,62	1,40	91,92	99,02	53,97	45,46
74	Sulawesi Tenggara	31,50	55,15	4,80	96,89	99,16	56,04	38,80
75	Gorontalo	1,57	4,03	3,20	90,75	99,83	41,29	26,98
76	Sulawesi Barat	0,59	1,48	6,00	93,28	99,63	44,91	34,94
81	Maluku	50,80	311,00	4,60	80,91	99,34	46,92	36,14
82	Maluku Utara	3,50	40,00	5,00	92,57	98,07	41,82	37,16
91	Papua Barat	1,79	11,83	7,12	96,10	99,34	40,00	29,96
92	Papua	78,00	150,00	3,65	97,61	99,67	27,83	23,06

Dimensi Lingkungan Hidup 2008 (Lanjutan)

Kode	Propinsi	Pencemaran Udara		
		Konsentrasi NO2 di Udara (mg/m3)	Konsentrasi SO2 di Udara (mg/m3)	Desa tidak Mengalami Pencemaran Udara (%)
11	Aceh	65,81	7,80	95,25
12	Sumatera Utara	88,03	37,62	92,63
13	Sumatera Barat	150,01	30,30	93,51
14	Riau	89,18	10,30	81,23
15	Jambi	55,16	59,50	94,47
16	Sumatera Selatan	106,70	27,91	94,61
17	Bengkulu	35,30	8,65	92,45
18	Lampung	470,06	14,20	88,29
19	Kep, Bangka Belitung	72,85	22,68	95,64
21	Kepulauan Riau	55,50	337,30	93,87
31	DKI Jakarta	119,80	30,33	91,01
32	Jawa Barat	86,26	68,85	85,52
33	Jawa Tengah	59,35	15,00	89,39
34	D,I, Yogyakarta	91,85	10,05	66,21
35	Jawa Timur	41,62	27,90	87,45
36	Banten	110,76	34,76	85,51
51	Bali	20,97	31,35	92,42
52	Nusa Tenggara Barat	54,02	6,05	89,70
53	Nusa Tenggara Timur	14,45	11,12	96,18
61	Kalimantan Barat	102,00	26,66	93,13
62	Kalimantan Tengah	13,67	2,49	92,13
63	Kalimantan Selatan	54,06	37,42	90,12
64	Kalimantan Timur	68,21	13,90	92,17
71	Sulawesi Utara	68,79	12,93	94,18
72	Sulawesi Tengah	19,76	11,28	96,62
73	Sulawesi Selatan	62,11	45,29	92,29
74	Sulawesi Tenggara	80,59	18,80	97,53
75	Gorontalo	58,63	30,62	96,40
76	Sulawesi Barat	62,11	45,29	94,59
81	Maluku	30,89	23,48	96,03
82	Maluku Utara	9,12	24,20	97,20
91	Papua Barat	24,32	21,73	98,51
92	Papua	24,32	21,73	99,52

Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2008

Kode	Propinsi	Informasi		Teknologi			Komunikasi		
		Penduduk Mendengarkan Siaran Radio (%)	Penduduk Menyaksikan Siaran TV (%)	Penduduk Membaca Surat Kabar (%)	RT menguasai Telepon Rumah (%)	RT menguasai HP (%)	Jumlah Kantor Pos per 10 Desa	RT menguasai PC/Laptop/Netbook (%)	RT dengan Paling Tidak 1 ART Mengakses Internet (%)
11	Aceh	29,2	79,5	30,5	5,2	50,1	0,18	7,42	7,01
12	Sumatera Utara	33,6	82,7	26,9	10,4	56,3	0,37	5,50	7,17
13	Sumatera Barat	31,7	83,4	25,6	12,8	56,3	1,42	8,20	9,11
14	Riau	38,2	89,2	26,4	9,6	74,0	0,46	10,08	8,70
15	Jambi	22,7	86,6	17,7	8,1	60,7	0,45	5,94	5,48
16	Sumatera Selatan	33,3	83,2	22,4	9,2	53,2	0,33	6,96	8,08
17	Bengkulu	33,8	76,1	19,4	7,0	52,3	0,44	9,26	7,81
18	Lampung	36,8	85,4	14,9	6,9	46,7	0,43	4,17	4,30
19	Kep. Bangka Belitung	33,4	95,2	33,6	8,4	69,4	0,77	8,94	7,93
21	Kepulauan Riau	48,4	90,0	36,2	13,3	77,9	5,59	11,04	9,02
31	DKI Jakarta	45,7	95,5	55,4	35,4	84,2	7,34	23,34	27,61
32	Jawa Barat	41,7	90,1	24,0	13,5	49,2	0,73	8,69	8,18
33	Jawa Tengah	45,6	89,4	19,0	7,7	46,7	0,58	6,32	7,34
34	D.I, Yogyakarta	62,4	89,2	39,5	10,8	64,3	2,00	21,72	24,39
35	Jawa Timur	42,2	88,3	19,8	12,6	47,7	0,60	7,03	8,61
36	Banten	43,1	88,8	29,8	16,8	57,8	0,65	11,63	10,04
51	Bali	63,8	89,9	26,3	16,2	65,4	1,23	11,31	8,57
52	Nusa Tenggara Barat	34,0	81,4	12,5	4,1	38,2	0,97	4,10	2,71
53	Nusa Tenggara Timur	23,6	33,1	12,4	4,6	28,9	0,32	4,39	4,46
61	Kalimantan Barat	32,0	83,6	17,6	7,5	49,2	0,57	5,66	6,17
62	Kalimantan Tengah	35,3	79,7	18,9	6,8	51,7	0,39	5,60	5,69
63	Kalimantan Selatan	40,3	87,6	20,8	8,9	63,4	0,45	7,86	6,24
64	Kalimantan Timur	35,9	86,2	36,3	19,2	76,6	1,09	16,30	11,05
71	Sulawesi Utara	42,2	91,6	36,7	13,2	49,1	0,68	7,76	6,79
72	Sulawesi Tengah	30,3	84,1	15,4	5,6	41,9	0,60	6,19	4,53
73	Sulawesi Selatan	39,2	81,3	19,1	11,6	53,0	0,34	5,51	5,48
74	Sulawesi Tenggara	26,7	76,3	15,4	5,5	43,6	0,37	5,77	5,27
75	Gorontalo	56,4	77,9	20,6	6,8	40,0	0,33	6,90	3,37
76	Sulawesi Barat	39,1	71,0	16,9	6,2	44,3	0,36	4,58	4,06
81	Maluku	31,5	65,9	19,2	6,4	31,8	2,91	3,99	3,64
82	Maluku Utara	32,1	83,2	16,3	6,6	38,5	1,06	7,52	4,77
91	Papua Barat	34,3	55,3	15,5	7,4	40,8	0,24	6,16	6,02
92	Papua	29,4	38,5	15,9	6,1	28,1	0,13	7,39	5,65

Dimensi Ekonomi 2009

Kode	Propinsi	Pendapatan dan Urbanisasi			Ketenagakerjaan			Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi, dan Struktur Ekonomi		
		Daya Beli	PDRB per Kapita (ribu rupiah)	Penduduk Perkotaan (%)	Pekerja Sektor Formal (%)	Penduduk Bekerja >35 Jam (%)	Pekerja dengan Upah >UMR (%)	Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB (%)
11	Aceh	610,3	16215,9	28,55	51,11	56,51	50,14	7,78	21,9	39,73
12	Sumatera Utara	634,7	17840,2	46,11	53,28	66,18	61,35	16,27	21,1	45,02
13	Sumatera Barat	633,7	15802,8	34,41	54,61	61,06	59,55	13,02	18,3	54,03
14	Riau	642,6	60210,8	50,32	51,61	64,79	56,67	14,87	22,8	14,87
15	Jambi	632,6	15107,1	32,43	44,80	57,94	53,66	11,32	17,3	37,81
16	Sumatera Selatan	628,3	18906,9	39,02	40,40	58,43	51,97	12,72	23,0	31,16
17	Bengkulu	626,8	9318,2	35,21	39,37	63,20	67,72	12,22	10,9	49,54
18	Lampung	617,4	11789,0	26,93	45,98	60,84	57,03	12,33	20,1	40,29
19	Kep. Bangka Belitung	639,1	19869,4	47,92	68,72	68,60	59,48	12,71	27,6	33,15
21	Kepulauan Riau	641,6	42165,7	52,94	86,79	84,86	73,55	19,68	59,7	32,38
31	DKI Jakarta	627,5	82079,9	100,00	99,38	88,74	63,30	53,86	34,8	71,28
32	Jawa Barat	628,7	15710,9	58,97	74,82	75,37	71,92	23,30	18,3	37,44
33	Jawa Tengah	636,4	11957,7	48,64	62,96	67,13	56,28	19,09	19,3	40,59
34	D.I. Yogyakarta	644,7	11830,1	64,48	69,90	75,22	50,70	19,99	33,8	58,56
35	Jawa Timur	640,1	18350,8	48,90	57,07	64,14	64,59	19,19	17,9	48,17
36	Banten	627,6	13598,3	60,07	79,88	78,67	74,32	28,30	31,7	40,80
51	Bali	632,1	16214,9	57,75	65,76	72,94	68,28	27,89	23,3	65,58
52	Nusa Tenggara Barat	638,0	9424,0	42,02	55,06	60,96	50,02	11,52	26,5	36,42
53	Nusa Tenggara Timur	602,6	5225,2	17,16	31,85	45,36	61,25	6,52	15,3	50,18
61	Kalimantan Barat	630,3	12471,4	27,72	36,86	69,06	64,50	9,12	28,6	45,29
62	Kalimantan Tengah	633,9	17366,8	34,00	40,27	72,89	57,09	9,24	44,1	49,33
63	Kalimantan Selatan	634,6	14638,3	41,60	57,34	61,28	52,76	14,43	20,1	39,93
64	Kalimantan Timur	638,7	88920,1	61,74	64,99	76,63	83,47	11,21	14,2	17,34
71	Sulawesi Utara	631,0	14379,5	43,45	63,24	72,05	45,32	7,91	27,1	50,35
72	Sulawesi Tengah	627,4	12924,9	20,96	40,88	58,25	58,09	6,87	19,3	39,66
73	Sulawesi Selatan	635,5	12632,5	32,23	50,70	61,05	45,34	14,80	22,3	47,64
74	Sulawesi Tenggara	615,3	12111,6	23,04	47,11	54,97	55,99	11,66	27,4	45,62
75	Gorontalo	621,3	7198,1	31,49	59,11	70,94	61,06	7,79	32,8	56,90
76	Sulawesi Barat	630,3	8276,7	33,10	38,46	52,64	45,05	4,94	15,9	38,64
81	Maluku	610,7	5277,4	26,39	43,72	66,08	66,13	6,12	6,0	59,56
82	Maluku Utara	598,5	4808,0	29,61	41,27	61,03	69,38	7,18	9,5	41,33
91	Papua Barat	595,3	19557,1	29,61	43,40	68,50	68,10	2,18	30,9	27,53
92	Papua	603,9	31777,1	22,92	25,71	61,93	65,30	3,50	31,2	18,61

Dimensi Sosial 2009

Kode	Propinsi	Pendidikan					Kesehatan			
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	AMH	APS 7-12	APS 13-15	APS 16-18	Penduduk Usia 24+ Menamatkan PT (%)	Angka Harapan Hidup	Penduduk yang Tidak Mengalami Keluhan Kesehatan (%)	Balita Mendapat Imunisasi (%)
11	Aceh	8,63	96,39	99,07	94,31	72,74	9,65	69,2	78,7	81,2
12	Sumatera Utara	8,65	97,15	98,70	91,43	66,34	7,97	71,9	82,5	78,1
13	Sumatera Barat	8,45	96,81	98,02	88,79	65,25	10,11	70,9	80,8	82,8
14	Riau	8,56	98,11	98,55	91,58	63,92	9,19	72,1	82,6	84,3
15	Jambi	7,68	95,51	98,11	85,10	55,13	7,11	70,7	83,4	83,3
16	Sumatera Selatan	7,66	97,21	97,80	84,65	54,12	6,45	71,2	84,7	87,2
17	Bengkulu	8,23	94,90	98,53	87,47	58,80	9,41	70,3	81,2	88,5
18	Lampung	7,73	94,37	98,53	85,92	50,44	5,87	71,3	81,5	88,9
19	Kep. Bangka Belitung	7,41	95,41	96,90	79,98	46,70	7,44	70,9	75,9	85,8
21	Kepulauan Riau	8,12	96,08	98,95	91,26	64,62	5,68	72,5	78,6	86,4
31	DKI Jakarta	10,28	98,94	99,06	90,75	61,53	17,64	76,0	82,3	91,1
32	Jawa Barat	7,72	95,98	98,22	81,85	47,06	7,30	70,7	82,4	88,6
33	Jawa Tengah	7,07	89,46	98,80	84,59	52,84	5,80	72,5	83,5	91,7
34	D.I. Yogyakarta	8,78	90,18	99,65	93,42	72,26	12,41	75,8	82,3	94,4
35	Jawa Timur	7,20	87,80	98,57	88,00	58,44	6,60	71,4	81,8	88,1
36	Banten	8,02	95,95	97,85	80,86	49,96	8,11	69,5	80,4	85,0
51	Bali	7,83	87,22	98,52	88,43	64,59	9,43	74,2	76,5	93,2
52	Nusa Tenggara Barat	6,59	80,18	98,12	85,81	56,92	5,97	66,7	79,0	90,8
53	Nusa Tenggara Timur	6,60	87,96	95,99	79,28	47,95	5,31	69,6	67,9	86,2
61	Kalimantan Barat	6,58	89,70	96,94	83,92	49,83	5,10	70,5	80,4	79,2
62	Kalimantan Tengah	7,84	97,39	98,50	86,64	53,65	6,41	71,9	82,8	86,1
63	Kalimantan Selatan	7,54	95,41	97,59	79,83	49,43	7,26	68,9	80,8	81,3
64	Kalimantan Timur	8,73	96,89	98,42	91,55	64,07	9,01	73,0	82,7	91,1
71	Sulawesi Utara	8,76	99,22	97,82	88,40	56,56	7,54	74,8	75,6	90,8
72	Sulawesi Tengah	7,89	95,78	97,22	83,41	49,30	7,20	68,6	74,0	81,4
73	Sulawesi Selatan	7,41	87,02	96,53	80,96	51,67	9,28	70,6	80,9	85,0
74	Sulawesi Tenggara	7,90	91,51	97,69	87,20	59,19	9,05	70,2	76,7	85,9
75	Gorontalo	7,18	95,71	96,55	80,94	48,77	6,60	69,8	71,4	87,7
76	Sulawesi Barat	7,05	87,59	95,71	77,09	43,58	6,84	70,6	76,8	75,3
81	Maluku	8,56	97,42	97,87	91,98	72,28	9,37	69,4	75,7	76,1
82	Maluku Utara	8,21	95,74	96,85	90,02	63,38	8,26	68,9	78,5	78,6
91	Papua Barat	8,16	92,94	93,35	88,59	57,95	11,02	69,5	80,4	84,2
92	Papua	6,36	70,29	76,09	73,68	47,51	6,43	69,8	82,2	68,4

Dimensi Sosial 2009 (Lanjutan)

Kode	Propinsi	Kependudukan			Sosial Lainnya		
		Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Ketergantungan (%)	Fertilitas (TFR)	Rumah Tangga dengan Persepsi Tingkat Keamanan Baik dan Sangat Baik (%)	Penduduk yang Tidak Menjadi Korban Kejahatan (%)	Persentase Penduduk Tidak Miskin
11	Aceh	1,62	53,40	2,38	63,3	99,41	78,2
12	Sumatera Utara	1,58	54,70	2,44	66,6	98,96	88,5
13	Sumatera Barat	1,36	55,20	2,42	58,1	99,05	90,5
14	Riau	2,26	51,80	2,33	58,5	99,30	90,5
15	Jambi	1,65	49,20	2,28	55,6	99,29	91,2
16	Sumatera Selatan	1,42	50,90	2,19	54,8	99,00	83,7
17	Bengkulu	1,52	49,10	2,19	51,3	98,88	81,4
18	Lampung	1,36	46,00	2,26	73,6	98,81	79,8
19	Kep. Bangka Belitung	1,39	49,20	2,18	57,9	98,81	92,5
21	Kepulauan Riau	4,28	49,60	2,33	59,1	99,10	91,7
31	DKI Jakarta	0,84	37,30	1,52	61,7	98,55	96,4
32	Jawa Barat	1,43	47,50	2,19	60,0	98,60	88,0
33	Jawa Tengah	0,73	47,30	2,00	70,8	98,97	82,3
34	D.I, Yogyakarta	0,96	37,70	1,39	72,0	98,26	82,8
35	Jawa Timur	0,52	39,90	1,66	72,3	98,90	83,3
36	Banten	1,88	50,70	2,28	55,0	98,46	92,4
51	Bali	1,00	42,60	1,67	77,6	99,29	94,9
52	Nusa Tenggara Barat	1,61	54,20	2,43	64,0	98,04	77,2
53	Nusa Tenggara Timur	1,88	59,40	2,80	69,9	98,06	76,7
61	Kalimantan Barat	1,65	52,20	2,43	65,6	99,34	90,7
62	Kalimantan Tengah	1,39	48,20	2,21	70,6	99,59	93,0
63	Kalimantan Selatan	1,44	45,60	2,16	60,5	98,51	94,9
64	Kalimantan Timur	2,27	45,30	2,22	61,9	99,03	92,3
71	Sulawesi Utara	0,95	42,70	1,90	75,5	98,50	90,2
72	Sulawesi Tengah	1,72	49,10	2,31	78,0	99,12	81,0
73	Sulawesi Selatan	1,33	50,50	2,27	64,6	98,97	87,7
74	Sulawesi Tenggara	2,09	57,50	2,61	71,2	99,03	81,1
75	Gorontalo	1,21	48,80	2,25	72,1	98,13	75,0
76	Sulawesi Barat	1,50	50,00	2,26	66,7	99,28	84,7
81	Maluku	1,42	56,70	2,68	70,0	98,63	71,8
82	Maluku Utara	1,60	55,80	2,63	71,1	99,29	89,6
91	Papua Barat	1,90	48,40	2,69	52,1	98,95	64,3
92	Papua	1,99	48,30	2,67	52,7	98,57	62,5

Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2009

Kode	Propinsi	Pendidikan			Kesehatan				
		Rasio Murid SD per Kelas SD	Rasio Murid SMP per Kelas SMP	Rasio Murid SMA per Kelas SMA	Tempat Tidur RS per 100,000 Penduduk	Puskesmas per 100,000 Penduduk	Dokter per 100,000 Penduduk	Balita dengan Kelahiran Ditolong Tenaga Medis (%)	Penduduk yang Berobat ke Tenaga Medis / Fasilitas Kesehatan (%)
11	Aceh	22,0	35,0	36,1	58,64	7,01	29,65	85,86	27,23
12	Sumatera Utara	29,0	36,0	38,4	85,66	3,80	25,97	88,68	33,15
13	Sumatera Barat	25,0	34,0	36,7	70,12	4,77	29,16	88,86	24,16
14	Riau	28,0	32,0	37,4	37,77	3,53	24,19	82,71	46,10
15	Jambi	23,0	33,0	36,0	46,41	5,67	21,95	70,51	32,74
16	Sumatera Selatan	29,0	36,0	37,4	52,18	3,90	15,95	78,72	36,71
17	Bengkulu	26,0	37,0	36,6	45,98	8,65	44,28	85,20	35,90
18	Lampung	32,0	34,0	35,2	33,26	3,42	12,14	76,37	29,41
19	Kep. Bangka Belitung	24,0	35,0	35,2	45,52	4,45	22,09	85,37	36,30
21	Kepulauan Riau	28,0	35,0	34,7	91,46	4,06	38,88	87,45	25,19
31	DKI Jakarta	32,0	36,0	35,5	151,45	3,84	43,85	98,14	60,80
32	Jawa Barat	36,0	36,0	38,6	35,65	2,44	16,99	70,17	43,43
33	Jawa Tengah	27,0	38,0	38,4	56,26	2,58	19,60	84,30	36,40
34	D.I, Yogyakarta	20,0	35,0	35,5	81,74	3,46	46,01	96,94	47,21
35	Jawa Timur	26,0	37,0	38,9	49,80	2,53	21,29	86,33	32,40
36	Banten	29,0	36,0	36,2	22,76	2,02	18,58	68,86	45,12
51	Bali	26,0	40,0	38,9	90,27	3,24	44,08	96,22	47,40
52	Nusa Tenggara Barat	28,0	35,0	36,6	24,75	3,25	13,82	71,32	25,51
53	Nusa Tenggara Timur	26,0	34,0	33,9	48,25	6,13	19,54	49,85	19,24
61	Kalimantan Barat	23,0	35,0	36,5	53,28	5,27	15,27	59,06	25,97
62	Kalimantan Tengah	18,0	34,0	34,2	47,39	8,21	23,82	63,55	25,90
63	Kalimantan Selatan	21,0	34,0	34,5	58,61	6,21	19,47	76,01	24,74
64	Kalimantan Timur	26,0	35,0	36,4	98,75	6,62	32,51	85,24	44,89
71	Sulawesi Utara	21,0	30,0	32,9	119,43	6,52	56,48	82,81	45,72
72	Sulawesi Tengah	22,0	33,0	34,3	54,54	5,91	20,34	62,47	24,20
73	Sulawesi Selatan	26,0	35,0	35,6	65,91	5,06	25,02	69,48	28,24
74	Sulawesi Tenggara	27,0	30,0	32,0	41,78	10,02	20,58	48,72	22,93
75	Gorontalo	26,0	30,0	34,9	41,14	7,51	26,95	63,17	32,39
76	Sulawesi Barat	29,0	34,0	35,8	21,02	6,78	23,45	47,45	20,77
81	Maluku	23,0	32,0	35,2	110,93	11,58	25,90	42,48	25,24
82	Maluku Utara	17,0	37,0	33,4	49,92	9,48	29,49	47,21	28,85
91	Papua Barat	30,0	33,0	34,7	93,97	13,15	70,00	60,43	38,97
92	Papua	25,0	35,0	34,9	69,34	11,48	32,19	49,08	27,79

Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2009 (Lanjutan)

Kode	Propinsi	Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lainnya			
		Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik (%)	Kantor Bank per Kecamatan	Luas Lahan Sawah Beririgrasi (%)	Panjang Jalan Diaspal (%)
11	Aceh	91,5	1,3	66,7	45,78
12	Sumatera Utara	93,1	2,2	61,7	54,67
13	Sumatera Barat	89,8	3,3	80,7	45,98
14	Riau	88,6	2,7	10,9	38,78
15	Jambi	85,8	1,6	29,2	57,72
16	Sumatera Selatan	88,0	2,2	16,6	56,24
17	Bengkulu	87,0	1,3	71,5	53,64
18	Lampung	88,2	1,5	52,2	59,09
19	Kep. Bangka Belitung	94,0	2,5	63,3	80,60
21	Kepulauan Riau	93,2	3,8	61,3	61,08
31	DKI Jakarta	99,6	170,0	97,4	79,67
32	Jawa Barat	98,7	3,6	81,0	80,34
33	Jawa Tengah	98,8	6,2	71,8	83,68
34	D.I, Yogyakarta	99,3	3,6	84,1	77,21
35	Jawa Timur	98,6	5,0	80,0	85,45
36	Banten	97,2	3,4	56,7	65,04
51	Bali	97,6	9,5	99,4	80,25
52	Nusa Tenggara Barat	89,7	2,3	84,7	63,29
53	Nusa Tenggara Timur	46,2	0,8	71,5	47,33
61	Kalimantan Barat	75,4	1,6	31,0	43,34
62	Kalimantan Tengah	77,5	1,2	34,8	32,51
63	Kalimantan Selatan	93,8	1,6	11,0	59,96
64	Kalimantan Timur	94,6	3,1	28,9	40,88
71	Sulawesi Utara	95,7	0,8	82,0	67,98
72	Sulawesi Tengah	78,4	1,1	93,1	45,70
73	Sulawesi Selatan	90,4	2,1	62,6	50,83
74	Sulawesi Tenggara	80,8	0,6	76,6	51,01
75	Gorontalo	80,2	1,1	71,1	45,47
76	Sulawesi Barat	82,3	0,8	59,0	29,77
81	Maluku	73,3	0,8	99,4	55,00
82	Maluku Utara	72,5	0,3	75,9	50,41
91	Papua Barat	69,0	0,3	63,2	43,68
92	Papua	42,8	0,4	93,7	34,15

Dimensi Lingkungan Hidup 2009

Kode	Propinsi	Pencemaran Air/Tanah						
		Konsentrasi BOD pada Air Sungai (mg/L)	Konsentrasi COD pada Air Sungai (mg/L)	Konsentrasi DO pada Air Sungai (mg/L)	Desa tidak Mengalami Pencemaran Air (%)	Desa tidak Mengalami Pencemaran Tanah (%)	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Bersih (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)
11	Aceh	5,48	76,00	3,31	90,72	98,15	48,61	42,56
12	Sumatera Utara	27,00	134,00	5,10	91,45	99,10	56,52	55,40
13	Sumatera Barat	64,00	197,60	5,20	88,53	96,54	53,55	35,44
14	Riau	100,00	778,05	3,00	86,78	98,69	43,50	53,33
15	Jambi	4,00	15,00	5,46	89,56	98,70	46,83	39,62
16	Sumatera Selatan	3,74	54,00	5,55	90,78	98,64	51,54	41,20
17	Bengkulu	30,80	51,20	2,10	90,90	99,04	37,97	34,93
18	Lampung	2,03	27,95	4,89	90,21	99,36	45,20	36,77
19	Kep. Bangka Belitung	4,82	28,95	1,90	54,94	84,30	60,47	61,50
21	Kepulauan Riau	323,00	1,680,00	2,60	91,72	99,08	61,50	42,83
31	DKI Jakarta	87,45	126,67	0,03	76,78	98,88	87,86	72,02
32	Jawa Barat	140,00	399,00	1,00	84,18	97,77	55,62	49,20
33	Jawa Tengah	14,31	955,36	2,50	90,69	98,68	61,93	47,98
34	D.I. Yogyakarta	26,98	74,40	2,58	86,07	97,72	70,65	56,62
35	Jawa Timur	185,10	695,40	0,10	92,55	99,24	67,08	45,27
36	Banten	30,00	96,00	2,00	85,31	97,81	53,94	52,11
51	Bali	48,00	97,40	1,00	87,78	98,88	80,38	58,52
52	Nusa Tenggara Barat	11,80	2,00	3,40	87,19	98,90	53,01	31,95
53	Nusa Tenggara Timur	26,32	29,00	1,31	97,47	99,71	45,34	14,65
61	Kalimantan Barat	4,60	24,00	2,90	75,88	94,19	19,28	40,24
62	Kalimantan Tengah	21,10	50,10	4,30	79,01	98,20	38,11	24,35
63	Kalimantan Selatan	75,20	151,40	3,27	84,09	97,26	55,45	38,15
64	Kalimantan Timur	3,70	28,94	2,57	82,57	97,46	69,47	58,20
71	Sulawesi Utara	8,70	14,70	2,96	90,56	98,53	62,50	53,75
72	Sulawesi Tengah	47,00	126,90	2,70	93,59	98,52	49,64	37,81
73	Sulawesi Selatan	55,18	122,62	1,40	91,92	99,02	58,06	51,82
74	Sulawesi Tenggara	31,50	55,15	4,80	96,89	99,16	59,31	42,29
75	Gorontalo	1,57	4,03	3,20	90,75	99,83	48,46	31,68
76	Sulawesi Barat	0,59	1,48	6,00	93,28	99,63	47,68	40,74
81	Maluku	50,80	311,00	4,60	80,91	99,34	55,68	37,43
82	Maluku Utara	3,50	40,00	5,00	92,57	98,07	44,56	34,15
91	Papua Barat	1,79	11,83	7,12	96,10	99,34	42,72	40,94
92	Papua	78,00	150,00	3,65	97,61	99,67	31,39	22,77

Dimensi Lingkungan Hidup 2009 (Lanjutan)

Kode	Propinsi	Pencemaran Udara		
		Konsentrasi NO2 di Udara (mg/m3)	Konsentrasi SO2 di Udara (mg/m3)	Desa tidak Mengalami Pencemaran Udara (%)
11	Aceh	65,81	7,80	95,25
12	Sumatera Utara	88,03	37,62	92,63
13	Sumatera Barat	40,65	30,30	93,51
14	Riau	89,18	35,50	81,23
15	Jambi	55,16	59,50	94,47
16	Sumatera Selatan	106,70	27,91	94,61
17	Bengkulu	35,30	8,65	92,45
18	Lampung	63,77	14,20	88,29
19	Kep, Bangka Belitung	23,20	22,68	95,64
21	Kepulauan Riau	62,20	10,30	93,87
31	DKI Jakarta	119,80	30,33	91,01
32	Jawa Barat	86,26	68,85	85,52
33	Jawa Tengah	59,35	15,00	89,39
34	D,I, Yogyakarta	35,57	10,05	66,21
35	Jawa Timur	46,02	27,90	87,45
36	Banten	110,76	34,76	85,51
51	Bali	20,97	31,35	92,42
52	Nusa Tenggara Barat	54,02	6,05	89,70
53	Nusa Tenggara Timur	14,45	11,12	96,18
61	Kalimantan Barat	102,00	26,66	93,13
62	Kalimantan Tengah	13,67	2,49	92,13
63	Kalimantan Selatan	54,06	37,42	90,12
64	Kalimantan Timur	68,21	13,90	92,17
71	Sulawesi Utara	68,79	12,93	94,18
72	Sulawesi Tengah	19,76	11,28	96,62
73	Sulawesi Selatan	62,11	45,29	92,29
74	Sulawesi Tenggara	80,59	18,80	97,53
75	Gorontalo	58,63	30,62	96,40
76	Sulawesi Barat	12,26	23,10	94,59
81	Maluku	36,53	23,48	96,03
82	Maluku Utara	9,12	24,20	97,20
91	Papua Barat	11,54	6,23	98,51
92	Papua	24,32	21,73	99,52

Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2009

Kode	Propinsi	Informasi		Teknologi			Komunikasi		
		Penduduk Mendengarkan Siaran Radio (%)	Penduduk Mendengarkan Siaran TV (%)	Penduduk Membaca Surat Kabar (%)	RT menguasai Telepon Rumah (%)	RT menguasai HP (%)	Jumlah Kantor Pos per 10 Desa	RT menguasai PC/Laptop/Netbook (%)	RT dengan Paling Tidak 1 ART Mengakses Internet (%)
11	Aceh	17,24	87,03	28,98	4,54	60,25	0,18	8,35	7,60
12	Sumatera Utara	20,73	89,49	22,85	9,54	66,53	0,37	8,55	8,25
13	Sumatera Barat	20,80	88,16	21,14	10,36	65,67	1,42	10,87	13,86
14	Riau	26,22	91,09	24,37	8,72	79,56	0,46	13,35	12,28
15	Jambi	11,08	90,12	13,58	5,54	65,71	0,45	7,92	7,06
16	Sumatera Selatan	19,72	88,60	19,06	8,26	58,78	0,33	8,99	9,07
17	Bengkulu	20,90	88,80	20,50	6,75	65,62	0,44	12,76	10,44
18	Lampung	18,19	90,79	11,99	6,34	59,59	0,43	5,08	5,43
19	Kep. Bangka Belitung	24,28	93,06	26,23	6,80	74,16	0,77	11,54	10,05
21	Kepulauan Riau	32,07	92,79	30,00	10,05	84,93	5,59	12,86	12,64
31	DKI Jakarta	21,35	97,43	39,20	32,68	88,52	7,34	24,95	34,27
32	Jawa Barat	23,19	93,88	19,04	12,24	61,04	0,73	10,79	12,43
33	Jawa Tengah	27,78	92,67	14,10	6,98	57,53	0,58	7,20	9,73
34	D.I. Yogyakarta	42,72	92,19	33,14	13,05	70,66	2,00	23,32	28,04
35	Jawa Timur	27,34	92,18	16,79	10,76	58,52	0,60	9,19	11,42
36	Banten	19,20	93,50	18,56	12,17	65,27	0,65	13,47	12,59
51	Bali	40,74	92,14	23,74	14,42	74,27	1,23	13,87	12,36
52	Nusa Tenggara Barat	13,80	85,11	10,60	4,07	46,60	0,97	5,52	6,75
53	Nusa Tenggara Timur	22,49	48,62	12,48	3,72	36,54	0,32	5,24	4,38
61	Kalimantan Barat	15,70	86,04	14,55	6,27	54,84	0,57	7,08	7,13
62	Kalimantan Tengah	20,54	83,68	16,22	7,65	61,30	0,39	8,44	6,23
63	Kalimantan Selatan	20,21	91,78	17,82	8,35	71,50	0,45	8,77	10,35
64	Kalimantan Timur	16,72	92,78	25,17	15,38	83,42	1,09	18,63	18,54
71	Sulawesi Utara	25,27	92,50	30,44	10,22	60,55	0,68	10,89	11,57
72	Sulawesi Tengah	18,64	87,63	14,07	4,35	50,29	0,60	6,29	5,86
73	Sulawesi Selatan	21,19	86,66	18,12	11,56	65,74	0,34	8,27	10,02
74	Sulawesi Tenggara	17,79	87,49	16,43	5,14	57,93	0,37	8,13	6,67
75	Gorontalo	43,22	86,34	20,47	7,19	54,41	0,33	10,31	9,86
76	Sulawesi Barat	13,12	83,15	14,74	4,08	54,81	0,36	6,33	4,15
81	Maluku	14,19	79,51	13,07	6,52	41,18	2,91	6,97	7,55
82	Maluku Utara	13,23	84,85	17,38	4,95	42,25	1,06	7,93	6,39
91	Papua Barat	22,33	66,51	12,64	7,90	47,30	0,24	9,90	8,62
92	Papua	16,26	42,01	11,02	4,98	31,33	0,13	9,66	6,41

**LAMPIRAN 3. OUTPUT SPSS UNTUK PENGHITUNGAN BOBOT
INDIKATOR**

DIMENSI EKONOMI

Subdimensi Pendapatan dan Urbanisasi

Correlation Matrix

		Daya beli (PPP)	PDRB per kapita (PPP)	Tingkat urbanisasi [Persentase Penduduk Perkotaan]
Correlation	Daya beli (PPP)	1,000	,262	,524
	PDRB per kapita (PPP)	,262	1,000	,628
	Tingkat urbanisasi [Persentase Penduduk Perkotaan]	,524	,628	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Daya beli (PPP)	0,30
PDRB per kapita (PPP)	0,35
Tingkat urbanisasi [Persentase Penduduk Perkotaan]	0,35

Subdimensi Ketenagakerjaan

Correlation Matrix

		Pekerja di sektor non pertanian (%)	Penduduk yang bekerja fulltime/purna waktu (%) [100-setengah penganggurna]	Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi (%)
Correlation	Pekerja di sektor non pertanian (%)	1,000	,797	,253
	Penduduk yang bekerja fulltime/purna waktu (%) [100-setengah penganggurna]	,797	1,000	,485
	Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi (%)	,253	,485	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Pekerja di sektor formal	0,35
Penduduk yang bekerja fulltime/purna waktu	0,35
Pekerja dengan tingkat upah di atas Upah Minimum Provinsi	0,30

Subdimensi Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi

Correlation Matrix

		Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB
Correlation	Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	1,000	,258	,427
	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	,258	1,000	-,017
	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	,427	-,017	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	0,40
Kontribusi PMTB terhadap PDRB	0,30
Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	0,30

DIMENSI SOSIAL

Subdimensi Pendidikan

Correlation Matrix

	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Angka melek huruf (%)	APS 7-12 tahun (%)	APS 13-15 tahun (%)	APS 16-18 tahun (%)	Penduduk usia 24+ yang menamatkan perguruan tinggi (%)
Correlation Rata-rata lama sekolah (tahun)	1,000	,687	,428	,741	,666	,796
Angka melek huruf (%)	,687	1,000	,691	,503	,290	,271
APS 7-12 tahun (%)	,428	,691	1,000	,557	,340	,161
APS 13-15 tahun (%)	,741	,503	,557	1,000	,916	,484
APS 16-18 tahun (%)	,666	,290	,340	,916	1,000	,522
Penduduk usia 24+ yang menamatkan perguruan tinggi (%)	,796	,271	,161	,484	,522	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rata-rata lama sekolah (tahun)	0,20
Angka melek huruf	0,15
APS 7-12 tahun	0,15
APS 13-15 tahun	0,20
APS 16-18 tahun	0,15
Penduduk usia 24+ yang menamatkan perguruan tinggi	0,15

Subdimensi Kesehatan

Correlation Matrix

		Angka harapan hidup (tahun)	Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan (%)	Balita mendapat imunisasi (%) [Rata-rata BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis]
Correlation	Angka harapan hidup (tahun)	1,000	,274	,511
	Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan (%)	,274	1,000	,066
	Balita mendapat imunisasi (%) [Rata-rata BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis]	,511	,066	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Angka harapan hidup (tahun)	0,35
Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan	0,30
Balita mendapat imunisasi [Rata-rata BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis]	0,35

Subdimensi Kependudukan

Correlation Matrix

	1/Pertumbuhan penduduk	1/Rasio Ketergantungan	1/Fertilitas (TFR)
Correlation 1/Pertumbuhan penduduk	1,000	,388	,503
1/Rasio Ketergantungan	,388	1,000	,879
1/Fertilitas (TFR)	,503	,879	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Pertumbuhan penduduk	0,30
Rasio Ketergantungan	0,35
Fertilitas (TFR)	0,35

Subdimensi Sosial Lainnya

Correlation Matrix

	Rumahtangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik (%)	% penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan	Persentase Penduduk tidak miskin (%)
Correlation Rumahtangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik (%)	1,000	-,013	,059
% penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan	-,013	1,000	,321
Persentase Penduduk tidak miskin (%)	,059	,321	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rumahtangga dengan persepsi tingkat keamanan baik dan sangat baik	0,30
Penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan	0,35
Persentase Penduduk tidak miskin	0,35

DIMENSI INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK

Subdimensi Pendidikan

Correlation Matrix

		Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD	Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP	Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA
Correlation	Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD	1,000	,141	,430
	Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP	,141	1,000	,645
	Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA	,430	,645	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD	0,30
Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP	0,30
Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA	0,40

Subdimensi Kesehatan

Correlation Matrix

	Rasio tempat tidur Rumahsakit thd 100000 penduduk	Rasio puskesmas terhadap 100000 penduduk	Rasio dokter thd 100000 penduduk	Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (%)	Penduduk yang berobat ke tenaga medis/fasilitas kesehatan (%)
Correlation Rasio tempat tidur Rumahsakit thd 100000 penduduk	1,000	,179	,670	,342	,454
Rasio puskesmas terhadap 100000 penduduk	,179	1,000	,385	-,636	-,340
Rasio dokter thd 100000 penduduk	,670	,385	1,000	,268	,457
Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (%)	,342	-,636	,268	1,000	,602
Penduduk yang berobat ke tenaga medis/fasilitas kesehatan (%)	,454	-,340	,457	,602	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rasio tempat tidur Rumah Sakit thd 100000 penduduk	0,25
Rasio puskesmas terhadap 100000 penduduk	0,10
Rasio dokter thd 100000 penduduk	0,20
Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis (%)	0,25
Penduduk yang berobat ke tenaga medis/fasilitas kesehatan	0,20

Subdimensi Infrastruktur/Pelayanan Publik Lainnya

Correlation Matrix

	Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	Rasio kantor bank per kecamatan	Luas lahan sawah beririgasi (%)	Panjang jalan diaspal (%)
Correlation Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	1,000	,218	-,090	,628
Rasio kantor bank per kecamatan	,218	1,000	,244	,305
Luas lahan sawah beririgasi (%)	-,090	,244	1,000	,344
Panjang jalan diaspal (%)	,628	,305	,344	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik	0,20
Rasio kantor bank per kecamatan	0,30
Luas lahan sawah beririgasi	0,20
Panjang jalan diaspal	0,30

DIMENSI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Subdimensi Teknologi

Correlation Matrix

	Rumahtangga menguasai PC/laptop/notebook (%)	Rumahtangga dengan paling tidak 1 art mengakses internet (%)
Correlation Rumahtangga menguasai PC/laptop/notebook (%)	1,000	,946
Rumahtangga dengan paling tidak 1 art mengakses internet (%)	,946	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rumahtangga menguasai PC/laptop/notebook	0,50
Rumahtangga dengan paling tidak 1 art mengakses internet	0,50

Subdimensi Informasi

Correlation Matrix

	Penduduk mendengar kan siaran radio (%)	Penduduk menonton siaran TV (%)	Penduduk membaca surat kabar (%)
Correlation Penduduk mendengarkan siaran radio (%)	1,000	,203	,459
Penduduk menonton siaran TV (%)	,203	1,000	,496
Penduduk membaca surat kabar (%)	,459	,496	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Penduduk mendengarkan siaran radio	0,30
Penduduk menonton siaran TV	0,30
Penduduk membaca surat kabar	0,40

Subdimensi Komunikasi

Correlation Matrix

	Rumahtangga menguasai telepon rumah (%)	Rumahtangga menguasai HP (%)	Rasio jumlah kantor pos terhadap 10 desa
Correlation Rumahtangga menguasai telepon rumah (%)	1,000	,654	,701
Rumahtangga menguasai HP (%)	,654	1,000	,468
Rasio jumlah kantor pos terhadap 10 desa	,701	,468	1,000

Hasil Penghitungan Bobot

Indikator	Bobot
Rumahtangga menguasai telepon rumah	0,40
Rumahtangga menguasai HP	0,40
Rasio jumlah kantor pos terhadap 10 desa	0,20

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, Pembangunan Nasional: Arti dan Makna, Kuliah 4 Pembangunan Regional.
- Arief, S., 1982, Regional Disparities in Malaysia, Social Indicators Research.
- Bank Indonesia, 2008, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Bappeda Kota Mataram, 2007, Membangun Indikator untuk Pembentukan Indeks Pembangunan Daerah 2001-2005.
- Bappenas, 2002, Studi Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah.
- BPS, 2008, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- BPS, 2008a, Statistik Potensi Desa Indonesia, Jakarta.
- BPS, 2008b, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- BPS, 2009a, Kajian Awal Penyusunan Indeks Pembangunan Regional, Jakarta.
- BPS, 2009b, Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi, Jakarta.
- BPS, 2009c, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- BPS, 2009d, Luas Lahan menurut Penggunaannya di Indonesia, Jakarta.
- BPS, 2009e, Statistik Indonesia 2009, Jakarta.
- BPS, 2009f, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- BPS, 2010a, Luas Lahan menurut Penggunaannya di Indonesia, Jakarta.
- BPS, 2010b, Statistik Indonesia 2010, Jakarta.
- Chakravarty, S., 1976, Social and Demographic Statistics: Framework for the Integration of Social and Demographic Statistics in Developing Countries, United Nations Economic and Social Council.
- Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, RAPBD 2007-2008
- Ganguli, B.N, and Gupta, D.B., 1976, Levels of Living, New Delhi, India.
- Ghalib Rusli, 2005, Ekonomi Regional.
- Morris, D.M., 1979, Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index, New York, Pergamon Press.

- OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.
- Ozaslan, M., Dincer, B., and Ozgur, H., 2003, Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-Economic Development Index (SEDI), Pamukkale University, Turkey.
- Pinter, L., Hardi, P., and Bartelmus, P., 2005, Sustainable Development Indicators: Proposals for A Way Forward, UN-DSD and IISD.
- Ray, A.K., 2008, Measurement of Social Development: An International Comparison, Springer-Science.
- UN, 2007, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.
- URS Australia, 2002, Indicators of Regional Development in Western Australia, a report prepared for Department of Local Government and Regional Development.
- Wang, X., 2007, Who's in First? A Regional Development Index for the People's Republic of China's Provinces, ADB Institute Discussion Paper No. 66.
- Yale University, CIESIN, World Economic Forum and Joint Research Centre of the European Commission, 2010, 2010 Environmental Performance Index: preliminary Results, dapat diunduh di <http://epi.yale.edu>.

PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN

INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL

Pengarah	: Suhariyanto
Editor	: Sri Indrayanti Ali Said
Penulis	: Ali Said Ema Tusianti
Pengolah Data/Kompilasi Data	: Ema Tusianti Riyadi Yogi Ariawan
Penyiapan Draft Publikasi	: Ema Tusianti Riyadi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id